



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN KEMISKINAN DI TINGKAT KELUARGA
PADA MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN
PLTP SARULLA, TAPANULI UTARA
(SUATU STUDI KASUS PADA BEBERAPA DESA DI DAERAH
PANGALUAN)**

TESIS

TUBAGUS ADI SATRIA PRAKASA

0606152756

**FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

JAKARTA

JUNI 2009



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN KEMISKINAN DI TINGKAT KELUARGA
PADA MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN
PLTP SARULLA, TAPANULI UTARA
(SUATU STUDI KASUS PADA BEBERAPA DESA DI DAERAH
PANGALUAN)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 2 (dua) pada
Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Universitas Indonesia**

TUBAGUS ADI SATRIA PRAKASA

0606152756

FAKULTAS EKONOMI

MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

**KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK – PENANGGULANGAN
KEMISKINAN**

JAKARTA

JUNI 2009

PERNYATAAN ORISINALITAS

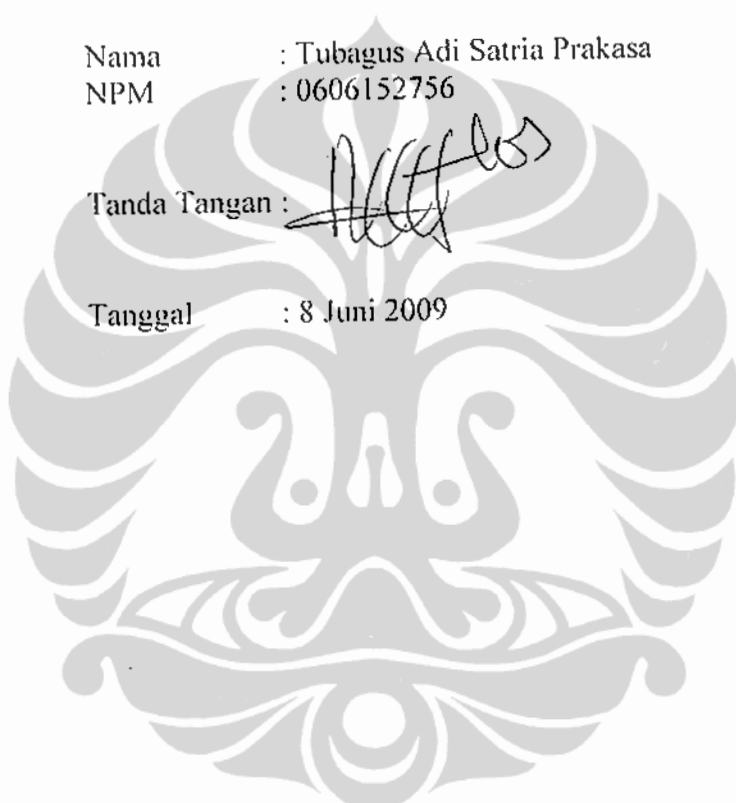
Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tubagus Adi Satria Prakasa
NPM : 0606152756

Tanda Tangan :



Tanggal : 8 Juni 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Tubagus Adi Satria Prakasa
NPM : 0606152756
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : **KAJIAN KEMISKINAN DI TINGKAT KELUARGA
PADA MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN
PLTP SARULLA, TAPANULI UTARA (SUATU
STUDI KASUS PADA BEBERAPA DESA DI
DAERAH PANGALUAN)**

Telah Berhasil Dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian Persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Budi Sulistyowati, MA. (.....)

Penguji : Hera Susanti, SE., M.Sc. (.....)

Penguji : Darlis Rabai, SE., MA. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 Juni 2009

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan karuniaNya, tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini sendiri merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar strata 2 (dua) pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Oleh karenanya penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Budi Sulistyowati, MA., selaku pembimbing yang benar-benar telah memberikan banyak waktu serta pikirannya untuk membantu penulis merampungkan tesis ini.
2. Pihak PT. Medco Power, selaku pemberi beasiswa bagi penulisan tesis.
3. Seluruh Warga daerah Pangaloan, tepatnya warga sekitar Proyek PLTP Sarulla, Tapanuli Utara yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung untuk memberikan data dan informasi yang sangat berharga bagi penulisan tesis ini
4. Seluruh Civitas Akademika Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia terutama yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung merampungkan studi dan penulisan tesis ini.
5. Orang tua, paman dan segenap keluarga besar penulis yang telah membantu memberikan dorongan dalam berbagai hal bagi penulis selama proses perkuliahan hingga tahapan penulisan tesis ini.
6. Seluruh sahabat, teman dan rekan yang telah membantu penulis dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung merampungkan studi dan penulisan tesis ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan yang tak terhingga atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirul kata, semoga kelebihan maupun kekurangan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Jakarta, Juni 2009

Penulis

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tubagus Adi Satria Prakasa
NPM : 0606152756
Program Studi : MSP Penanggulangan Kemiskinan
Departemen : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

KAJIAN KEMISKINAN DI TINGKAT KELUARGA PADA MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN PLTP SARULLA, TAPANULI UTARA (SUATU STUDI KASUS PADA BEBERAPA DESA DI DAERAH PANGALUAN)

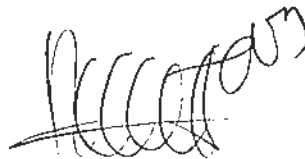
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 8 Juni 2009

Yang Menyatakan



Tubagus Adi Satria Prakasa

ABSTRAK

Nama : Tubagus Adi Satria Prakasa

Program Studi : MPKP

Judul : Kajian Kemiskinan Di Tingkat Keluarga Pada Masyarakat Di Sekitar Kawasan PLTP Sarulla, Tapanuli Utara (Suatu Studi Kasus Pada Beberapa Desa Di Daerah Pangaloan)

Tesis ini mengkaji permasalahan yang terjadi pada masyarakat pedesaan di daerah Pangaloan yang cenderung subsisten. Disatu sisi terdapat SDM dan SDA yang potensial namun peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga tidak terjadi dan proses pembangunan perekonomian pedesaan tidak juga berjalan karena pemanfaatan SDA yang tidak optimal (masyarakat tidak produktif). Pada penelitian kualitatif ini digambarkan kondisi dari sisi kualitas kesejahteraan keluarga setempat saat ini. Ditemukan bahwa penyebab stagnasi pembangunan serta rendahnya produktivitas masyarakat adalah berasal dari internal warganya sendiri, yakni tidak adanya kemauan untuk berubah, hal ini terkait dengan lemahnya modal sosial yang mereka memiliki terutama tidak adanya rasa mutual trust (kemampuan *bridging* lemah). Hal ini menjadi akar masalah terkait masalah-masalah mendasar lainnya. Masalah-masalah tersebut antara lain faktor kesehatan lingkungan, pendidikan dalam keluarga, gender dan lain-lain. Atas dasar pengkajian tersebut kemudian disusun suatu skenario rencana aksi yang dapat digunakan untuk mengentaskan masalah yang terjadi di masyarakat setempat.

Kata Kunci : Pedesaan, subsisten, kesejahteraan keluarga, modal sosial, rencana aksi

ABSTRACT

Name : Tubagus Adi Satria Prakasa

Study Program : MPKP

Title : Household Level Poverty Examination in the Community Around Sarulla Geothermal Power Plan Area, North Tapanuli (A Case Study on Several Villages in Pangaloan Region)

This thesis tried to explore the subsistence problem that happen on the rural community of Pangaloan region. There are excessively potential human resources and natural resources in this region, in contrarily there are no improvement on economic productivity and households welfare quality. This qualitative research tried to describe the present condition on households welfare quality in the region. The research found that the cause of development stagnation are internal matter especially on the willingness of the community to change their habits. This matter related to the weakness of their social capital especially their low mutual trust (lack of bridging capacity). This concern has become the root of other basic problems. It consists: environment health, family education, gender etc. Based on this examination, an action plan scenario were arranged to eradicate the problems on the local community.

Keywords : Rural, subsistence, household welfare, social capital, action plan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Masalah Penelitian	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kerangka Pemikiran	5
1.5. Kegunaan Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian	9
1.7. Ruang Lingkup Penelitian	10
1.8. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian	10
2. KERANGKA TEORITIS	13
2.1. Kemiskinan di Pedesaan	13
2.2. Peran Keluarga dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	16
2.3. Kebudayaan, Modal Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Desa	21
2.3.1. Kebudayaan dan Kemiskinan di Pedesaan	21
2.3.2. Modal Sosial dan Kemiskinan di Pedesaan	22
2.3.3. Keterkaitan Budaya, Modal Sosial dan Kemiskinan di Pedesaan	25
2.4. Beberapa Penelitian-Penelitian Sebelumnya	27
2.4.1. Penelitian Vidhyandika Moeljarto (1997)	27
2.4.2. Penelitian Ester Boserup (1990)	28
2.4.3. Penelitian Amri Marzali (2003)	30
3. SASARAN DAN METODE PENELITIAN	31
3.1. Sasaran Penelitian	31
3.2. Metode Penelitian	31
3.2.1. Pendekatan Kualitatif	32
3.2.1.1. Kegiatan Pra Survey	33
3.2.1.2. Wawancara Mendalam	33
3.2.1.3. Diskusi Kelompok Terfokus	35
3.2.2. <i>Rapid Rural Appraisal</i>	36
3.2.3. Informan	39

3.2.4.	Analisis Data	39
3.2.5.	Reliabilitas dan Validitas	40
3.3.	Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Penelitian	41
4.	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN DAN DINAMIKA YANG TERJADI SAAT INI	43
4.1.	Gambaran Umum	43
4.1.1.	Administrasi Wilayah	43
4.1.2.	Struktur Pemerintahan	43
4.1.3.	Kondisi Geografis Wilayah	44
4.1.4.	Kondisi Sarana dan Prasarana	44
4.1.5.	Kondisi Demografis	46
4.1.5.1.	Kemasyarakatan	47
4.1.5.2.	Agama dan Pendidikan	48
4.1.5.3.	Kesehatan	48
4.1.5.4.	Mata Pencaharian Masyarakat	49
4.1.5.5.	Peran Perempuan	51
4.2.	Sejarah Daerah	52
4.3.	Dinamika Kehidupan Masyarakat Saat Ini	54
4.3.1.	Kesehatan	54
4.3.2.	Pendidikan	55
4.3.3.	Perekonomian Keluarga, Peran Tanah dan Peran Perempuan di Dalamnya	56
4.3.4.	Sumber Daya Alam sebagai Mata Pencaharian dan Keberlanjutannya	57
4.3.5.	Sosial dan Politik	59
4.3.6.	Budaya dan Agama	61
4.3.7.	Dampak Modernisasi dan Culture Shock	63
4.4.	Kelembagaan di Masyarakat	64
4.4.1.	Peran Lembaga Yang Ada di Masyarakat	68
4.4.1.1.	Lembaga Adat	68
4.4.1.2.	Kepala Desa dan Perangkat Desa	68
4.4.1.3.	Gereja	69
4.4.1.4.	Sekolah Dasar dan Guru	69
4.4.1.5.	Puskesmas Pembantu (Pustu)	70
4.4.1.6.	Masyarakat di Rantau	71
4.4.1.7.	Kecamatan, Koramil dan Polsek	72
4.4.1.8.	Pengelola PLTP	73
4.4.1.9.	Kedai Minum	73
4.4.2.	Peran Lembaga Keluarga	73
4.4.3.	Modal Sosial Masyarakat Setempat	77
4.5.	Identifikasi Permasalahan Umum	79
5.	ANALISA SWOT	81
5.1.	Akar Masalah	81
5.2.	Analisa SWOT	83
5.2.1.	<i>Strengths</i>	83

5.2.2.	<i>Weakness</i>	84
5.2.3.	<i>Opportunities</i>	86
5.2.4.	<i>Threats</i>	87
5.2.5.	Kondisi Eksisting dan Potensi Kedepan	88
5.3.	Penentuan Prioritas Masalah dan Alternatif Solusi atas Masalah	90
5.3.1.	Masalah Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	92
5.3.2.	Masalah Pendidikan dalam Keluarga	93
5.3.3.	Subordinasi terhadap Perempuan dalam Keluarga	96
5.3.4.	Masalah Modal Sosial	97
6.	SKENARIO ACTION PLAN	99
6.1.	Bentuk kegiatan Skenario <i>Action Plan</i>	100
6.1.1.	Program Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	101
6.1.2.	Program Pemberdayaan Pendidikan Keluarga	103
6.2.	Tahapan Pelaksanaan Program	106
6.3.	Pengelolaan Program	108
6.4.	Tindak Lanjut Program	108
	DAFTAR REFERENSI	110
	LAMPIRAN	113



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Spektrum Tipologi Modal Sosial	24
Tabel 3.1.	Jadwal Penelitian	42
Tabel 4.1.	Beberapa Sarana dan Prasarana	47
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	49
Tabel 4.3.	Pemanfaatan Lahan untuk Pertanian	46
Tabel 4.4.	Tipologi Modal Sosial Masyarakat Pangaloan	77



DAFTAR GAMBAR

Gbr. 2.1.	Kerangka Pemikiran	6
Gbr. 3.1.	Analisis Data	40
Gbr. 4.1.	Bagan Kelembagaan Masyarakat	65
Gbr. 4.2.	Bagan Peran Kelembagaan Masyarakat Berdasarkan Gender (laki-laki)	66
Gbr. 4.3.	Bagan Peran Kelembagaan Masyarakat Berdasarkan Gender (Perempuan)	67
Gbr. 5.1.	Diagram Tulang Ikan	82
Gbr. 6.1.	Skema Pemberdayaan Keluarga Sejahtera secara Terpadu	101



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Transek	113
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Umum	114
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Khusus Sesuai Peran <i>Stakeholders</i>	115
Lampiran 4. Matriks Identifikasi SWOT	116
Lampiran 5. Dokumentasi Foto	125



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Lingkar Kemiskinan atau perangkap kemiskinan (*Vicious Cycles of Poverty*) adalah hal yang sering menjadi masalah di berbagai negara atau daerah berkembang. Dalam hal ini kemampuan menabung yang rendah menunjukkan income riil yang rendah, dan income riil yang rendah menunjukkan produktivitas yang rendah pula. Hal ini terus menerus terjadi dan akhirnya mengakibatkan kekurangan modal. Kekurangan modal inilah yang menyebabkan tingkat kapasitas tabungan yang kecil. Riil income yang rendah menurut Nurske, merupakan refleksi dari rendahnya produktivitas (Nurske, 1952).

Rendahnya produktivitas inilah yang menjadi dilema di daerah pedesaan dan menyebabkan urbanisasi atau migrasi. Kebijakan pembangunan yang sering mengabaikan sektor pertanian menyebabkan tidak memadainya pertumbuhan pendapatan di daerah pedesaan dan mendorong urbanisasi (Todaro & Stilkind, 1981, dikutip Manning & Effendi (Ed.), 1996). Kehidupan pedesaan akan senantiasa mandek, karena berkurangnya kesempatan kerja di desa dan mendorong penduduk miskin desa pindah ke kota dengan harapan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik.

Hal ini menjadi gambaran penting bagi proses pembangunan desa di Indonesia. Desa di Indonesia memiliki karakteristik pedesaan yang khas terjadi di negara-negara berkembang, dimana ciri tersebut menurut Boeke (dalam Kuncoro, 2003) antara lain adalah menonjolnya sifat komunalisme, originalitas, kegiatan produksi di dalam dan untuk keluarga sendiri, tidak ada pedagang profesional dan produksi serta konsumsi merupakan unit dasar dari keluarga bersama.

Karakteristik masyarakat desa Indonesia yang demikian memang dapat menyebabkan perekonomian tidak berkembang dan berproduktivitas rendah, dan hal inilah yang terjadi di kawasan sekitar PLTP Sarulla, Sumatera Utara. Karakter ini nampak jelas di beberapa desa di kawasan Pahgaloan, Kecamatan Pahae Jae, Tapanuli

Utara, Sumatera Utara. Berdasarkan penelitian salah satu Yayasan di Jakarta, kehidupan perekonomian desa setempat cenderung stagnan, terutama setelah kegiatan sumur geothermal di kawasan tersebut tidak aktif. Perekonomian masyarakat otomatis hanya bergantung pada pemanfaatan hasil sumber daya alam yang tidak memiliki orientasi pasar (tidak produktif). Menurut salah seorang tokoh setempat yang berdomisili di Jakarta, masyarakat yang berpendidikan dari daerah tersebut cenderung memilih untuk pergi merantau.

Untuk itu diperlukan suatu upaya yang dapat digunakan desa tersebut juga desa-desa lainnya di Indonesia agar dapat memotong lingkaran yang cenderung subsisten sehingga dapat mendorong produktivitas dan terjadi proses *income generating*. Proses memotong lingkaran ini sudah dilaksanakan di Indonesia sejak era orde baru. Pada awalnya proses pembangunan yang dilakukan bersifat instruktif dan *top-down*, dan ini hanya membuat masyarakat menjadi objek dari pembangunan karena tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat.

Proses memotong lingkaran tersebut menyamaratakan anggapan mengenai penyebab kemiskinan, padahal kemiskinan sendiri dapat disebabkan bermacam faktor, baik itu faktor ekonomi maupun non ekonomi seperti akses penunjang kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, kultur dan lainnya. Pembangunan pun tanpa disadari menjadi tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya tradisional karena lebih banyak memperhatikan aspek fisik dan ekonomi. Pada saat ini mulai terjadi pergeseran kebijakan pembangunan pedesaan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat partisipatif dan menekankan pada kebutuhan dan peran serta masyarakat secara aktif.

Begitu pula dengan desa-desa di Daerah Pangaloan, kecamatan Pahae jae, tapanuli Utara. Dengan fenomena alam dan kultur yang berbeda dengan daerah lainnya tentu diperlukan suatu pendekatan partisipatif untuk memunculkan kesadaran dan kemauan kolektif untuk membangun desanya. Hal-hal tersebut diatas menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, yaitu dapat mengungkapkan fenomena yang berkembang di masyarakat setempat dan potensi-potensi yang dapat dikembangkan untuk membangun desa secara partisipatif dan dapat memotong perangkat kemiskinan melalui peningkatan produktivitas masyarakat desa.

1.2. Masalah Penelitian

Menurut Todaro (1987), peningkatan produktivitas dapat disebabkan salah satunya oleh peningkatan mutu sumber daya fisik maupun sumber daya manusia. Hal ini berarti proses pembangunan desa tidak hanya dapat berpatokan pada pembangunan perekonomian saja. Menurut Todaro dalam buku yang sama, setidaknya ada 3 proposisi yang menyusun kondisi yang diperlukan dalam proses pembangunan pedesaan yang manusiawi. Pertama, adalah tata guna tanah yang diadaptasi pada peningkatan produksi pangan. Kedua, kebijakan pemerintah yang mendukung dan terakhir, adalah diperlukannya suatu sasaran pembangunan yang terpadu yang meliputi perbaikan taraf hidup (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rumah, dll), penurunan kesenjangan distribusi pendapatan desa-kota, kapasitas sektor pedesaan untuk mandiri dan melaju pertumbuhannya.

Hal yang terakhir tersebut menjadi perhatian dalam penelitian ini, karena dalam proposisi ketiga tersebut masyarakat sendiri yang berperan sebagai subjek pelaku yang berperan penting dalam proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) pedesaan. Berarti hal inilah yang seharusnya mendorong tercapainya kualitas pembangunan manusia yang lebih baik dari dalam diri masyarakat desa itu sendiri yang juga berarti terjadi peningkatan produktivitas bagi pedesaan.

Keluarga sebagai lembaga terkecil di masyarakat, memiliki memiliki peran terbesar menentukan produktivitas masyarakat. Oleh karenanya keluarga menjadi faktor penentu sejauh mana kualitas manusia di dalamnya. Menurut Anderson dan Parker (1964) keluarga merupakan lembaga paling primer dalam masyarakat. Fungsi utamanya mencakup fungsi reproduksi biologis, keberlanjutan ekonomi, pendidikan dan sosialisasi serta transmisi kepemilikan dan budaya.

Yang menjadi masalah adalah proses pembangunan di banyak pedesaan di Indonesia termasuk di daerah Pangaloo cenderung stagnan/subsisten karena kualitas kesejahteraan keluarga rendah, produktivitas yang rendah dan produktivitas perekonomian masyarakat hanya bergantung dari hasil eksploitasi daya alam (SDA) yang ada dan setelah kegiatan itu berakhir, perekonomian akan kembali stagnan karena tidak adanya proses kreatif atau penciptaan nilai tambah.

Di sisi lain, secara SDM di daerah Pangaloran memiliki karakter yang berbeda dengan desa pada umumnya di Indonesia. Rata-rata tingkat pendidikan adalah lulus SMP-SMA, dengan tingkat baca tulis 100%. Hal ini menjadi dilematis mengingat di satu sisi mereka memiliki SDM dan SDA yang potensial namun peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga tidak terjadi sehingga dari sisi non ekonomi terjadi kemiskinan dan begitu pula dari sisi ekonomi, proses pembangunan perekonomian pedesaan tidak juga berjalan karena pemanfaatan SDA yang tidak optimal (masyarakat tidak produktif).

Mengingat permasalahan yang terjadi diatas maka untuk membangun kembali kesejahteraan masyarakat setempat saat ini perlu adanya suatu pendekatan yang berbeda dengan daerah lainnya. Untuk itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu:

- 1) Bagaimana kondisi masyarakat setempat bila dilihat dari sisi kualitas kesejahteraan keluarga?
- 2) Apakah penyebab stagnasi pembangunan dan rendahnya produktivitas masyarakat di daerah setempat?
- 3) Seberapa besar potensi yang dimiliki daerah setempat dari sisi kualitas kesejahteraan keluarga setempat agar dapat mendukung peningkatan kesejahteraan?
- 4) Skenario rencana aksi seperti apa yang direkomendasikan tepat mengatasi permasalahan yang menghambat peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Menggambarkan kondisi masyarakat setempat dari sisi kualitas kesejahteraan keluarga saat ini.
- 2) Mengkaji penyebab stagnasi pembangunan serta rendahnya produktivitas masyarakat.

- 3) mengkaji potensi masyarakat setempat dari sisi kualitas kesejahteraan keluarga yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara partisipatif.
- 4) Menyusun suatu skenario rencana aksi yang tepat untuk direkomendasikan mengatasi permasalahan yang menghambat peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

1.4. Kerangka Pemikiran

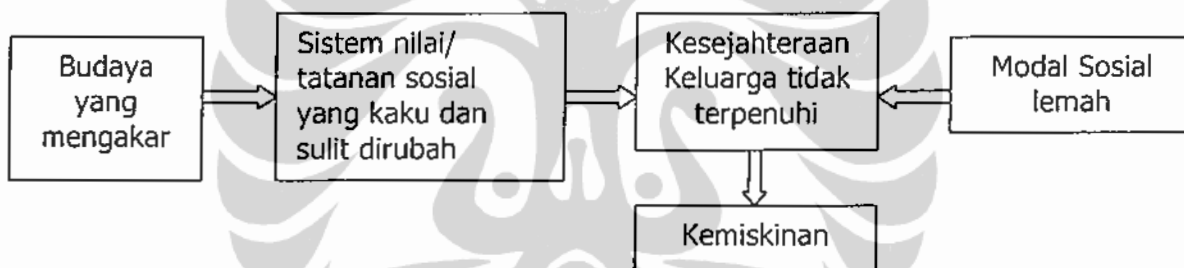
Masalah utama dalam kemiskinan di pedesaan secara agregat adalah rendahnya produktivitas yang disebabkan rendahnya kualitas kesejahteraan manusia. Kesenjangan ini menurut Paul Spicker (2002) dapat disebabkan antara lain oleh karakteristik orang miskin itu sendiri, faktor keturunan, karakteristik lingkungan (budaya) dan faktor perbedaan status dalam struktur masyarakat. Atas dasar itu, Paul Spicker telah mengidentifikasi bahwa salah satu yang dapat menjelaskan penyebab terjadinya kemiskinan adalah penjelasan budaya.

Hal tersebut diatas diperkuat juga oleh pernyataan Oscar Lewis (dalam Hari Susanto, 2006) dimana menurutnya ada dua hal yang menyebabkan kemiskinan, pertama mereka yang mengecilkan kapasitas pribadi akibatnya mereka menjadi miskin dan kedua adalah budaya kemiskinan yaitu suatu cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui garis keturunan keluarga. Oscar Lewis sendiri menyebutkan budaya kemiskinan berkaitan erat dengan struktur kebudayaan, hubungan-hubungan interpersonal, kebiasaan-kebiasaan, sistem nilai dan orientasi terhadap masa depan. Dengan demikian dapat dikatakan budaya memang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kemiskinan.

Dengan melihat pendapat Paul Spicker dan Oscar Lewis diatas maka dapat dikatakan budaya memang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Clifford Geertz pada tahun 1963 di pedesaan Jawa yang dikutip dari Soemitro (1994) dimana ia mengungkapkan bahwa tata susunan sosial budaya yang sangat kokoh dalam masyarakat pedesaan di Jawa bersifat kaku dan sulit untuk dilakukan perubahan terhadapnya. Tata susunan masyarakat atau budaya di

pedesaan Jawa menjurus pada kemiskinan bersama atau *shared poverty*. Hal ini masih lumrah terjadi saat ini dan ini dibenarkan oleh penelitian Amri Marzali di tahun 2003, dimana menurut penelitiannya, Konsep Geertz mengenai *shared Poverty* yang memang sudah berakar dalam masyarakat pertanian-pedesaan Jawa tidak mudah terkikis begitu saja oleh prinsip komersil yang terjadi saat ini.

Bila dikaitkan dengan modal sosial. Hasbullah (2006) mengungkapkan bahwa modal sosial di masyarakat tradisional pada umumnya ada namun lemah dan hanya memiliki dimensi internalitas (*bonding*) yang malah merantai masyarakat. Mereka memiliki kohesifitas yang relatif kuat namun terbatas pada ritual agama dan adat tetapi tidak memiliki energi perubahan karena lemahnya topangan nilai-nilai dan norma yang selaras dengan tuntutan modernitas.



Gbr. 1.1. Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan peranan keluarga, menurut Anderson dan Parker (1964), keluarga merupakan institusi paling utama dari masyarakat. Fungsi utamanya meliputi reproduksi biologis, kesinambungan ekonomi, sosialisasi, pendidikan, transmisi kepemilikan dan budaya. Fungsi kesinambungan ekonomi berarti menjaga kesinambungan hidup tiap-tiap anggota keluarga.

Di negara dunia ketiga pada umumnya, menurut Ester Boserup (1990) keluarga di pedesaan disusun dalam suatu *autocratic age-sex hierarchies*. Keluarga yang lebih muda harus menunjukkan kepatuhan terhadap pihak yang lebih tua, dan pihak yang tertua merupakan pengambil keputusan dalam keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki

dan perempuan dapat mengatur tenaga kerja dari anggota keluarga yang lebih muda dari jenis kelamin yang sama sesuai dengan kebiasaan pembagian kerja pada umumnya.

Tetapi ketika dibutuhkan perubahan dalam pendistribusian tenaga kerja dalam keluarga (akibat perubahan metode produksi atau ketersediaan sumberdaya misalnya) maka pemimpin keluarga yang menentukan. Dengan semakin banyak menugaskan pekerjaan pada perempuan dan keluarga yang lebih muda maka pemimpin keluarga akan semakin mudah meningkatkan pendapatan keluarga sementara ia dapat mengurangi beban kerjanya sendiri.

Yang menarik disini adalah faktor gender dalam keluarga tradisional, dimana posisi perempuan dalam keluarga (menurut Engels dan Eleanor Leacock, dikutip dalam Vidhyandika Moeljarto, 1997) biasanya sebagai subordinat terutama berkaitan dengan pemilikan serta kontrol terhadap sumber daya. Hal ini pulalah yang dikatakan oleh Anderson dan Parker (1964) dimana pria lebih berperan sebagai *Bread-winner* dan perempuan biasanya berperan sebagai *housekeeper* dalam keluarga. Begitu pula menurut Agassi, (1991, dikutip dari Daulay, 2001) bahwa keseimbangan status perempuan dalam rumah tangga baru bisa diperoleh jika ada kekuatan yang sama antara suami dan istri dalam bidang ekonomi dan kontrol terhadap sumber-sumber yang vital. Selain itu berbicara mengenai pengambilan keputusan dalam keluarga tidak terlepas dari masalah patriarki yang menggambarkan dominasi pria atas perempuan dan anak-anak dan ini berlanjut kepada dominasi pria dalam semua lingkup kemasyarakatan lainnya.

Untuk mengembangkan keluarga bermutu terdapat nilai-nilai normatif yang dijadikan indikator pemenuhan. Nilai-nilai tersebut telah ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan PP nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang mencakup fungsi-fungsi dasar keluarga yakni: fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi atau wirausaha dan fungsi pembinaan lingkungan.

Terpenuhinya fungsi-fungsi tersebut menjadi penting adanya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan produktivitas keluarga. Produktivitas keluarga berkaitan

erat dengan kualitas sumber daya manusia terutama kesehatan. Bloom dan Canning (2000) terdapat mengidentifikasi empat mekanisme yang menghubungkan keterikatan yang kuat antara kesehatan dan pendapatan. antara lain: Produktivitas, pendidikan, investasi modal fisik dan dividen demografis. Lanjut Bloom dan Canning. Populasi yang sehat cenderung akan lebih produktif. Hal ini karena secara fisik dan mental pekerja akan lebih kuat. Jam kerja mereka pun menjadi lebih banyak dan tidak terbuang karena sakit atau merawat keluarga yang sakit karena frekuensi sakit akan lebih sedikit. Begitu pula pendidikan memiliki keterkaitan dengan produktivitas dan juga kesehatan. Menurut mereka, pendidikan mendorong produktivitas yang lebih besar dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Dan kesehatan menstimulasi kemajuan pendidikan di masyarakat, dimana masyarakat yang diperkirakan akan hidup lebih panjang, memiliki insentif yang lebih besar untuk berinvestasi pada pendidikan. Hal-hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan fungsi-fungsi keluarga dalam mendorong produktivitas dan mengeluarkan masyarakat dari perangkap kemiskinan.

Atas dasar kerangka pemikiran tersebut diatas maka secara singkat dapat dikatakan bahwa budaya atau kebiasaan yang sudah mengakar di masyarakat pedesaan cenderung sulit untuk dirubah. ini ditunjukkan oleh pola kelembagaan keluarganya yang cenderung sangat tradisional. Sementara disisi lain modal sosial masyarakat setempat menunjukkan *bonding* yang sangat kuat namun kemampuannya untuk *bridging* sangat rendah Pada akhirnya hal-hal tersebut berdampak pada sulitnya memperbaiki kualitas kesejahteraan keluarga sehingga hal ini berdampak pada sulitnya mengatasi kemiskinan di pedesaan setempat.

1.5. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat sebagai salah satu masukan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat setempat kedepannya. Bagi penulis sendiri penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai keterkaitan yang erat antara ilmu ekonomi dan masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat serta memperluas pola pikir penulis dalam melihat realita permasalahan dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar yang berguna untuk melakukan upaya-upaya perbaikan kesejahteraan dan pemberdayaan di masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mencapai hasil yang optimal.

1.6. Metode Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif memahami suatu situasi sosial, masyarakat di lokasi penelitian melalui proses investigasi dimana peneliti secara bertahap berusaha memahami gejala-gejala sosial dengan membedakan, membandingkan, mengkatalogkan, dan mengelompokkan obyek studi. Peneliti memperolehnya dengan memasuki dunia informan dan melakukan interaksi dengan informan, dan mencari sudut pandang informan. Namun demikian, penelitian ini tetap menggunakan data kuantitatif, untuk memberikan gambaran umum daerah penelitian.

Dalam pendekatan kualitatif tersebut, peneliti menggunakan *Rapid Rural Appraisal* (RRA) sebagai metode yang cenderung fleksibel dan lengkap untuk memperoleh data namun tidak memakan waktu lama. RRA biasanya digambarkan sebagai aktivitas semi terstruktur di lapangan dengan pendekatan tim secara multidisipliner dan didisain untuk memperoleh informasi baru dan memformulasikan suatu hipotesis mengenai kehidupan pedesaan dengan karakteristik utama yakni pendekatan multidisipliner.

Beberapa prinsip dasar RRA antara lain mempelajari hal secara cepat dan progresif dengan penggunaan metode yang fleksibel, upaya oportunistis, improvisasi dan iterasi, tidak dengan mengikutsertakan suatu cetak biru program tetapi lebih beradaptasi dalam proses pembelajaran di lokasi. Prinsipnya adalah belajar dari dan dengan masyarakat desa secara langsung tatap muka. Triangulasi, atau menggunakan lebih dari satu teknik untuk melakukan silang. Kemudian penelitian harus optimal, hal ini terkait dengan biaya, dimana peneliti tidak mencari lebih dari yang diperlukan dan tidak mencoba mengukur lebih dari yang diperlukan untuk tujuan praktis. Terakhir, *critical self-awareness*, merefleksi apa yang sudah dilihat dan apa yang belum dilihat, siapa yang sudah ditemui

dan siapa yang belum, apa saja yang sudah dikatakan dan apa yang belum dan sumber-sumber kesalahan.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian dalam ruang lingkup hal-hal yang terkait dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan non ekonomi terutama terkait masalah pemenuhan kualitas kesejahteraan keluarga di kawasan Pangaloan, Kecamatan Pahae-Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara sepanjang medio Maret 2008.

1.8. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menyusun sistematika penulisan laporan sebagai berikut:

- **Bab 1. Pendahuluan**

Terdiri atas latar belakang, uraian masalah sehingga timbul pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, runtutan kerangka pemikiran, kegunaan dilakukannya penelitian ini, ruang lingkungnya, sistematika penulisan yang disusun, serta uraian singkat mengenai metode penelitian yang dilakukan.

- **Bab 2. Kerangka Teoritis**

Pada bab 2, penulis menguraikan kerangka teoritis yang membangun pola pikir penulis untuk menjadi dasar penulisan ilmiah ini. Uraian awal adalah mengenai konsep kemiskinan terutama di kawasan pedesaan, kemudian selanjutnya diuraikan mengenai pentingnya peran keluarga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. lalu diuraikan pula peran kebudayaan dan modal sosial dalam membentuk kesejahteraan masyarakat di pedesaan serta kaitannya dengan munculnya kemiskinan di pedesaan. Diakhir bab 2 ini diuraikan pula beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait kemiskinan di pedesaan.

- **Bab 3. Sasaran dan Metode Penelitian**

Pada bab 3 diuraikan mengenai sasaran dan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini secara terperinci. Dalam metode penelitian, penulis menguraikan secara jelas mengenai upaya pendekatan kualitatif yang digunakan juga mengenai metode *Rapid Rural Appraisal* yang digunakan oleh penulis. Penulis juga menguraikan tahapan analisis data yang dilakukan, serta lokasi dan jadwal penelitian.

- **Bab 4. Gambaran Umum Daerah Penelitian dan Dinamika yang Terjadi Saat Ini**

Pada bab 4, penulis menguraikan secara mendalam gambaran daerah penelitian serta dinamika yang berkembang. Selain memberikan gambaran secara umum mengenai kondisi wilayah, infrastruktur maupun demografis, penulis juga memberikan gambaran mengenai sejarah desa. Dalam uraian mengenai dinamika kehidupan masyarakat saat ini, penulis menguraikan mengenai berbagai kondisi aktual yang terjadi didalam masyarakat terutama berbagai masalah dan isu yang berkembang saat ini di masyarakat. Kemudian penulis juga menggambarkan kondisi kelembagaan yang ada di masyarakat. Diakhir bab, penulis juga menguraikan mengenai peran lembaga keluarga dan kondisi modal sosial masyarakat setempat.

- **Bab 5. Identifikasi Permasalahan dan Analisa SWOT**

Pada bab 5, penulis mengidentifikasi permasalahan yang telah diuraikan dalam bab 4, kemudian disusun kedalam suatu diagram tulang ikan untuk mencari akar masalah yang terjadi. Penulis juga kemudian menganalisa permasalahan tersebut melalui analisa SWOT. Diakhir bab, penulis menganalisa kondisi eksisting masyarakat setempat dan potensi kedepannya.

- **Bab 6. Kesimpulan dan Rekomendasi : Skenario *Action Plan***

Pada bab 6. penulis merampungkan analisa kedalam suatu kesimpulan penulisan kemudian menyusun suatu rekomendasi. Rekomendasi disusun dalam bentuk suatu skenario *action plan* yang bersifat sementara dan diharapkan dapat ditawarkan kepada masyarakat secara partisipatif melalui suatu pendekatan partisipatoris.



BAB 2 KERANGKA TEORITIS

2.1. Kemiskinan di Pedesaan

Dewasa ini, pencapaian pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat sempit dari sudut pandang perolehan pendapatan domestik bruto (PDB) saja tetapi juga meluas pada makna kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. *United Nations Development Programme* (UNDP) sejak 1990 telah mendefinisikan kesejahteraan secara lebih dari sekadar PDB, yakni melalui ukuran gabungan dari pencapaian tiga dimensi utama pembangunan manusia antara lain panjang umur dan menjalani hidup sehat (kesehatan), terdidik (pendidikan) dan memiliki standar hidup yang layak (pendapatan). Begitu pula sebaliknya dengan kemiskinan, banyak literatur yang berusaha menjelaskan beragam definisi dan penyebab kemiskinan, namun seluruhnya selalu mengkaitkan dengan masalah kualitas sumber daya manusia terutama dengan faktor non ekonomi yakni pendidikan dan kesehatan.

Amartya Sen, seperti dikutip dari Bloom dan Canning (2001) mengatakan bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan. Maka dapat dikatakan agar manusia dapat lebih produktif, ia tidak hanya membutuhkan pendapatan semata tetapi juga ketersediaan akses kesehatan dan pendidikan. Dalam hal ini, Bloom dan Canning memberikan penegasan yang mendetail mengenai pendapat Amartya Sen sebelumnya. Pendapat mereka menunjukkan bahwa kualitas modal sumber daya manusia berperan penting dalam menyebabkan kemiskinan.

Sejalan dengan itu, Ansell M. Sharp, dkk (2000) mencoba mengidentifikasi tiga hal penyebab kemiskinan secara lebih luas, antara lain:

1. Secara mikro, muncul karena ketidaksamaan dalam pola kepemilikan sumber daya.

2. Muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.
3. Muncul akibat perbedaan akses dalam memperoleh modal.

Ketiga pendapat diatas telah menggambarkan betapa kompleksnya masalah yang perlu diperhatikan dalam mengukur kemiskinan. Untuk menangkap kompleksitas tersebut UNDP membuat dua indeks kemiskinan (*human poverty index*) yang mengkompositkan bermacam indikator yang dapat mewakili ukuran-ukuran dalam kemiskinan. Terdapat dua ukuran berbeda dalam menghitungnya, dimana negara berkembang diperhitungkan tiga aspek pembangunan manusia yakni kelangsungan hidup, pengetahuan, dan standar hidup. Sementara pada negara maju, hal tersebut ditambah dengan tingkat *social exclusion*, atau seberapa jauh manusia dari kehidupannya sosialnya.

Pada negara berkembang, tingkat kelangsungan hidup dihitung pada probabilitas manusia untuk bertahan hingga usia 40; tingkat pengetahuan dihitung dari tingkat kemampuan baca tulis, dan perhitungan standar hidup dihitung atas dua variabel, yakni akses menuju sumber air bersih, dan persentase kekurangan dalam berat dan ukuran badan anak balita. Dengan demikian memang pada umumnya standar pencapaian kesejahteraan atau pengentasan kemiskinan setidaknya ditentukan oleh faktor kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Selain ukuran-ukuran tersebut diatas, perlu diperhatikan munculnya gejala kesenjangan secara geografis yang muncul di antara masyarakat desa dan kota sehingga melahirkan kemiskinan yang berbeda. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kemiskinan. Bila mensintesis konsep kemiskinan diatas dengan konsep dualisme pembangunan desa-kota, berarti kurangnya kualitas kesejahteraan telah menyebabkan produktivitas yang berbeda antara desa yang cenderung tradisional dan subsisten dan kota yang modern.

Masih rendahnya produktivitas di pedesaan inilah yang menjadi dilema dan menyebabkan urbanisasi atau migrasi dan meningkatkan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Kebijakan pembangunan yang sering mengabaikan sektor pertanian menyebabkan tidak memadainya pertumbuhan pendapatan di daerah pedesaan dan mendorong urbanisasi (Todaro & Stilkind, 1981, dikutip Manning & Effendi (Ed.), 1996). Kehidupan pedesaan akan senantiasa mandek, karena berkurangnya kesempatan kerja di

desa dan mendorong penduduk miskin di desa pindah ke kota dengan harapan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik padahal keberadaan mereka di kota pun meningkatkan tingkat kemiskinan di perkotaan.

Perekonomian yang subsisten memang menjadi suatu karakteristik khusus bagi kemiskinan di pedesaan. Menurut Kenneth Galbraith (1979) sebagaimana dikutip dari Rintuh (2005), kemiskinan pedesaan tidak terelakkan. Di pedesaan, sudah sejak lama warga hidup hanya di seputar garis minimum untuk sekadar bertahan hidup, keadaannya selalu demikian dan terus menerus berlangsung sehingga mereka hidup dalam suatu ekuilibrium kemiskinan. Hanya sedikit hal yang dapat memungkinkan mereka untuk hidup diatas garis minimum, keadaan itupun tidak dapat terlepas dari kondisi tertentu yang akan mengembalikan mereka nyaris kepada kondisi semula. Perbaikan penghasilan bukanlah suatu hal yang lazim terjadi di pedesaan.

Menurut Yulaswati, kemiskinan dapat diukur dari dua sisi: pertama, berdasarkan ukuran ekonomi (umumnya dihitung dari konsumsi pangan dan non-pangan):

- Indikator internasional: PPP USD1/hari/orang.
- Indikator nasional (2006): garis kemiskinan Rp. 152.847/bulan/orang setara PPP USD1.55/hari/orang.

Kedua, berdasarkan ukuran non-ekonomi:

- Rendahnya akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, sanitasi dasar, dan sebagainya.
- Rendahnya kapasitas dan produktivitas usaha serta keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pendanaan.
- Lemahnya kelembagaan, pengarusutamaan gender, informasi, dan sebagainya.
- Tidak adanya rasa aman, hak berbicara, dan lain-lain.

Dalam mengkaji penyebab-penyebab kemiskinan, Paul Spicker (2002) memberikan gambaran mengenai penyebab kemiskinan. Ia membagi penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam empat mazhab, antara lain:

1. *Individual explanation*, diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri: malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebagainya.
2. *Familial explanation*, akibat faktor keturunan, dimana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan.
3. *Subcultural explanation*, akibat karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat.
4. *Structural explanations*, menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan pembedaan status atau hak.

Pendapat ini memberikan gambaran berbeda bagi peneliti dalam menjelaskan penyebab kemiskinan dan alasan mengapa suatu komunitas dianggap miskin meskipun secara fisik dan materi mereka tidak memiliki masalah dengan itu. Hal ini terutama terkait dengan penyebab subsistensi kehidupan di pedesaan.

2.2. Peran Keluarga dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Anderson dan Parker (1964) menguraikan bahwa kelembagaan adalah kelas dalam struktur hubungan manusia yang membutuhkan kehadiran instrumen atau alat-alat prosedur. Proses pembuatan prosedur atau pembuatan regulasi tersebut disebut dengan pelembagaan, sehingga lembaga sendiri mencakup berbagai hal normatif yang menyangkut aspek-aspek utama dalam aktivitas suatu masyarakat.

Masyarakat sendiri membangun banyak lembaga maupun sublembaga didalamnya. Lembaga masyarakat mencakup beberapa bentuk dasar : pernikahan, keluarga, pendidikan pemerintah maupun ekonomi. Lembaga-lembaga tersebut seperti sekolah, keluarga, agama dibangun sebagai alat-alat untuk memfungsikan prosedur dari bermacam hal-hal yang normatif.

Secara lebih luas, menurut Scott (2001), lembaga terdiri atas elemen kultur-kognitif, normatif serta regulatif yang secara bersamaan dihubungkan dengan aktivitas dan sumberdaya memberikan makna serta stabilitas bagi kehidupan sosial. Ketiga pilar tersebut merupakan bahan utama dari suatu lembaga dimana sistem regulatif merupakan

peraturan-peraturan, sistem normatif merupakan sistem moral dan sistem kultur-kognitif menunjukkan kepercayaan budaya.

Jika konsep kelembagaan tersebut diasumsikan sebagai keluarga maka keluarga menjadi fondasi penting dalam masyarakat. Menurut Anderson dan Parker (1964) keluarga merupakan institusi primer dalam masyarakat. Fungsi utamanya mencakup fungsi reproduksi biologis, keberlanjutan ekonomi, pendidikan dan sosialisasi serta transmisi kepemilikan dan budaya. Walaupun fungsi dan bentuk tersebut telah berubah dari tahun ke tahun namun stabilitas keluarga tetap menjadi perhatian utama dalam masyarakat.

Memperkuat pernyataan tersebut, menurut William J Goode (1991) keluarga merupakan lembaga yang khas, hal ini dikarenakan keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial disamping agama yang secara resmi berkembang di semua masyarakat. Menurutnya, tugas-tugas kekeluargaan merupakan tanggung jawab langsung setiap pribadi dalam masyarakat, dengan satu atau dua pengecualian, hampir setiap orang dilahirkan dalam keluarga akan membentuk keluarganya sendiri.

Atas dasar itu, konsep kelembagaan dalam keluarga menjadi hal penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia, hal ini karena institusi keluarga berperan membangun sikap perilaku individu yang berada dibawahnya serta berperan dalam membangun norma dalam komunitas yang berada diatasnya yakni masyarakat. Menurut Amartya Sen (1990), hubungan keluarga, serupa dengan lembaga-lembaga sosial lainnya, meliputi kombinasi kecocokan dan konflik. Manfaat yang nyata bertambah bagi semua pihak sebagai hasil dari ketetapan keluarga, tetapi wujud dari pembagian kerja dan kesanggupan menentukan distribusi yang spesifik mengenai keuntungan-keuntungan yang diperoleh serta menentukan pola-pola tertentu dari ketidakadilan.

Peter McDonald mengungkapkan bahwa berdasarkan berbagai sumber selama abad 20, perempuan yang lembaga hidupnya berada dalam orientasi keluarga (*family-oriented institutions*) cenderung mengalami fertilitas yang tinggi serta kesetaraan gender yang buruk. Lupin Rahman dan Rao (2004) mengungkap bahwa keuntungan dari bias pertumbuhan ekonomi terhadap pria memberikan dampak yang negatif bagi peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Mereka juga mengungkap bahwa

terdapat bukti bahwa kekayaan rumahtangga sebenarnya mengurangi peran perempuan dalam pengambilan keputusan rumahtangga.

Posisi perempuan dalam keluarga menurut Engels dan Eleanor Leacock (dikutip dari Vidhyandika Moeljarto, 1997) yang biasanya sebagai subordinat adalah berkaitan dengan kepemilikan serta kontrol terhadap sumber daya. Hal ini pulalah yang dikatakan oleh Anderson dan Parker (1964) dimana pria lebih berperan sebagai *Bread-winner* dan perempuan biasanya berperan sebagai *housekeeper* dalam keluarga. Begitu pula menurut Agassi (1991) yang dikutip dari Daulay (2001) bahwa keseimbangan status perempuan dalam rumah tangga baru bisa diperoleh jika ada kekuatan yang sama antara suami dan istri dalam bidang ekonomi dan kontrol terhadap sumber-sumber yang vital.

Sementara itu menurut Harmona Daulay dalam buku yang sama, berbicara mengenai pengambilan keputusan dalam keluarga tidak terlepas dari masalah patriarki yang menggambarkan dominasi pria atas perempuan dan anak-anak dan ini berlanjut kepada dominasi pria dalam semua lingkup kemasyarakatan lainnya. Di negara dunia ketiga pada umumnya, menurut Ester Boserup (1990) keluarga di pedesaan disusun dalam suatu *autocratic age-sex hierarchies*. Keluarga yang lebih muda harus menunjukkan kepatuhan terhadap pihak yang lebih tua, dan pihak yang tertua merupakan pengambil keputusan dalam keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan dapat mengatur tenaga kerja dari anggota keluarga yang lebih muda dari jenis kelamin yang sama sesuai dengan kebiasaan pembagian kerja pada umumnya. Tetapi ketika dibutuhkan perubahan dalam pendistribusian tenaga kerja dalam keluarga (akibat perubahan metode produksi atau ketersediaan sumberdaya misalnya) maka pemimpin keluargalah yang menentukan. Dengan semakin banyak menugaskan pekerjaan pada perempuan dan keluarga yang lebih muda maka pemimpin keluarga semakin mudah meningkatkan pendapatan keluarga sementara ia dapat mengurangi beban kerjanya sendiri.

Menurut Boserup dalam sumber yang sama, dari segi budaya ataupun perjanjian pernikahan ditetapkan bahwa perempuan harus melakukan pekerjaan yang dibutuhkan untuk melayani anggota keluarga laki-laki dan anak-anak. Kewajiban ini ternyata tidak hanya merawat anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga saja, tetapi juga membawa

air, mengumpulkan bahan bakar, mengurus ternak atau hewan piaraan dan mengolah hasil panen. Di kebanyakan masyarakat pedesaan perempuan diharuskan untuk membantu bekerja di ladang dan di masyarakat tertentu perempuan dan anak-anak bahkan melakukan hampir seluruh pekerjaan tani.

Kehamilan yang sering serta diperpanjang dengan masa menyusui membebani kesehatan perempuan. Jika seorang perempuan menikah muda dan menghabiskan seluruh waktunya antara pubertas dan menopause dengan kehamilan dan menyusui, dan jika pula ia harus bekerja keras pada tugas-tugas berganda dalam rumah tangga dan di ladang, tekanan terhadap kesehatannya sangatlah berat.

Ketidaksehatan dan kematian ibu dan anak serta frekuensi aborsi tak terencana disebabkan atau diakibatkan oleh contoh perawatan anak disertai bekerja seperti diatas. Dengan demikian sebuah konflik muncul antara kepentingan keluarga dalam banyaknya jumlah anak yang harus bertahan hidup dan kepentingan pemimpin keluarga untuk memperoleh tenaga bekerja sebanyak mungkin dari perempuan dewasa.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa peran suatu lembaga keluarga sangatlah kompleks dan amat menyangkut kualitas manusia didalamnya. Hal ini membuat keluarga sebagai suatu lembaga menjadi teramat penting dalam upaya meningkatkan produktivitas manusia didalamnya sehingga berujung pada peningkatan kesejahteraan di dalam masyarakat.

Untuk mengembangkan nilai-nilai keluarga sejahtera yang bermutu terdapat nilai-nilai normatif yang telah dijadikan indikator pemenuhan. Nilai-nilai tersebut telah ditetapkan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan PP nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang mencakup fungsi-fungsi dasar keluarga yakni: fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi atau wirausaha dan fungsi pembinaan lingkungan.

Pemenuhan indikator-indikator fungsi dasar keluarga diatas merupakan hal yang akan menunjang tercapainya kualitas manusia yang lebih baik. Tercapainya kualitas manusia yang lebih baik merupakan kunci agar produktivitas meningkat dan akhirnya peningkatan

produktivitas tersebut akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sejalan dengan itu, Amartya Sen, seperti dikutip dari Bloom dan Canning (2001) mengatakan bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan. Kedua hal inilah yang fungsi pemenuhannya disediakan oleh lembaga keluarga.

Pemenuhan fungsi keluarga dalam ini berkaitan erat peran keluarga dalam menyediakan pemenuhan kualitas hidup manusia terutama kesehatan dan pendidikan. Bloom dan Canning (2000) terdapat mengidentifikasi empat mekanisme yang menghubungkan keterikatan yang kuat antara kesehatan dan ekonomi, antara lain: Produktivitas, pendidikan, investasi modal fisik dan dividen demografis. Lanjut Bloom dan Canning, Populasi yang sehat cenderung akan lebih produktif. Hal ini karena secara fisik dan mental pekerja akan lebih kuat. Jamkerja mereka pun menjadi lebih banyak dan tidak terbuang karena sakit atau merawat keluarga yang sakit karena frekuensi sakit akan lebih sedikit.

Begitu pula pendidikan memiliki keterkaitan dengan produktivitas dan juga kesehatan. Menurut mereka, pendidikan mendorong produktivitas yang lebih besar dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Dan kesehatan menstimulasi kemajuan pendidikan di masyarakat, dimana masyarakat yang diperkirakan akan hidup lebih panjang, memiliki insentif yang lebih besar untuk berinvestasi pada pendidikan.

Hal-hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dalam memenuhi fungsi pemenuhan kualitas hidup manusia terutama dalam mendorong produktivitas dan mengeluarkan masyarakat dari perangkap kemiskinan.

2.3. Kebudayaan, Modal Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

2.3.1. Kebudayaan dan Kemiskinan di Pedesaan

Menurut Ember dan Ember (1980), istilah kebudayaan umumnya mencakup cara berpikir dan cara berperilaku yang telah merupakan ciri khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu. Sehubungan dengan itu maka unsur-unsur kebudayaan terdiri dari bahasa, ilmu pengetahuan, hukum-hukum, kepercayaan, agama, kegemaran makanan tertentu, musik, kebiasaan pekerjaan, larangan-larangan dan sebagainya.

Sementara itu, menurut Cotgrove (1978), budaya dalam masyarakat merupakan suatu norma, nilai dan kepercayaan bersama yang dianut masyarakat dalam suatu sistem sosial. Hal ini dikarenakan perilaku aktor dalam suatu sistem sosial akan diarahkan pada pencarian suatu nilai akhir atau tujuan. Nilai dan norma bersama anggota suatu sistem sosial merupakan aspek penting dalam masyarakat sehingga nilai, norma dan kepercayaan bersama dapat dianggap sebagai budaya dalam masyarakat.

Bila mengkaitkan penjelasan diatas dengan penjelasan mengenai konsep kemiskinan pada subbab sebelumnya dimana Paul Spicker (2002), telah mengidentifikasi bahwa salah satu yang dapat menjelaskan penyebab terjadinya kemiskinan adalah penjelasan budaya maka Hal-hal tersebut ternyata amat berkaitan sebagaimana pernyataan Oscar Lewis (dikutip dari Hari Susanto, 2006), dua hal yang menyebabkan kemiskinan, pertama mereka yang mengecilkan kapasitas pribadi akibatnya mereka menjadi miskin dan kedua adalah budaya kemiskinan yaitu suatu cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui garis keturunan keluarga. Oscar Lewis sendiri menyebutkan budaya kemiskinan berkaitan erat dengan struktur kebudayaan, hubungan-hubungan interpersonal, kebiasaan-kebiasaan, sistem nilai dan orientasi terhadap masa depan. Dengan demikian dapat dikatakan budaya memang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kemiskinan.

Hal diatas juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Clifford Geertz pada tahun 1963 di pedesaan Jawa (dikutip dari Soemitro, 1994) dimana ia mengungkapkan bahwa tata susunan sosial budaya yang sangat kokoh dalam masyarakat pedesaan di Jawa bersifat kaku dan sulit untuk dilakukan perubahan terhadapnya. Tata susunan masyarakat atau budaya di pedesaan Jawa menjurus pada kemiskinan bersama atau *shared poverty*.

Hal yang diungkapkan Geertz diatas masih lumrah terjadi saat ini dan ini dibenarkan oleh penelitian Amri Marzali di tahun 2003, dimana menurut penelitiannya, Konsep Geertz mengenai *shared Poverty* yang memang sudah berakar dalam masyarakat pertanian-pedesaan Jawa dan tidak mudah terkikis begitu saja oleh prinsip komersil yang mulai terjadi saat ini.

Dengan demikian sebagaimana definisi kebudayaan menurut Cotgrove (1978) diatas dimana kebudayaan merupakan cara berpikir dan cara berperilaku yang telah merupakan ciri khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu, dapat dikatakan bahwa faktor budaya menjadi salah satu pemicu kurangnya kualitas kesejahteraan karena adanya kesenjangan dalam hal produktivitas antara pedesaan (yang cenderung subsisten) dengan kota (yang cenderung lebih produktif) sehingga akhirnya menjadi pendorong meningkatnya kemiskinan di pedesaan hingga saat ini. Oleh karenanya untuk keluar dari ekonomi yang subsisten tersebut, seperti yang dikatakan oleh Rintuh (2005), diperlukan suatu kebijaksanaan pembangunan pedesaan khusus yang diutamakan pada penyiapan penduduk untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Upaya pembangunan yang khusus sesuai budaya setempat pada dasarnya untuk mendorong dan memperlancar proses transisi dari kehidupan subsisten menjadi kehidupan pasar.

2.3.2. Modal Sosial dan Kemiskinan di Pedesaan

Menurut Green dan Haines (2002) dalam membangun masyarakat diperlukan suatu modal komunitas atau modal masyarakat. Modal komunitas ini setidaknya terbangun atas lima modal, antara lain: modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal keuangan dan modal lingkungan. Menurut keduanya, konsep modal sosial sudah diaplikasikan dalam berbagai isu di masyarakat. Secara umum pentingnya modal sosial adalah untuk mempermudah penyelesaian masalah-masalah yang bersifat umum yang selama ini sulit untuk dipecahkan oleh tindakan individu sehingga menurut keduanya modal sosial adalah titik sentral untuk membangun bentuk-bentuk modal komunitas lainnya. Oleh karenanya dalam konteks penelitian ini, modal sosial yang menjadi salah satu hal yang harus

diperhatikan mengingat peran sentralnya dalam membentuk modal komunitas di masyarakat.

Selain itu konsep modal sosial ini menjadi penting untuk dibahas karena dalam konteks pembangunan ada keharusan untuk memasukkan dimensi kultural dalam berbagai upaya yang dilakukan serta mengidentifikasi rintangan-rintangan sosial dalam mengembangkan institusi kemasyarakatan maupun kelembagaan organisasi yang modern (Fukuyama, 2002, sebagaimana dikutip dari J Hasbullah, 2006).

Modal sosial menurut Rachbini (2008) merupakan entitas sosial yang berperan seperti modal yang secara terus-menerus dapat mengembangkan kelembagaan, sistem dan struktur masyarakat. Pengertian modal sosial dapat dipahami sebagai jaringan relasi sosial yang ditunjukkan oleh norma-norma kepercayaan dan resiprositas yang hasilnya mengarah manfaat bersama (*mutual benefit*).

Menurut J. Hasbullah (2006), terdapat dua pola interelasi utama dalam modal sosial, yakni pola *Bonding* (mengikat) dan *bridging* (menjembatani). Menurut Rachbini (2008), kombinasi kedua pola interelasi secara kuat ini akan menghasilkan masyarakat yang melakukan perubahan dari dalam secara dinamis.

Untuk mengidentifikasi pola modal sosial masyarakat digunakan spektrum ciri-ciri pengelompokan modal sosial. Menurut J. Hasbullah pada buku yang sama, pengelompokan *Bonding* bercirikan masyarakat yang: terikat (jaringan eksklusif), pembedaan yang kuat antara orang dalam dan luar, hanya ada satu alternatif jawaban, sulit menerima arus perubahan, kurang akomodatif terhadap pihak luar, mengutamakan kepentingan kelompok dan mengutamakan solidaritas kelompok.

Sementara pengelompokan *Bridging* bercirikan masyarakat yang: terbuka, memiliki jaringan yang lebih fleksibel, toleran, memungkinkan untuk banyak alternatif jawaban dan penyelesaian masalah, akomodatif untuk menerima perubahan, cenderung memiliki sikap yang altruistik, humanitarian dan universal.

Tabel 2.1. Spektrum Tipologi Modal Sosial

Modal Sosial: <i>Bonding</i> dan <i>Bridging</i>	
<i>Bonding</i>	<i>Bridging</i>
Terikat/ketat, jaringan yang eksklusif Perbedaan yang kuat antara "orang kami" dan orang luar Hanya ada satu alternatif jawaban Sulit menerima arus perubahan Kurang akomodatif terhadap pihak luar Mengutamakan kepentingan kelompok Mengutamakan solidaritas kelompok	Terbuka Memiliki jaringan yang lebih fleksibel Toleran memungkinkan untuk memiliki banyak alternatif jawaban dan penyelesaian masalah Akomodatif untuk menerima perubahan Cenderung memiliki sikap altruistik, humanitarianistik dan universal

Sumber: Hasbullah, Jousairi (2006). *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*.

Menurut Rachbini (2008), kombinasi kedua pengelompokan modal sosial tersebut bila berjalan optimal mendorong modal sosial masyarakat berkembang dengan baik. Lanjutnya, ada empat kemungkinan kombinasi yang terjadi di masyarakat.

Pertama, bila *bonding* dan *bridging* lemah, maka kelompok masyarakat tidak memiliki modal sosial dan tidak ideal untuk bisa maju dan berkembang karena tidak memiliki solidaritas kelompok dan tidak mampu membuka diri bagi kemajuan ke depan. Kedua, jika fungsi *bonding* kuat namun fungsi *bridging* lemah membuat masyarakat menjadi terlalu terikat kedalam namun komunikasi ke luar lemah, akibatnya komunitas cenderung eksklusif dan resisten terhadap dunia luar.

Ketiga, bila fungsi *bridging* terlalu kuat sementara, fungsi *bonding* lemah maka masyarakat cenderung tidak memiliki kekuatan sehingga penetrasi dari luar begitu cepat masuk untuk mempengaruhi komunitas di dalam. Terakhir, bila kedua fungsi berjalan dengan baik dan kuat, maka komunitas ini mampu melakukan perubahan dari dalam

secara dinamis dengan mengkonservasi nilai-nilai luar secara baik dan memelihara nilai-nilai internal juga dengan baik.

Untuk menjaga modal sosial dan meningkatkannya agar memiliki kombinasi fungsi *bonding* dan *bridging* yang kuat dan baik diperlukan hal-hal yang mampu memperkuat. Untuk memperkuat *bonding*, perlu dilakukan upaya-upaya kolektif untuk membangun tatanan didalam masyarakat yang lebih besar dan formal. Dapat dilakukan dengan melanggengkan tradisi melalui peristiwa kelembagaan seperti perayaan adat dan bentuk kebersamaan yang fungsional lainnya untuk memperkuat elemen *bonding* dalam masyarakat.

Untuk memperkuat fungsi *bridging*, dapat dilakukan peningkatan interaksi antar kelompok terutama dengan kelompok yang berada di luar juga dengan meningkatkan arus informasi masuk kedalam, juga dengan memperbaiki inisiatif komunitas, tanggung jawab dan kemampuan menyerapnya.

2.3.3. Keterkaitan Budaya, Modal Sosial dan Kemiskinan di Pedesaan

Terkait dengan persoalan kemiskinan, Hasbullah dalam bukunya yang sama mencontohkan eksklusifisme budaya bisa merupakan salah satu faktor yang menghambat kemungkinan berkembangnya modal sosial ke arah yang dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Ia menguraikan bahwa masyarakat dengan kohesifitas sosial yang tinggi di dalam kelompok sosialnya namun memiliki *bridging* yang rendah akan menghasilkan keterkungkungan budaya dari kemungkinan ide, pemikiran dan perkembangan yang datang dari luar entitas kultur lokalnya.

Kebijakan untuk menghidupkan modal sosial inilah yang menurut Hasbullah dalam bukunya yang sama, jarang disentuh dalam proses pembangunan pedesaan. Dengan mengambil contoh sebuah desa di daerah Martapura, ia mengungkapkan bahwa modal sosial di masyarakat tradisional pada umumnya ada namun lemah dan hanya memiliki dimensi internalitas (*bonding*) yang malah merantai masyarakat. Mereka memiliki kohesifitas yang relatif kuat namun terbatas pada ritual agama dan adat tetapi

tidak memiliki energi perubahan karena lemahnya topangan nilai-nilai dan norma yang selaras dengan tuntutan modernitas.

Terkait dengan rendahnya kemampuan *bridging* dan kuatnya *bonding* budaya di pedesaan, dalam konteks Pembangunan Indonesia, Prof Koentjaraningrat (2007) menguraikan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menghambatnya: Pertama, faktor kenaikan penduduk; kedua, faktor aneka warna bangsa Indonesia dan ketiga, faktor sikap mental penduduk. Dapat dilihat bahwa faktor kedua dan terutama faktor ketiga amat berkait dengan budaya.

Dalam hal faktor ketiga yakni sikap mental penduduk, ia menguraikan bahwa sikap mental sebagian besar penduduk Indonesia belum siap menghadapi pembangunan. Sikap mental sendiri adalah suatu istilah populer untuk dua konsep ilmiah yakni "sistem nilai budaya" dan "sikap". Menurut Koentjaraningrat dalam buku yang sama, sistem nilai budaya adalah rangkaian konsep abstrak yang ada dalam alam pikiran warga masyarakat mengenai apa yang dianggap penting dan berharga dalam hidupnya. Dengan demikian sistem nilai budaya adalah bagian dari kebudayaan yang mengarahkan kelakuan manusia, sementara sikap adalah potensi pendorong yang ada dalam individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya beserta segala hal yang ada didalamnya. Kedua konsep inilah yang kemudian dikenal dengan istilah "sikap mental".

Sikap mental seperti apakah yang tidak mendukung upaya pembangunan di Indonesia? Dengan menyadur tulisan Koentjaraningrat (2007), setidaknya ada lima konsep yang tidak tercapai pertama ketidakmampuan kurangnya upaya untuk menilai tinggi unsur-unsur kegembiraan dari hidup. Orang Indonesia cenderung masih menyerah pada takdir (pasif) tanpa ada usaha dan melarikan diri pada kebatinan. Kedua adalah kurangnya menilai tinggi karya guna menghasilkan karya yang lebih banyak, karena biasanya masyarakat miskin di Indonesia dalam aktivitas produksinya biasanya hanya ditujukan kepada usaha mencari makan saja demi memenuhi kebutuhan primer. Sikap mental seperti itu cenderung mengesampingkan kualitas dan karya serta hasilnya.

Ketiga, adalah ketidakmampuan dalam menanggapi atau merasakan keinginan untuk menguasai alam dan kaidahnya sehingga tidak mendorong adanya upaya penguasaan teknologi di masyarakat. Keempat adalah kurangnya kemampuan menilai tinggi suatu

orientasi ke masa depan. Masyarakat Indonesia, terutama kaum miskin biasanya hanya sempat memikirkan tentang hari ini saja. Bahkan dikalangan yang maju pun masih banyak yang berorientasi hanya untuk hari ini saja dan hal ini amat terkait erat dengan kondisi ekonomi negara yang membuat masyarakat berpikir tak ada gunanya memikirkan tentang masa depan. Konsep terakhir yang tidak tercapai adalah ketidakmampuan dalam menilai tinggi kerjasama dengan orang lain. Konsep ini sebenarnya ada di dalam masyarakat Indonesia pada umumnya kecuali di beberapa tempat. Konsep ini dikenal dengan istilah gotong royong, namun sayang sikap gotong royong yang dikembangkan adalah gotong royong yang meremehkan pentingnya kualitas individu. Hal-hal itulah yang menghambat pembangunan terutama di kawasan pedesaan.

Atas dasar hal tersebut maka jelas tampak bahwa kualitas kelembagaan budaya di masyarakat pedesaan Indonesia akan sangat mempengaruhi kualitas modal sosialnya dan selalu berujung pada kuatnya *bonding* yang terbatas pada formalitas agama dan adat serta lemahnya kemampuan *bridging* masyarakatnya.

2.4. Penelitian-Penelitian Sebelumnya

2.4.1. Penelitian Vidhyandika Moeljarto (1997)

Penulis dalam penelitiannya yang berjudul "Gender dan Kemiskinan: Menelaah Posisi Wanita dalam Pembangunan Pertanian" berusaha menelaah kemiskinan ditinjau dari sisi relasi gender, dimana keadaan wanita menjadi yang subordinat terhadap pria sudah mengakar. Namun dalam peran sosioekonominya ternyata wanita memiliki status yang substansial. Menurut beberapa penelitian sebelumnya, ditunjukkan bahwa apabila dilihat secara struktural, wanita dan pria memang memiliki spesifikasi berbeda. Mereka dapat memiliki posisi *power* yang sama, asalkan wanita diberi akses lebih besar terhadap sumber-sumber produksi.

Pengaruh hubungan gender yang asimetris menyebabkan kurangnya akses wanita terhadap bermacam hal seperti pangan, kesehatan, pendidikan dan *skill* yang dapat mendukung mereka agar dapat produktif. Kurangnya akses tersebut secara langsung berakibat pada kemiskinan. Dengan dasar acuan Todaro, penulis menjelaskan bahwa bila

wanita miskin, maka anak menjadi satu-satunya sumber yang dapat dikontrol untuk mengurangi beban pekerjaan mereka. Hal itu berakibat pada semakin rendahnya pendidikan dan kemiskinan semakin menjadi. Diakhir tulisannya penulis berkesimpulan bahwa perbedaan peran antara pria dan wanita merupakan fenomena yang terkonstruksi secara budaya namun dapat dipakai pula sebagai strategi bertahan untuk mencegah kemiskinan.

Di masyarakat pertanian tradisional (contoh: masyarakat sawah surjan), meskipun peranan dan tanggung jawab berbeda, namun relasinya positif dimana peran wanita terutama di lahan sempit, atau petani kelas rendah ternyata lebih berperan dan menentukan dalam aktivitas produksi rumah tangga. Sementara dari penelitian sebelumnya dikatakan setelah teknologi masuk ke masyarakat pertanian, partisipasi wanita malah menurun. Di sektor manufaktur batik ketika teknologi cap batik masuk, keterampilan wanita di sektor itupun menjadi tidak terpakai. Hal ini berarti teknologi malah tidak memperbaiki taraf hidup wanita miskin, melainkan menimbulkan gejala pemiskinan wanita. Ia berkesimpulan bahwa kebijakan gender dan kemiskinan harus dilihat secara holistik dan berkonteks lokal agar tepat, karena tiap budaya memiliki kondisi social, ekonomi, dan politik yang menghasilkan pengertian gender berbeda.

Studi literatur ini memberikan pemahaman bahwa gender dan kemiskinan memang saling terkait, dan dapat terlihat bahwa pembangunan tidak selamanya mendorong berkurangnya kemiskinan terutama bagi wanita. Bila tidak diimbangi dengan peningkatan akses bagi wanita (*human capital*), teknologi justru malah mendorong pemiskinan terhadap wanita.

2.4.2. Penelitian Ester Boserup (1990)

Dalam penelitiannya Ester Boserup (1990) yang berjudul "*Population, the Status of Women, and Rural Development*", ia menguraikan bahwa metode otokrasi dalam organisasi keluarga, dengan laki-laki sebagai pengambil keputusan dan perempuan dijadikan sebagai pihak yang diwajibkan menurut laki-laki, mendorong adaptasi dalam pertumbuhan populasi dengan metode *labor intensive*. Mereka membantu pertanian kecil untuk *survive* dalam persaingan dengan pertanian besar yang harus membayar *marginal*

labor supply. Pengecualian terjadi pada daerah yang mencegah perempuan dari bekerja di sektor pertanian dengan alasan status. Di daerah seperti itu keharusan untuk membayar upah para pria mendorong disinsentif terhadap intensifikasi pertanian. Panen yang subsisten yang biasanya ditanam oleh perempuan dalam upaya meningkatkan produktivitas malah tidak dilakukan, dan ini berdampak pada gizi dan kesejahteraan keluarga.

Karena perempuan di daerah desa terbelakang biasanya dilarang menggunakan alat-alat mekanik dan input modern lainnya, upah perempuan yang rendah bahkan nol harus bersaing dengan upah yang jauh lebih besar dari laki-laki yang menggunakan alat-alat modern sebagai input dan menghasilkan distorsi dalam penghitungan biaya dan berdampak pada hambatan dalam modernisasi pertanian. Dalam kondisi ini, pertanian kurang menarik bagi perempuan dari pada laki-laki yang putus sekolah. Mereka pada akhirnya lebih memilih untuk bermigrasi ke kota, menjadi ibu rumah tangga tanpa bekerja di ladang atau di daerah yang mereka memiliki kesempatan untuk bekerja sebagai karyawan jasa atau industri. Insentif untuk laki-laki bermigrasi lebih kuat di daerah dimana perempuan tidak diikutsertakan dalam produksi atau ditempat dimana perempuan memproduksi makanan keluarga tanpa bantuan laki-laki.

Status subordinat bagi perempuan amat terkait dengan ukuran keluarga yang semakin besar. Perempuan bergantung pada niat baik suami dan keluarga yang lebih tua dan membuat mereka jauh dari praktek kontrasepsi dan karena kesempatan mereka untuk mendukung diri mereka sendiri dalam kasus perceraian ataupun menjanda amat dibatasi oleh restriksi dalam akses tenaga kerja dan diskriminasi upah. Mereka akan menjalankan risiko yang besar dan bergantung pada bantuan anak-anaknya. Bagaimanapun ketika pembangunan pedesaan meningkatkan kepentingan laki-laki untuk melakukan pembatasan keluarga, status inferior perempuan dapat saja mendorong terjadinya penurunan tingkat kesuburan, karena biasanya sang suami yang menentukan ukuran keluarganya.

2.4.3. Penelitian Amri Mazali (2003)

Dalam penelitiannya yang berjudul "*Strategi Peisan Cikalong Dalam Menghadapi Kemiskinan*", Amri Mazali (2003) mengungkapkan fenomena sosial-ekonomi yang terjadi di lingkungan kaum Peisan (Petani) Sunda. Ia melihat ada tiga fenomena yang saling berkaitan, antara lain: Tekanan Penduduk, Kemiskinan dan Strategi Peisan Sunda itu sendiri. Secara tidak sadar, demi mengatasi masalah kemiskinan di pedesaan, para peisan sendiri pada akhirnya menyusun strategi kehidupannya masing-masing.

Berdasarkan penelitiannya, ia memperlihatkan bahwa tidak ada peisan di pedesaan yang berpegang patuh pada moral pedesaan dan juga tidak ada kalkulasi rasional. Keduanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara eklektis dan sesuai dengan situasi. Pengalaman nyata masa lampau juga mengajarkan mereka tentang pilihan strategi yang keluar dari moral pedesaan. Mereka akan diberitahu oleh masyarakat apakah tindakan mereka masih guyub atau sudah tidak guyub melalui berbagai simbol sosial.

Guyub merupakan salah satu tradisi moral pedesaan yang tersisa di kehidupan sosial pedesaan. Guyub merujuk pada suatu kehidupan sosial yang harmonis, tidak ada orang lain yang sendiri dan ini merupakan suatu sistem *shared poverty* yang sudah berakar lama dan tidak mudah terkikis. Dalam sistem ini diterapkan suatu azas tolong menolong tanpa pamrih dalam kesulitan. Jika seseorang tidak berperilaku guyub, maka bila ia pekerja, ia tidak akan ditawarkan lagi pekerjaan di kampung, sementara bila ia pemilik lahan, ia akan dikucilkan masyarakat. Akibatnya dalam kehidupan sosial kampung, tidak ada seorang pun yang dapat menikmati kelebihan materi semanya. Dia harus merasakan kemelaratan orang lain dan berbagi kemelaratan dengan sesama masyarakat kampung.

BAB 3

SASARAN DAN METODE PENELITIAN

3.1. Sasaran Penelitian

Sasaran utama penelitian adalah masyarakat di sekitar PLTP Sarulla, Tapanuli Utara terutama di daerah Pangaloan, Kecamatan Pahae Jae. Yang dimaksudkan dengan masyarakat disini adalah komponen-komponen masyarakat yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari di desa tersebut baik sebagai pengambil keputusan, maupun dalam berbagai kepentingan lainnya. Walaupun sasaran utama penelitian ini adalah masyarakat setempat, pengumpulan data atau informasi juga telah dilakukan terhadap pihak-pihak yang diperkirakan berkaitan dengan tema penelitian.

Daerah Pangaloan dalam penelitian ini merupakan kumpulan beberapa desa di Kecamatan Pahae Jae yang memiliki adat budaya dan sumber daya alam yang homogen dan kesemuanya termasuk dalam daerah yang dilintasi proyek PLTP Sarulla. Desa-desa tersebut antara lain Desa Pardomuan Nainggolan, Desa Siopat Bahal, desa Pardamean Nainggolan, Desa Sigurung-gurung dan Desa Silangkitang.

Terkumpulnya informasi tentang kondisi masyarakat setempat, tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk mendiskreditkan ataupun menyudutkan pihak tertentu. Obyektivitas penelitian menjadi sangat penting untuk menjaga kepentingan masyarakat itu sendiri.

Pilihan penelitian atas Kawasan Pangaloan, Tapanuli Utara ini, selain dikarenakan adanya persyaratan substansial secara akademis yang harus dipenuhi, juga karena karakteristik yang sangat spesifik dibandingkan daerah lain dan karena adanya pertimbangan praktis.

3.2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini untuk memberikan pemaknaan terhadap fenomena dan permasalahan yang terjadi digunakan penelitian kualitatif karena wilayah pembahasan cenderung sempit dengan tingkat variasi rendah namun membutuhkan pendalaman pembahasan

yang tak terbatas untuk menangkap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Namun demikian, penelitian ini tetap memanfaatkan pendekatan kuantitatif, terutama untuk menampilkan gambaran-gambaran deskriptif wilayah yang didukung oleh data-data statistik sekunder.

Menurut Burhan Bungin (2007) pada pendekatan kuantitatif, wilayah penelitian umumnya luas dengan variable yang kompleks dan cenderung berada di permukaan. Pendekatan kuantitatif lebih mempersoalkan frekuensi, mempertanyakan masalah, pengukurannya jelas dan menggunakan alat ukur statistik. Sementara itu pendekatan kualitatif cenderung pada tataran wilayah yang sempit dengan variable yang sederhana namun rumit dalam tataran konten dan cenderung berada di kedalaman. Selain itu pendekatan kualitatif lebih pada berusaha memepersoalkan makna dan mempertanyakan fenomena dan pengukurannya sulit karena alat ukurnya adalah peneliti sendiri.

3.2.1. Pendekatan Kualitatif

Penelitian ini cenderung bersifat lokal sehingga diperlukan suatu pendekatan yang mampu memahami situasi secara lebih khusus dan mendalam sehingga dapat dimunculkan suatu fenomena yang bersifat khusus terkait lokasi penelitian. Atas dasar kebutuhan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Untuk mengungkapkan fenomena kesejahteraan masyarakat setempat, peneliti akan melakukan investigasi, yaitu secara bertahap peneliti berusaha memahami gejala-gejala sosial dengan membedakan, membandingkan, mengkatalogkan, dan mengelompokkan obyek studi. Peneliti memasuki dunia informan dan melakukan interaksi dengan informan, dan mencari sudut pandang informan.

Pada penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Sedangkan fokus penelitian ada pada peran dan pengalaman informan dan cara mereka memandang masalah kesejahteraan di kawasan tersebut. Informan juga dapat menggambarkan fenomena yang terjadi, hubungan sebab akibat, kecenderungan, budaya

yang berkembang dalam masalah-masalah pemenuhan kesejahteraan masyarakat setempat.

Peneliti juga lebih menekankan pada obyektivitas dan kejujuran yang diwujudkan dengan menjelaskan tujuan penelitian kepada informan. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari observasi dan wawancara. Informasi yang didapat dari observasi langsung dengan melakukan transek, catatan wawancara dan foto kegiatan. Informasi tersebut dalam bentuk dokumen dan catatan peristiwa yang diolah menjadi data. Rincian beberapa aktivitas utama dalam pendekatan kualitatif ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

3.2.1.1. Kegiatan Pra Survey

Sebelum peneliti melakukan penelitian di lapangan, sebelumnya peneliti telah melakukan beberapa hal persiapan yang diperlukan sebelum penelitian, antara lain:

- Penyusunan proposal penelitian
- Studi literatur untuk memperdalam tujuan penelitian dan memfokuskan penelitian yang akan dilakukan
- Studi literatur terkait lokasi yang akan diteliti
- Penyusunan pedoman wawancara
- Wawancara pendahuluan terhadap narasumber yang berasal dari lokasi penelitian yang menetap di Jakarta

3.2.1.2. Wawancara Mendalam

Pada penelitian ini metode wawancara mendalam merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. *Kedua*, apa yang ditanyakan kepada informan bisa

mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tentu saja, peneliti menyimpan cadangan masalah yang perlu ditanyakan kepada informan. Cadangan masalah tersebut adalah kapan menanyakannya, bagaimana urutannya, akan seperti apa rumusan pertanyaannya dan sebagainya yang biasanya muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri.

Dengan teknik ini peneliti berharap wawancara berlangsung luwes; arahnya bisa lebih terbuka, percakapan tidak membuat jenuh kedua belah pihak, sehingga diperoleh informasi yang lebih kaya. Metode wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Ini hanya untuk memudahkan dalam melakukan wawancara, penggalan data dan informasi, dan selanjutnya tergantung improvisasi di lapangan.

Proses wawancara mendalam, diawali dengan pengantar. Pada pengantar ini, secara terbuka dan jujur peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dari wawancara. Selanjutnya peneliti menyampaikan pertanyaan yang bersifat luas, dan diakhiri dengan bertanya terbuka namun sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun.

Terdapat dua pedoman wawancara, pertama adalah pedoman umum untuk memperoleh informasi terkait pemetaan kondisi dan dinamika wilayah secara umum dan kedua adalah pedoman wawancara yang digunakan untuk mewawancarai informan secara khusus sesuai dengan perannya dalam masyarakat.

Informan yang berhasil diwawancarai selama penelitian adalah beberapa orang kepala desa dan perangkat desa, kepala sekolah SD, beberapa orang guru SD, tenaga kesehatan (Bidan), pemilik kedai, pemilik sawah, beberapa petani, beberapa perempuan buruh sawah, beberapa pria penyadap nira dan karet, pengelola asset PLTP setempat, beberapa tokoh adat, beberapa Pendeta, remaja pemuda, beberapa perantau yang sukses maupun perantau yang kembali lagi.

3.2.1.3. Diskusi Kelompok Terfokus

Diskusi Kelompok Terfokus merupakan salah satu teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Peneliti memerlukannya untuk menggali data dan informasi kualitatif secara lebih mendalam dan obyektif karena peneliti memperoleh informasi dari beberapa *stakeholders* yang memiliki peran yang sama sehingga dapat dilakukan komparasi. Pada kegiatan ini, peneliti sebagai *moderator* dan dibantu dengan peserta seluruh informan penelitian serta penelitian dilaksanakan ditempat yang nyaman, sehingga memberikan keleluasaan bagi informan berdiskusi. Untuk kelancaran kegiatan ini moderator dilengkapi dengan topik diskusi dan daftar pertanyaan. Adapun alasan peneliti untuk menggunakan diskusi kelompok terfokus adalah:

- 1) Memberi kesempatan kepada peserta saling berinteraksi untuk mengungkapkan informasi yang tersembunyi yang mungkin tidak diperoleh dengan wawancara mendalam.
- 2) Memberi kesempatan peserta mengungkapkan wawasannya mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat.
- 3) Dapat mewawancarai sejumlah orang dalam waktu yang terbatas;
- 4) Dapat mengumpulkan data secara efektif dan efisien
- 5) Digunakan dalam memperbaiki kebijakan, strategi, dan program atau evaluasi program.

Diskusi kelompok terfokus dilakukan setidaknya tiga kali antara lain dilakukan antara lain dengan:

- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Silangkitang
- 2) Sekelompok guru di SD Pardomuan Nainggolan
- 3) Masyarakat Setempat yang terdiri atas beberapa Petani dan Pemilik Kedai Kopi di Sebuah Kedai Kopi

Diskusi dilakukan dengan melibatkan beberapa orang dalam kaitannya dengan kriteria:

- 1) Pengetahuan mengenai Sejarah Daerah Tersebut
- 2) Pengetahuan mengenai situasi kesejahteraan masyarakat setempat, dimulai dari situasi pendidikan, perekonomian kemudian kesehatan hingga budaya.
- 3) Sejauh mana peran dan pengaruh narasumber sesuai dengan posisinya dimasyarakat.
- 4) Pengetahuan mengenai pola kelembagaan keluarga di kawasan tersebut
- 5) Pengetahuan tentang potensi atau keunggulan daerah tersebut
- 6) Pengetahuan tentang fenomena yang terjadi dan kemampuan mengungkap pandangan pribadi mereka mengenai fenomena yang terjadi serta harapan mereka kedepan.

3.2.2. *Rapid Rural Appraisal*

Rapid Rural Appraisal (RRA) merupakan metode yang cenderung fleksibel dan lengkap untuk memperoleh data namun tidak perlu memakan waktu lama. RRA biasanya digambarkan sebagai aktivitas semi terstruktur di lapangan dengan pendekatan tim secara multidisipliner dan didisain untuk memperoleh informasi baru dan memformulasikan suatu hipotesis mengenai kehidupan pedesaan dengan karakteristik utama yakni pendekatan multidisipliner.

Menurut *International Institute for Environment and Development* di London, para praktisi RRA, biasanya mengikuti beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

1. mempelajari hal secara cepat dan progresif dengan penggunaan metode yang fleksibel, upaya oportunistis, improvisasi dan iterasi, tidak dengan mengikutsertakan suatu cetak biru program tetapi lebih beradaptasi dalam proses pembelajaran di lokasi.
2. Mengurangi bias dan tidak terburu-buru, tetapi diusahakan dengan relaks
3. belajar dari dan dengan masyarakat desa. langsung secara tatap muka
4. Triangulasi, atau menggunakan lebih dari metode atau sumber data untuk melakukan cek silang.

5. Optimal, berkaitan dengan biaya, jangan mencoba untuk mencari lebih dari yang diperlukan dan tidak mencoba mengukur lebih dari yang diperlukan untuk tujuan praktis.
6. *Critical self-awareness*, merefleksikan apa yang sudah dilihat dan apa yang belum dilihat, siapa yang sudah ditemui dan siapa yang belum, apa saja yang sudah dikatakan dan apa yang belum dan sumber-sumber kesalahan.

Beberapa tipe metode yang dapat menunjang RRA antara lain:

- *secondary data review*, berupa analisa atas data-data sekunder kawasan
- observasi langsung, dengan melihat secara langsung kegiatan di kawasan
- *DIY (doing-it-yourself)*, dengan mengambil bagian dalam aktivitas di lokasi
- *key informants*, dengan memanfaatkan pihak yang memiliki informasi terkait dan biasanya memiliki informasi yang lebih banyak dari masyarakat lainnya mengenai data yang diperlukan dan berperan sebagai kunci untuk membuka hubungan informasi lainnya
- wawancara semi terstruktur/mendalam, untuk menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti tetapi juga informasi terkait.
- *focus group discussion*, dimana peneliti sebagai fasilitator dan dibantu dengan peserta seluruh informan penelitian serta penelitian dilaksanakan ditempat yang tepat, sehingga memberikan kenyamanan dan keleluasaan bagi informan berdiskusi.
- *chains (sequences) interview*, wawancara dilakukan secara berantai dan berulang-ulang hingga informasi yang didapat menjadi jenuh, sehingga data yang diperoleh lebih valid.
- Indikator kunci, menggunakan beberapa indikator penting terkait data yang dibutuhkan untuk memberikan gambaran sejauh mana pencapaian suatu hal tertentu.
- *key probes*, dimana peneliti menyelidiki secara mendalam hal-hal kunci yang didapat.
- *workshops* dan *brainstorming*, lokakarya bagi masyarakat, curah pendapat.

- transek dan jalan berkeliling. teknik penelusuran dengan mengamati lokasi kawasan, baik letak vegetasi, mata air, lokasi pertanian dan sebagainya yang berada di lokasi dan mencatatnya untuk menunjang penelitian.
- pemetaan, dilakukan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi masyarakat setempat.
- foto aerial, foto udara untuk mengamati kondisi geografis setempat
- diagram, menunjukkan indikator-indikator kunci yang menggambarkan alur masalah yang diamati.
- *ranking* dan *scoring*. pemberian nomor ranking atau skor untuk memberikan urutan prioritas.
- *quick quantification*, estimasi perhitungan secara cepat, sekilas mengenai data yang dikumpulkan.
- *ethohistoris dan time lines* (kronologi even). menyusuri kronologis dalam urutan sejarah kejadian suatu hal yang diteliti.
- cerita, potret dan studi kasus. mengungkap kejadian-kejadian khusus yang menggambarkan fenomena yang terjadi.
- interaksi dan tim manajemen.
- kuesioner sederhana.
- penulisan laporan secara cepat di lapangan.

Dalam beberapa *tools* yang dapat digunakan pada RRA diatas, beberapa tidak penulis gunakan dikarenakan tidak memungkinkan untuk dilakukan pada saat penelitian lapangan, tools yang tidak dimungkinkan digunakan antara lain workshop dan foto aerial karena memakan biaya dan waktu.

Dalam metode ini masyarakat pedesaan sendiri diharapkan lebih banyak memberikan informasi mengenai keadaan dan masalah yang terjadi di kawasan tersebut. Pelibatan secara partisipatif dengan memberikan keleluasaan berpendapat pada aktivitas diskusi dan wawancara adalah momentum yang tepat terhadap terbentuknya informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

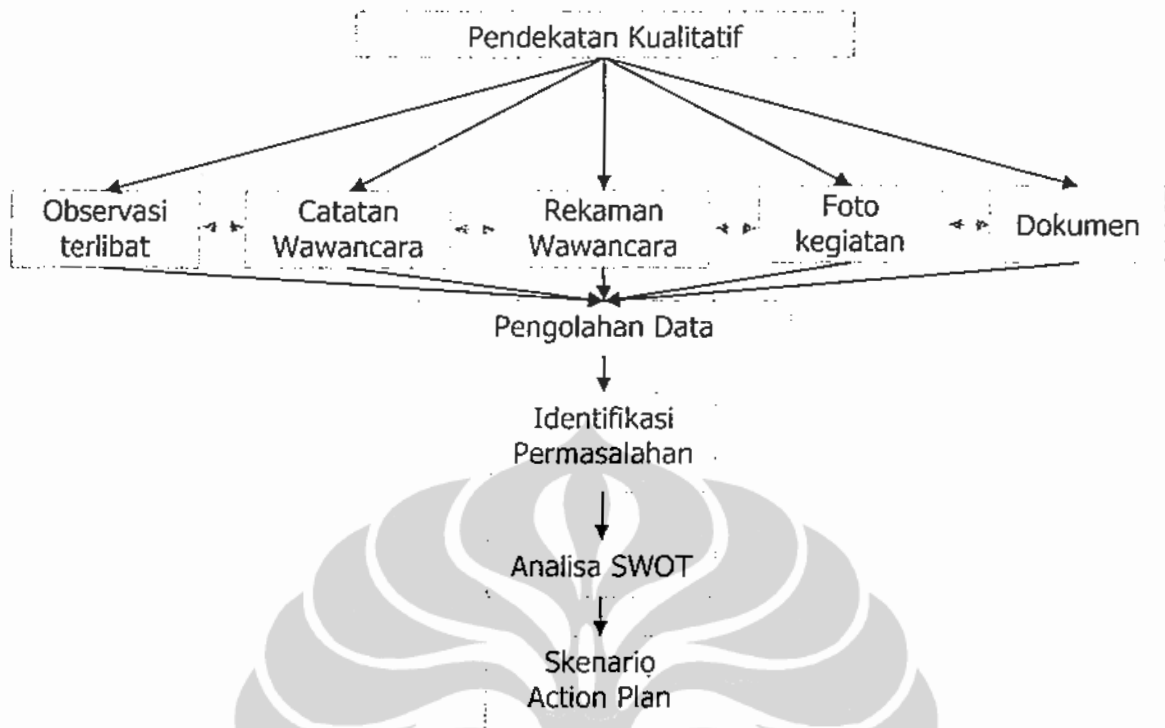
Atas dasar hasil RRA tersebut, kemudian peneliti mengkaji situasi yang terjadi dan berkembang serta mengkaji pula perencanaan yang tepat bagi pembangunan kawasan tersebut kedepan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki saat ini.

3.2.3. Informan

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang mempunyai kaitan erat dengan pengambilan keputusan di daerah tersebut. masyarakat asli setempat yang tidak terkait pengambilan keputusan. para pemuka agama. para pendatang yang telah lama menetap, masyarakat perantau dan beberapa pihak lainnya yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat setempat.

3.2.4. Analisis Data

Pada proses analisis data, peneliti menggunakan data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui pendekatan *Rapid Rural Appraisal*. Untuk mengidentifikasi mengenai masalah dan potensi desa yang berkembang, data hasil pemetaan yang sudah diperoleh dari lapangan peneliti anggap sebagai awal dari kegiatan dimana peneliti melakukan eksplorasi terus menerus untuk mengembangkan data yang diperoleh dari lapangan sehingga ia menangkap pendalaman tema yang spesifik. Kemudian peneliti mengembangkan tema-tema tersebut sebagai fokus penelitiannya. Setelah diperoleh hasil identifikasi permasalahan dan potensi, peneliti melakukan analisa SWOT untuk memperoleh gambaran strategi yang tepat untuk kemudian dituangkan kedalam suatu skenario *action plan*.



Gbr. 3.1. Analisis Data

3.2.5. Reliabilitas dan Validitas

Reliabilitas dan validitas merupakan hal yang diperlukan dalam menilai suatu metode penelitian kualitatif. Dalam menilai reliabilitas (kehandalan) suatu metode yang digunakan perlu diperhatikan hal-hal berikut antar lain: dalam analisis tergambaran pendekatan dan prosedur analisis data yang digunakan, peneliti memberikan alasan mengapa pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian, peneliti juga harus menunjukkan suatu proses penyusunan tema, konsep, dan teori dari pengolahan data. Peneliti juga diharapkan mampu menunjukkan fakta-fakta termasuk dari penelitian kualitatif dan kuantitatif sebelumnya.

Validitas menggambarkan keabsahan atau kesahihan dalam mengukur hal yang diteliti. Validitas suatu penelitian dinilai dari keadaan yang terlihat secara baik dan penggambaran secara tepat atas data yang dikumpulkan. Dalam term validitas, hal yang diperlukan adalah: pengaruh yang kuat dari desain penelitian dan pendekatan analisis pada hasil yang dipresentasikan, kekonsistenan temuan, hasil yang dipresentasikan

luasannya mewakili secara keseluruhan dan berkaitan dan penelitian menggunakan data asli yang memadai dan sistematis dengan demikian pembaca yakin bahwa interpretasi data terkait dengan data yang dikumpulkan.

Untuk menggambarkan reliabilitas dan validitas yang telah penulis lakukan, telah dilakukan hal-hal berikut, antara lain:

- 1) triangulasi data dan metode. Data dan metode dikumpulkan melalui sumber majemuk dengan memasukan berbagai data yang telah diperoleh seperti sumber pustaka referensi, hasil wawancara, diskusi kelompok terfokus, dokumen-dokumen berupa gambar dan pustaka, peta wilayah, peta transek dan lainnya;
- 2) pemeriksaan silang antar informan mengenai permasalahan yang sama;
- 3) pengamatan berulang di lokasi penelitian yang dilakukan kurang lebih tiga kali yang dilakukan bersamaan dengan proses pendokumentasian baik berupa gambar foto maupun peta transek;
- 4) klarifikasi prasangka peneliti,
- 5) mempertimbangkan berbagai masalah dari masukan informan;
- 6) menyediakan alasan untuk keputusan mereka menyediakan masukan atau tidak;
- 7) menjelaskan bagaimana mereka mengetahui tentang masukan, jenis masukan, dan mengapa;
- 8) menjelaskan bagaimana masukan dari informan telah digunakan dalam analisis dan interpretasi data.

3.3. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk melakukan penelitian di kawasan sekitar lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla, maka penelitian ini pun mengambil lokasi di Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, tepatnya di daerah Pangaloan terutama di desa Silangkitan, Pardamean Nainggolan, Pardomuan Nainggolan, Sigurung-gurung dan Siopat Bahal. Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap. Tahap persiapan dari akhir Januari 2008 hingga akhir

Februari 2008 dan tahap pelaksanaan dilaksanakan sepanjang Maret 2008. Sedangkan proses penulisan dilakukan sampai akhir 2008.

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No.	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1	Persiapan Lapangan	√	√	√					
2	Pembahasan Pokok-pokok Pertanyaan			√					
3	Pengumpulan data			√					
4	Pengecekan data dan informasi			√					
5	Pengolahan Data				√	√			
6	Analisis Data				√	√			
7	Penyusunan Laporan					√	√		

Sumber: diolah sendiri.

BAB 4
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN
DAN DINAMIKA YANG TERJADI SAAT INI

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Administrasi Wilayah

Kawasan Pangaloan merupakan kawasan yang terletak di sekitar PLTP Sarulla, Sumatera Utara. Letak kawasan ini tepatnya di Kecamatan Pahae Jae, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kelima desa di kawasan Pangaloan antara lain:

1. Desa Silangkitang (8 km²)
2. Desa Sigurung-gurung (7 km²)
3. Desa Pardamean Nainggolan (6 km²)
4. Desa Siopat Bahal (8 Km²)
5. Desa Pardomuan Nainggolan (7,5 km²)

Seluruh desa kecuali desa Siopat Bahal secara berturut-turut memanjang di tepi jalur lintas barat sumatera. Ke sebelah timur, daerah Pangaloan juga berbatasan dengan bukit yang langsung berbatasan dengan kecamatan Pangaribuan. Disebelah barat, berbatasan dengan kecamatan Purba Tua dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Sementara di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pahae Julu dan desa Sitolu Ompu. Di sebelah selatan adalah desa Parsaoran Nainggolan dan Kelurahan Kota Sarulla.

4.1.2. Struktur Pemerintahan

Struktur Pemerintahan di delapan desa cenderung sama (kecuali kelurahan). Kepala Desa dipilih Warga, dibantu oleh sekretaris desa. Perangkat desa terdiri dari Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Badan Kemitraan Polisi Masyarakat. Yang masih aktif berjalan adalah Kepala Desa, BPD dan Sekretaris Desa. Yang menarik adalah Kepala Desa tidak memiliki kantor tetap. Ia tinggal di rumah dan masyarakat berhubungan langsung ke rumahnya atau ke rumah sekretaris. Dalam hal fasilitas, Kepala Desa mendapat bagian

tertentu dari pemerintah baik berupa penghasilan ataupun fasilitas lainnya, sementara perangkat desa lainnya mandiri.

Serupa dengan kepala desa, Rapat BPD dilaksanakan di rumah-rumah Masyarakat atau di tempat lainnya dimana masyarakat lebih mudah bertemu, hal ini dikarenakan desa tidak memiliki balai desa. Lembaga lain yang terdapat di masyarakat adalah Rapat Adat (Martonggo Raja) yang berjalan bila akan ada suatu upacara adat atau perayaan adat.

4.1.3. Kondisi Geografis Wilayah

Wilayah Pangaloan berada di ketinggian antara 450-750 meter diatas permukaan laut dan memiliki kondisi geografis wilayah dataran yang berada di kaki gunung. dengan dibatasi perbukitan di sisi timur dan di sisi barat dibatasi sungai Batang Toru . Selain itu dari gunung juga mengalir lima anak sungai kecil yang alirannya bergerak menuju Sungai Batang Toru.

Kawasan Pangaloan dikenal memiliki iklim yang sangat cocok untuk bercocok tanam dan memiliki tanah yang sangat subur. Hal ini membuat daerah ini dikenal sebagai salah satu daerah paling subur di Tapanuli. Apapun yang ditanam di daerah ini, dianggap sudah pasti tumbuh menghasilkan. Tanaman yang menjadi komoditi utama daerah selama ini adalah padi sawah (sepanjang aliran sungai), karet (di hutan sepanjang kaki bukit di pinggiran desa), kemenyan (di belakang hutan karet). Selain itu coklat saat ini mulai menjadi tren dan kebanyakan ditanam di setiap halaman rumah. Selain itu tanaman padi sawah juga menjadi komoditas penting, hal ini bukan hanya berkaitan dengan peranannya secara ekonomi tetapi juga sudah menjadi tradisi untuk bekerja di sawah meskipun tidak menguntungkan.

4.1.4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kelima desa di Pangaloan pada umumnya sudah memiliki jalan yang memadai, hal ini mengingat letak desa yang berada pada jalur lintas barat Sumatera, kecuali desa Siopat Bahal. Desa Siopat Bahal sendiri terletak di sebelah barat sungai sehingga tidak dilintasi jalan. Selama ini Desa Siopat Bahal tidak memiliki akses jalan masuk kecuali sebuah

jembatan gantung kecil yang memiliki lebar tidak sampai 1 meter, itupun hanya dapat dilalui orang karena strukturnya yang tidak kuat. Namun semenjak tiga bulan terakhir desa ini sudah memiliki jembatan penyeberangan yang sangat memadai dan dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat. Saat ini di desa pun sedang dibuka akses jalan hingga ke dusun yang berada paling jauh.

Sarana pendidikan di kawasan ini cukup memadai dimana terdapat enam Sekolah Dasar Negeri. Untuk Sekolah Menengah Pertama, hanya ada satu sekolah swasta, sedangkan untuk SMP negeri dan SMA (Negeri dan Swasta) ada di ibukota kecamatan Pahae Jae, yakni Kota Sarulla yang berjarak sekitar 4 km dari desa-desa tersebut. Begitu pula sarana keagamaan. Setidaknya ada 6 Gereja di kawasan ini. Seluruh gereja memiliki aktivitas yang memadai.

Tabel. 4.1. Beberapa Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana	jumlah	Keterangan
SD	6 unit	
SMP	1 unit	Swasta
SMA	-	Tertletak di ibukota kecamatan
Gereja	6 unit	GKPI, HKBP, GPKB, Angkola, Pantekosta
Mesjid	1 unit	Langgar
Puskesmas pembantu (pustu)	1 unit	membawahi pondok bersalin desa (polindes) di setiap desa. Pustu dikelola tenaga bidan
Perpustakaan desa	1 unit	Tidak aktif
Sarana air minum	5 unit	Keran pipa air bersih dari penampungan mata air
Pasar	1 unit	Hanya ada 1 kali dalam sepekan

Sumber: diolah dari hasil wawancara.

Sarana kesehatan untuk kawasan ini sudah disediakan sebuah Puskesmas Pembantu cabang dari Puskesmas di Kota Sarulla. Dipimpin oleh seorang Bidan, dan

rutin dikunjungi Dokter setiap minggu. Posyandu berjalan efektif. Di setiap desa juga terdapat Polindes yang dipegang masing-masing oleh seorang bidan desa. •

Sarana Air Minum diambil dari sumber-sumber mata air yang dialirkan dengan pipa kearah jalan desa. Setiap desa setidaknya memiliki satu hingga dua sumber mata air minum. Sarana Air Minum berupa pipa-pipa penyambung disumbangkan oleh sebuah perusahaan swasta dan juga atas inisiatif beberapa warga.

Sarana MCK sangat memprihatinkan, sebagai contoh di salah satu desa (sekitar 200 KK), hanya 16 Rumah yang memiliki MCK sendiri. Hal ini juga terjadi di desa-desa lainnya di Pangalooan. Sebagian besar KK masih mengandalkan keberadaan sungai dan keberadaan anak-anak sungai juga kali-kali irigasi.

Pasar diadakan setiap pekan pada hari Rabu, dipusatkan di desa Pardomuan Nainggolan. Selain itu mereka mengandalkan pasar Pekan terbesar yakni di Sarulla yang diadakan setiap hari Selasa. Pasar Pekan juga diadakan di Kecamatan Pahae Julu tepatnya di Onan Hasang setiap hari Jumat, meskipun agak jauh. Bila diperlukan masyarakat akan menuju pasar pekan di Siborong-borong hingga ke kota Tarutung. Pasar ini selain berfungsi untuk menjual hasil-hasil sawah dan kebun, juga untuk memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari untuk jangka seminggu kedepan.

Pola pemukiman mengikuti aliran sungai dan jalan lintas barat. Setiap pemukiman mengelompok per dusun yang biasanya setiap dusun berasal dari satu keturunan yang sama.

4.1.5. Kondisi Demografis

Total penduduk dari kelima desa yang ada di Pangalooan saat ini adalah sekira 6057 jiwa atau 165 jiwa per kilometer persegi. Masyarakat setempat pada umumnya adalah suku Batak Toba yang berasal dari Tarutung dan sudah bermigrasi ke daerah tersebut sejak 4-5 generasi sebelumnya. Penduduk tinggal berkelompok menurut dusun-dusun, dimana setiap dusun biasanya berasal dari satu keturunan.

Tabel. 4.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

No	Desa	Luas (Km2)	Jml Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1	Silangkitang	8	1158	145
2	Sigurung-gurung	7	1356	194
3	Pardamean Nainggolan	6	1063	177
4	Pardomuan Nainggolan	7,5	1435	191
5	Siopat Bahal	8	1045	131

Sumber: data kepala desa

4.1.5.1. Kemasyarakatan

Setiap desa memiliki marga-marga besar yang dominan, walaupun tetap ada marga-marga kecil yang hingga saat ini menjadi warga minoritas. Adat, terutama dalam hal seremonial masih dijunjung tinggi. Hingga saat ini nilai-nilai adat tersebut masih terjaga walaupun nilai-nilai baru sudah masuk ke daerah tersebut.

Tradisi yang dominan adalah Upacara-Upacara Adat yang diselenggarakan di berbagai momen, baik kelahiran, kematian, perkawinan juga mengadakan pendarang. Tradisi meminum tuak adalah hal yang lazim dalam setiap upacara. Begitu pula keberadaan kedai-kedai lapo tuak telah menjadi kebiasaan sebagai tempat bertemu orang-orang tua. Kebiasaan ini kini bergeser ke kalangan muda.

Terdapat suku-suku pendarang, namun tidak banyak, itupun lebih dominan berasal dari suku Batak Karo ataupun Mandailing. Sebenarnya masyarakat relatif tertutup terhadap pendarang. Biasanya para pendarang diundang untuk ikut masuk menjadi bagian dari masyarakat melalui suatu upacara adat.

4.1.5.2. Agama dan Pendidikan

Meskipun keberadaan Agama sudah ada sejak abad 18-19, namun agama masih dianggap lebih rendah peranannya setelah adat, atau sebagai pelengkap adat, terutama dikalangan orang tua dan pria dewasa. Kesadaran agama saat ini sudah mulai berhasil masuk melalui ibu-ibu dan kalangan anak remaja. Untuk saat ini setidaknya terdapat 6 gereja dan 1 langgar di daerah Pangalooan.

Seluruh anak usia SD mengikuti pendidikan sekolah dasar secara gratis, begitu pula anak usia SMP. Bagi masyarakat setempat pendidikan menjadi hal yang memiliki prestise sehingga wajar bila angka partisipasi sekolah dasar dan menengah sangat tinggi. Untuk usia 40 tahun ke bawah, rata-rata adalah lulusan SMA. Tingkat baca tulis mendekati 100%. Sekolah SD dan SMP juga memiliki jumlah guru yang lengkap. Di setiap kelas terdapat guru wali kelas yang tidak merangkap. Para guru ini sendiri sebagian berpendidikan S1.

4.1.5.3. Kesehatan

Untuk masalah kesehatan, masyarakat cenderung tertutup. Terutama bila mengalami sakit berat. Kondisi puskesmas pembantu (pustu) sering sepi pengunjung. Mereka umumnya baru membawa ke puskesmas bila kondisi sudah dianggap gawat. Tetapi kesadaran mengenai kesehatan Ibu cukup tinggi. Keberadaan Polindesdi setiap desa dan Bidan desa sangat dimanfaatkan.

Perhatian terhadap kesehatan anak juga sudah mulai tinggi. Posyandu juga berjalan secara rutin setidaknya satu kali dalam sebulan dan sudah memiliki kader dari warga setempat. Namun pemberian imunisasi masih belum dipercayai penuh oleh masyarakat. Begitu pula masalah gizi. Masyarakat cenderung kurang memperhatikan. Terutama keberadaan buah dan sayur. Sementara makanan utama mereka adalah nasi dan lauk. Lauk yang paling umum adalah ikan. Daging sendiri jarang dikonsumsi kecuali pada acara-acara adat.

Mengenai kesehatan lingkungan, ketidakberadaan sanitasi di sebagian besar rumah tangga menjadi masalah besar. Juga kekurangan pedulian masyarakat terhadap

sampah-sampah diluar rumah. Kebersihan rumah, ternak dan lingkungan sekitar pada umumnya tidak diperhatikan.

4.1.5.4. Mata Pencarian Masyarakat

Mata pencarian masyarakat setempat pada umumnya adalah bertani dan berkebun atau menyadap. Hanya sedikit yang bermata pencarian diluar itu, yakni pegawai negeri, terutama guru. Adapula yang menjadi pedagang toko itupun dapat dihitng jari. Saat ini sudah mulai banyak membuka kedai tuak.

Lahan garapan yang digunakan warga untuk bertani dan berkebun adalah sekira 3674 hektar, dimana sebagian besar lebih banyak digunakan untuk perkebunan kemenyan, karet dan coklat. Pekerjaan bertani dan mengolah coklat pada umumnya dilakukan oleh perempuan. Sementara laki-laki lebih banyak pergi ke kebun untuk menyadap karet dan nira untuk diolah menjadi tuak.

Tabel. 4.3. Pemanfaatan Lahan untuk Pertanian

No	Desa	Pemanfaatan lahan untuk pertanian (ha)			Jumlah
		Tanah Sawah	Kebun (kemenyan, karet, coklat, dll)	Tanah kering (hortikultura)	
1	Silangkitang	100	600	83	783
2	Sigurung-gurung	110	585	90	785
3	Pardamean Nainggolan	80	480	25	585
4	Pardomuan Nainggolan	85	584	65	734
5	Siopat Bahal	112	395	280	787

Sumber: Diolah dari data kepala desa

Pola tanam komoditi-komoditi perkebunan seperti karet, kemenyan dan coklat cenderung tidak teratur. Hal ini dikarenakan menurut anggapan sebagian besar warga,

apapun yg ditanam di daerah tersebut sudah pasti tumbuh, sehingga mereka tidak perlu repot mengurusnya. Hal yang paling tampak adalah pada perkebunan karet. Karet di kawasan tersebut sebagian besar ditanam sejak 3 generasi lalu dan tidak pernah diregenerasi lagi. Karet yang baru tumbuh, kebanyakan tumbuh sendiri, bukan hasil cocok tanam. Proses penyadapan pun tampak agak dipaksakan pada pohon yang getahnya sudah habis. Begitu pula dengan kemenyan, yang sudah jarang diambil karena letaknya terlalu jauh namun harganya terlalu murah saat ini. Dahulu ketika karet-karet tersebut masih produktif, seorang warga bisa memperoleh 40 kg setiap bulannya hanya dari beberapa meter lahan yang mereka miliki, kini mereka hanya mendapatkan 4 kg dalam sebulan.

Sementara coklat, ditanam belum lama, baru dibawa bibitnya sekitar tahun 90-an. Pada awalnya masyarakat kurang menganggap keberadaan bibit coklat ini. Cara mereka menanam pun tidak beraturan, hanya beberapa keluarga saja yang serius menanam. Hasil tanam coklat tersebut kini membuahkan hasil mengingat harga coklat yang mulai tinggi. Masyarakat mulai melirik tanaman coklat mereka yang sebelumnya tidak dipedulikan keberadaannya.

Salah satu mata pencaharian sampingan penduduk disini adalah pohon nira untuk kemudian diolah menjadi tuak. Sebenarnya nira baru menjadi primadona akhir-akhir ini setelah mereka mengetahui hasil penjualannya cukup banyak. Satu kali menampung pohon nira, mereka dapat menghasilkan hingga 20 botol, setiap dua botol oleh tauke dihargai 2500 rupiah. Kemudian oleh pemilik kedai biasanya dijual 1000 rupiah per gelas atau 2000 rupiah per botol.

Desa ini juga menjadi penghasil padi dengan produksi sekira 500-600 ton per desa untuk setiap kali panen, namun pola tanamnya belum diarahkan secara intensif. Panen hanya terjadi 2 kali setahun. Mereka menanam tidak memperhitungkan margin keuntungan. Biasanya bila ditanya, hasil mereka selalu sama dengan modalnya bahkan ada yang rugi. Namun mereka tetap bertahan menanam padi karena sudah menjadi tradisi turun temurun yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam mengolah sawahnya, masyarakat biasa menggunakan pupuk urea dan pestisida. Masyarakat tidak mengenal atau tidak terbiasa untuk membuat pupuk kompos. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya

biaya menanam padi. Ini sangat disayangkan mengingat kawasan Pangaloan sudah sangat terkenal akan kesuburan tanahnya dan sumber airnya yang melimpah. Seluruh desa sudah memiliki irigasi setengah teknis dan beberapa irigasi sederhana.

Selain itu, banyak pula yang merantau mengingat lahan garapan yang semakin berkurang. Namun belakangan banyak pula yang merantau sudah kembali lagi karena mendengar kabar akan dibukanya kembali PLTP Sarulla dan mereka berharap dapat bekerja di PLTP tersebut. Jumlah perantau yang kembali dapat mencapai angka melebihi seratus di tiap desa. Umumnya berusia 20-30 tahun dan untuk sementara ini mereka bekerja di kebun atau menganggur.

4.1.5.5. Peran Perempuan

Peran perempuan amat besar dan diakui sendiri oleh para prianya. Para perempuan bekerja dari pagi hingga sore di sawah kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Sementara laki-laki biasanya lebih banyak bekerja di kebun pada pagi dan sore hari. Pada siang hari dan malam hari banyak beristirahat di kedai-kedai tuak.

Di rumah tangga sendiri posisi perempuan pada umumnya bukan sebagai pengambil keputusan. Mereka hanya menuruti perintah suami. Bila suami meninggal maka anak lelaki yang menjadi pemimpin keluarga. Pada umumnya kaum pria lebih dominan dalam mengemukakan pendapat, sementara kaum perempuan cenderung segan untuk mengeluarkan pendapat terutama bila ada kaum pria terutama dari keluarganya sendiri. Sebaliknya dalam hal bekerja untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan pengeluaran rumah tangga, kaum perempuan justru cenderung lebih dominan. Pendapatan kaum laki-laki lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sendiri.

4.2. Sejarah Daerah

Kawasan PLTP di Tapanuli Utara ini sering disebut dengan PLTP Sarulla, meskipun sebenarnya Sarulla sendiri bukanlah lokasi PLTP dan berada diluar Pangaloan. Daerah Pangaloan sendiri berjarak setidaknya 4 Km dari Kota Sarulla, Ibukota Kecamatan Pahae Jae. Kecamatan Pahae Jae sendiri memiliki 13 Desa, dimana 5 desa di sebelah utara yang kini terkena proyek PLTP Sarulla (daerah Pangaloan). Keseluruhan desa di Daerah Pangaloan memiliki homogenitas dalam kultur kehidupan masyarakatnya, juga memiliki kekhasan sendiri terutama dalam sejarahnya dan kondisi alamnya.

Kawasan ini disebut Pangaloan yang berarti perlawanan. Pangaloan diartikan sebagai perlawanan. Menurut beberapa sumber, hal ini dikarenakan di 5 desa ini, sejak dahulu merupakan daerah Konflik, baik konflik antar desa, hingga perlawanan dengan penjajah dan perang saudara (PRRI Permesta). Pada awalnya konflik antar desa memang sering terjadi, sampai akhirnya terjadi kesepakatan (terutama antar 2 desa, Silangkitan dan Sigurung-gurung untuk mengakhiri konflik). 4 marga terbesar mengadakan kesepakatan di suatu kebun yang disebut tortahi. Mereka bersepakat untuk membentuk suatu peraturan adat yang mengatur kawasan tersebut dan bertujuan mengurangi potensi konflik di kemudian hari.

Mengenai hak atas tanah, tanah-tanah disana dibagikan secara merata pada empat besar marga. Meskipun demikian marga-marga kecil diluar itu tetap mendapat bagian tanah dengan porsi yang lebih kecil. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari konflik. Marga-marga besar sebenarnya masih mendominasi dan berpengaruh besar namun marga kecil tetap diberi keleluasaan dan untuk menghargainya mereka diangkat sebagai "boru". Para tetua Marga Besar bertindak sebagai "hula-hula" dan bertindak sebagai "raja huta" adalah kepala desa. Dalam membuat keputusan menyangkut adat, maka ketiga pihak inilah yang bersepakat untuk membuat keputusan.

Kehadiran marga-marga dominan tersebut tidak lepas dari sejarah berdirinya desa sejak 4-5 generasi lampau (sekitar tahun 1800-an), dimana marga-marga besar pada umumnya merupakan pihak-pihak pertama yang membuka lahan di daerah tersebut. Sebelumnya daerah Pangaloan adalah lahan hutan tidur tanpa pemilik, kemudian dibuka oleh beberapa keluarga migran yang berasal dari daerah utara dan kebanyakan berasal

dari daerah Tarutung dan berasal dari suku Batak Toba. Mereka berpindah ke kawasan Pangaloan karena lahan garapan yang tersedia sudah mulai berkurang karena terus dibagi untuk setiap keturunan hingga hampir habis. Dengan membuka lahan garapan baru otomatis timbul komunitas baru dan migran-migran lainnya pun mengikuti.

Lahan di daerah ini adalah lahan yang sangat subur, maka tidak heran jika tanaman disini tumbuh dengan cepat dan menghasilkan tanpa perlu direkayasa. Dalam 2 generasi, penduduk di kawasan ini menjadi sangat sejahtera. Dahulu daerah ini bahkan sempat menjadi penghasil Kemenyan terbesar di Indonesia. Selain itu dahulu daerah ini dikenal pula sebagai salah satu penghasil kopi Sumatera terbaik. Sebagai contoh betapa sejahteranya daerah ini, Kepala Desa Silangkitang, bertutur:

"Tahun 70an, setiap pekan mereka cuci tangan pun dengan bir. Setiap ada pasar pekan, mereka ambil dagangan-dagangan di pasar pekan dihorongnya semua"

Hal tersebut kini mulai memudar seiring dengan seringnya mereka mengalami gagal tanam di tahun-tahun berikutnya dan jatuhnya harga kemenyan dan karet. Hal tersebut membuat mereka mulai jatuh miskin.

Hal yang menarik adalah keberadaan kopi yang dahulu sangat menjanjikan tetapi saat ini sudah tidak banyak lagi. Penyebabnya adalah adanya perubahan pada jenis kopi yang ditanam yang digantikan seluruhnya oleh kopi jenis baru yang diharapkan dapat menghasilkan lebih banyak. Tetapi justru tanaman kopi yang baru tersebut tidak dapat tumbuh baik di Pangaloan karena iklimnya tidak cocok sehingga tanaman kopi tersebut tidak dapat berbuah. Hal ini semakin membuat daerah ini terpuruk.

Jumlah penduduk yang semakin banyak di daerah tersebut juga memaksa sebagian warga terutama yang masih lajang untuk merantau, hal ini bukan disebabkan karena mereka memiliki keinginan dan kebiasaan untuk merantau, tetapi lebih karena desakan habisnya lahan garapan, terutama bagi marga-marga kecil. Bagi mereka bermigrasi ke luar Tapanuli menjadi pilihan yang paling mudah karena ketika itu jalur lintas barat menjadi jalur utama menuju ke daerah selatan dan pulau Jawa.

4.3. Dinamika Kehidupan Masyarakat Saat Ini

Yang dimaksudkan dengan dinamika kehidupan masyarakat saat ini adalah kecenderungan yang menjadi gejala pada masyarakat setempat yang dapat ditangkap oleh penulis. Sub bab ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan beberapa hal yang patut diperhatikan secara khusus dari desa ini.

4.3.1. Kesehatan

Masalah akses kesehatan saat ini daerah Pangaloan sebenarnya tidak menjadi kendala besar. Dokter rutin mengunjungi Pustu, bidan desa tersedia di setiap desa, posyandu masih berjalan secara berkala. Saat ini yang menjadi kendala dan harus diperhatikan di kawasan ini adalah kesehatan keluarga terutama terkait lingkungan, terutama masalah sanitasi. Rata-rata rumah sama sekali tidak memiliki fasilitas MCK. Rumah yang memiliki fasilitas MCK hanyalah rumah-rumah keluarga yang sudah pernah merantau lama dan berkeluarga di luar Tapanuli, dan mereka sudah sadar akan pentingnya sanitasi. Jumlah keluarga yang memiliki sarana MCK ini untuk di desa Pardomuan Nainggolan saja tidak lebih dari 16 rumah dari 200-an rumah yang ada.

Masyarakat pada umumnya masih mengandalkan aliran sungai, kali, selokan dan irigasi yang ada untuk seluruh keperluan MCKnya. Hal ini dikarenakan air yang memang melimpah. Bahkan rumah yang agak jauh dari aliran air lebih memilih untuk menggunakan halaman kebun sebagai sarana kakus. Ketika dikonfirmasi kepada beberapa tokoh setempat, menurut mereka, bila warga diberitahu mengenai pentingnya memiliki kamar mandi, warga cenderung membantah dan tidak mau menanggapi karena bagi mereka itu adalah urusan pribadi yang tidak perlu dicampuri, apalagi biaya untuk membuat kamar mandi tidak murah dan air juga sangat melimpah.

Untuk sarana air minum dan masak, warga tidak menggunakan sumber air yang sama dengan MCK. Mereka sadar akan hal tersebut. Selain itu sumber air dari sumur juga kurang layak untuk diminum karena kadar Ph yang dibawah standar air minum, Pada umumnya warga mengandalkan berbagai mata air yang bersumber dari bukit sekitar. Mata air tersebut dahulu masih alami dan tradisional, sehingga untuk mengambilnya

harus menempuh jarak tertentu. Tetapi beberapa tahun yang lalu terdapat bantuan dari PT. UNOCAL, pengelola PLTP Sarulla yang lama. Bantuan tersebut berupa penampungan air dan pipa yang menghubungkan mata air dari penampungan langsung ke tepi jalan umum, sehingga saat ini setidaknya saat ini ada 5 titik keran air yang tersebar di tepi jalan umum di beberapa desa.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah masalah KB, karena adanya prinsip bahwa anak adalah harta yang sangat berharga (Anakoki Hamaraon Diao), sehingga jumlah anak yang banyak dalam keluarga adalah hal yang sangat lumrah. Jumlah anak yang banyak ini tidak dibarengi dengan kondisi rumah yang ideal. Kondisi rumah sebagian besar warga dalam kondisi tidak terawat dengan baik dan tidak memiliki pembuangan sampah yang baik. Selain itu juga masalah umur harapan hidup, menurut pengelola pustu dan kepala desa, juga beberapa warga, di daerah ini lazimnya para perempuan memiliki harapan hidup yang jauh lebih tinggi. Masih sangat banyak perempuan yang hidup diatas usia 70 tahun, sementara laki-laki kebanyakan sudah meninggal sebelum usia 60 tahun.

4.3.2. Pendidikan

Masalah Pendidikan secara kasat mata bukanlah masalah besar di kawasan ini. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat partisipasi sekolah dasar hingga SMA serta rendahnya tingkat buta huruf. Bahkan untuk hal pendidikan keberanian orang tua untuk menyekolahkan anaknya hingga tingkat tinggi patut diacungi jempol, karena semiskin apapun mereka, menyekolahkan anak adalah masalah prestise sehingga apapun akan mereka korbakan.

Permasalahan yang dihadapi bukan pendidikan formal tapi pendidikan dalam keluarga, yang juga terkait dengan masalah ketidaksetaraan gender. Hal ini disebabkan sangat besarnya peran perempuan dalam rumah tangga. Dikarenakan ibu harus bekerja di sawah kemudian di setiap pekan harus membawa hasil kebun (coklat) ke pasar pekan sehingga pendidikan anak di rumah cenderung terabaikan. Sementara dari sisi ayah, selain sibuk juga di kebun, pada waktu luang sebagian dari mereka lebih sering berada di kedai tuak untuk berkumpul dengan rekan-rekan sebayanya.

Jelas hal tersebut berdampak pada kehidupan anak-anak mereka. Anak-anak menjadi terbiasa hidup sendiri tanpa perhatian dan bersikap konsumtif karena tidak ada yang mengontrol di rumah. Televisi menjadi makanan sehari-hari anak dan mereka juga bebas bermain tanpa ada yang mengendalikan. Terkadang masalah gizi pun ada yang terabaikan. Beban mengurus ini terkadang juga malah menjadi tanggungan anak perempuan di keluarga. Belum lagi adanya perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki juga berpengaruh pada sikap anak.

Hal ini memang tidak terjadi di semua keluarga, namun sudah mulai menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Orang tua menganggap setelah anak mereka masuk SD, pendidikan sang anak sudah menjadi tanggung jawab pihak sekolah, dan mereka cenderung tidak memperhatikan lagi prestasi sang anak. Hal ini masih dapat diantisipasi sekolah dengan mulai mengajarkan anak-anak untuk hidup secara mandiri, mulai dari cara mandi, berpakaian, hingga cara belajar di rumah. Yang ditakutkan adalah bila ini terus menerus berlangsung akan berdampak pada pola hidup sang anak di kemudian hari.

4.3.3. Perekonomian Keluarga, Peran Tanah dan Peran Perempuan di Dalamnya

Perempuan di Kawasan ini memang menjadi ujung tombak ekonomi dalam rumah tangga dikarenakan mereka secara penuh dari pagi hingga sore bekerja di sawah. Hal ini sudah menjadi rutinitas. Pada umumnya mereka telah berangkat ke sawah di pagi hari dan beristirahat sebentar untuk makan (makan dibawa sendiri dari rumah) di siang hari dan kemudian langsung dilanjutkan kembali bekerja. Sore hari mereka kembali ke rumah untuk mengolah coklat yang sudah dikeringkan dan mengurus rumah.

Di sisi lain, para laki-laki dewasa pergi di pagi hari menuju kebun untuk menyadap karet dan nira. Sambil menunggu hasil sadapannya sebagian dari mereka terbiasa untuk menunggu di kedai lapo tuak dan sore hari mengambil hasilnya. Hasil sadapan dari nira ini kemudian mereka jual ke tauke atau penadah-penadah, pada saat itu juga ataupun keesokan harinya. Biasanya hasil mereka menyadap nira ini digunakan untuk keperluan pribadi mereka termasuk untuk membeli tuak kembali yang harga jualnya sudah dua kali lipat dari harga beli tauke.

Sementara para ayah lebih banyak menggunakan hasil nira untuk keperluan pribadi, para perempuan sudah terbiasa menanam padi (hasilnya setiap 6 bulan sekali) untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Sekarang ini mereka juga memanfaatkan hasil coklat yang lebih menjanjikan untuk menambah penghasilan keluarga.

Status tanah disini amatlah keramat. Bagi mereka tabu untuk menjual tanah. Tanah bersifat adat, hanya untuk dibagikan turun temurun, tidak untuk dijual. Bila ada yang terpaksa harus menjual, biasanya mereka menggunakan prinsip gadai, sehingga bila suatu saat mereka memiliki harta, pemegang tanah tersebut harus rela tanahnya dibeli kembali oleh pemilik lama.

Hal itu juga berpengaruh pada besar pada tingkat kesejahteraan, ditambah juga faktor tradisi untuk memiliki anak banyak, tidak heran bila tanah adat banyak yang sudah habis dibagi. Apalagi bila mereka berasal dari marga kecil, tanah yang ada sudah tidak dapat menghasilkan lagi karena luas dan hasilnya yang semakin sedikit. Hal ini memaksa sebagian dari anak-anak mereka untuk pergi merantau. Dengan kata lain merantau dilakukan lebih karena keterpaksaan ketimbang faktor keingintahuan.

4.3.4. Sumber Daya Alam sebagai Mata Pencarian dan Keberlanjutannya

Telah diuraikan pada beberapa subbab sebelumnya, bahwa kecamatan Pahae Jae adalah daerah yang sangat subur. Berbagai sungai kecil mengalir di lokasi ini. Hal itu benar-benar menunjang suburnya tanah di kawasan ini. Kesuburan ini membuat masyarakat hidup dalam kemudahan, terutama pada generasi awal yang membuka lahan. Lahan ini pun dimanfaatkan sebagai perkebunan kopi, karet dan kemenyan. Kawasan ini pernah menjadi penghasil kemenyan terbesar dimasanya, namun dalam dua dasawarsa terakhir tanaman-tanaman perkebunan yang ada mulai tidak produktif bahkan kopi sudah tidak berkembang lagi.

Hal ini bukan disebabkan karena masalah tanah, melainkan karena keberlanjutannya yang kurang diperhatikan. Juga terkait dengan kearifan lokal yang mulai ditinggalkan. Pada kasus kemenyan, panen kemenyan yang seharusnya hanyalah

satu kali dalam setahun, namun mengingat uang yang dihasilkan dari kemenyan tersebut sangat banyak, maka masyarakat mengambilnya secara berlebihan. Dari satu kali masa panen dalam setahun, dipaksakan menjadi dua kali masa panen setahun. Selain dipaksakan untuk diambil hasilnya. Pohon Kemenyan dan juga karet tidak pernah diregenerasi, sehingga pohon-pohon yang usianya sudah tidak lagi produktif tetap dipaksakan untuk diambil sehingga hasil perkebunan tidak lagi optimal. Bila dahulu pemilik bisa memperoleh 40 kg sekali panen, kini hanya 4 kg saja.

Masyarakat enggan meregenerasi karena pohon-pohon tersebut sudah sejak dahulu dan hasilnya bisa mereka ambil terus menerus tanpa henti. Sementara bila meregenerasi mereka harus menunggu 3 tahun untuk bisa diambil hasilnya. Pada akhirnya mereka hanya bergantung pada pohon-pohon tua yang tidak produktif.

Pendeta J. Hasibuan memberi penjelasan singkat: "*mereka sabar menderita selamanya, tetapi hanya 3 tahun menunggu saja mereka tidak mau*". Jelasnya, masyarakat rela mengambil getah karet hingga ke akar-akar pohonnya dan bila sudah habis mereka hanya menunggu hingga pohon berisi kembali, padahal pohon memang sudah tidak produktif. Masyarakat tetap saja enggan mengganti dengan bibit baru yang hanya cukup menunggu 3 tahun untuk menghasilkan getah karet dan kemenyan secara produktif.

Selain karet dan kemenyan, tanaman lain yang tidak lagi produktif bahkan hampir menghilang adalah kopi. Dulu kopi merupakan salah satu hasil kebun utama selain kemenyan yang menghasilkan pendapatan sangat besar bagi petani. Kopi Pangaloan memiliki citra yang baik di masyarakat. Namun ketika suatu waktu didatangkan bibit baru yang dipromosikan dapat menghasilkan kopi lebih banyak dari pohon kopi yang ditanam sebelumnya, masyarakat sangat berhasrat untuk memperoleh hasil lebih. Kemudian masyarakat langsung mengganti seluruh tanaman lama yang ada dengan bibit baru tanpa lebih dahulu melakukan pengujian, dan ternyata yang terjadi adalah kegagalan panen. Kualitas dan kuantitas kopi yang bisa dihasilkan sangat jauh dari harapan, hal ini dikarenakan bibit yang baru tidak cocok dengan iklim dan kondisi tanah setempat. Sementara seluruh bibit lama yang ternyata jauh lebih baik telah habis disingkirkan saat menanam bibit kopi baru tersebut.

Kenyataan ini sangat mengkhawatirkan. Masyarakat setempat kurang memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam yang seharusnya menjadi andalan mata pencaharian mereka. Hal ini sangat disayangkan karena kearifan lokal yang seharusnya dijaga tidak dipertahankan. Dikhawatirkan hal ini juga merambat kepada kondisi lingkungan.

4.3.5. Sosial dan Politik

Hal-hal yang patut diperhatikan mengenai masalah sosial adalah masalah remigrasi dari orang-orang yang merantau juga adanya kebiasaan baru, yakni akibat dari menjamurnya kedai tuak. Akhir-akhir ini banyak arus balik terjadi dari orang-orang setempat yang merantau keluar Tapanuli. Berdasarkan wawancara-wawancara serta diskusi kelompok yang dilakukan, arus balik ini setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua:

1. Pertama, adalah arus balik para perantau yang sudah lama pergi, berumur dan ingin beristirahat. Jumlahnya tidak banyak namun membawa pengaruh yang sangat positif bagi daerah Pangaloan. Mereka umumnya sudah beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda dan memiliki pengalaman yang sangat banyak. Pengalaman-pengalaman mereka biasanya diterapkan kembali di daerah Pangaloan.

Contoh yang paling umum adalah memperkenalkan kamar mandi untuk MCK. Selain itu juga mereka memperkenalkan cara-cara baru dalam bercocok tanam, seperti pembuatan kompos, pola tanam yang teratur, menghitung pengeluaran secara tertata dan sebagainya. Namun mereka semua mengalami kesulitan untuk menularkan hal-hal yang lebih baik tersebut ke masyarakat. Biasanya yang terjadi adalah resistensi dan menganggap upaya tersebut terlalu mencampuri urusan keluarga lain. Sehingga hal itu membuat para perantau balik ini lebih pasif dan membiarkan masyarakat meniru saja dari jauh.

2. Kelompok kedua adalah arus balik dari perantau muda yang belum lama pergi dan kembali lagi karena belum sukses dan tertarik dengan berita akan berjalannya

kembali proyek PLTP Sarulla. Inilah yang berpotensi menjadi bibit masalah sosial baru.

Berita akan dimulainya kembali proyek PLTP Sarulla kini menyebar keseluruh perantauan yang berasal dari Kecamatan Pahae Jae. Mereka beranggapan bahwa proyek ini akan membutuhkan banyak pekerja. Meskipun kondisi eksisting tidak menunjukkan hal demikian, mengingat secara fisik proyek ini sudah ada dan hanya perlu untuk dioperasikan kembali. Namun berita sudah menyebar terlalu cepat sehingga ekspektasi masyarakat terlalu besar. Banyak perantau yang belum sukses akhirnya kembali dan berharap dapat diterima kerja nantinya di proyek PLTP. Yang menjadi masalah adalah jumlah dan kapabilitas masyarakat tersebut.

Ada yang mengestimasi, setidaknya terdapat lebih dari 100 perantau yang kembali lagi dari satu buah desa. Dan bila memang jumlahnya sedemikian besar, berarti dari 5 desa di Pangaloan saja bisa terdapat lebih dari lima ratus warga yang berpotensi menuntut lapangan pekerjaan. Belum lagi kapasitas pendidikan warga yang kembali tersebut hampir semuanya maksimal lulusan SMA. Dengan demikian tingkat persaingannya sangat ketat, karena kebutuhan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA juga terbatas.

Tuntutan otonomi daerah untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal, juga mengandung bibit permasalahan sosial yang tidak kecil menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh pihak pengelola proyek PLTP. Selain itu masalah juga dapat muncul akibat konflik kepentingan antar desa terhadap kehadiran kembali PLTP di kawasan tersebut. Konflik kepentingan ini disebabkan setiap desa merasa memiliki andil yang lebih besar dalam proyek PLTP tersebut terutama terkait lahan yang digunakan.

Masalah sosial lainnya adalah menjamurnya kedai tuak. Kedai tuak sudah sejak dulu ada, namun belakangan ini kehadirannya menjamur. Dahulu hanya ada kedai tuak tertentu untuk para orang tua dan ada pula yang dikhususkan untuk yang lebih muda, keduanya terpisah dan masih ada rasa segan dan rasa hormat yang tinggi terhadap penduduk yang lebih tua sehingga untuk melewati kedai tuak para orang tua pun mereka segan. Selain itu, mereka pun masih menjaga faktor adat dalam meminum tuak, dimana tuak diminum untuk kesehatan. Sekarang kedai tuak bebas bagi siapa saja untuk datang.

Hampir tidak ada lagi batasan dalam meminumnya. Jika dahulu paling banyak hanya dua gelas, kini sudah lazim mereka meminumnya hingga tiga sampai lima gelas. Ini membuat mabuk-mabukan menjadi agak umum saat ini. Orang-orang tua pun mengakui bahwa hal tersebut sudah tidak bisa dikontrol. Bagi mereka, generasi dibawahnya sekarang sudah tidak bisa dilarang. Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa.

Tingginya arus informasi baik melalui televisi juga melalui hal-hal lain termasuk yang berasal dari sebagian perantau balik telah membawa pengaruh luar dan lama kelamaan mengikis rasa hormat generasi muda terhadap yang tua. Pihak gereja sendiri kini lebih berupaya mengendalikan generasi dibawahnya, yakni generasi remaja dan anak-anak, dengan harapan generasi ini masih bisa dibentuk karakternya.

Selain itu perlu diperhatikan juga masalah politik yang berkembang akhir-akhir ini. Kelima desa di daerah Pangaloan ditambah satu desa lagi yakni Desa Siompu Tolu, berniat untuk memekarkan diri menjadi Kecamatan baru yakni kecamatan Pangaloan Pahae Tonga. Begitu pula keempat desa di Kecamatan Pahae Julu yang berada di kawasan PLTP juga memiliki niat serupa. Khusus daerah Pangaloan ini, proposal pengajuannya sudah dilakukan dan sudah dibentuk panitianya. Pemekaran kecamatan-kecamatan baru ini juga dimaksudkan untuk memekarkan diri menjadi Kabupaten baru di daerah Pahae memisahkan diri dari kabupaten Tapanuli Utara.

4.3.6. Budaya dan Agama

Faktor Adat Budaya memang menjadi masalah tersendiri. Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, bagi masyarakat Pangaloan, adat memiliki posisi paling vital dalam kehidupan masyarakatnya, jauh lebih vital dari agama. Tradisi upacara adat masih rutin dilakukan, bahkan ada pernyataan beberapa warga yang merasa justru malah semakin sering terjadi dan berlebihan sehingga semakin kental nilai komersilnya sementara inti dari adat sendiri sudah mulai tergerus. Inilah yang menjadi masalah, nilai-nilai adat yang seharusnya berperan besar menyejahterakan masyarakat justru kini malah kental dengan nilai-nilai komersil didalamnya.

Pendeta Panggabean dari gereja HKBP, menyesalkan fungsi lembaga adat setempat saat ini, dimana adat yang sebenarnya malah semakin ditinggalkan. Pada saat ini menerima adat malah berarti membayar adat, dalam kata lain, adat telah dikomersilkan. Pada beberapa hal adat malah menjadi faktor penyebab kemiskinan. Sebagai ilustrasi pertama, berdasarkan pernyataan informan yang merupakan warga pendatang (dari luar adat), menurutnya untuk masuk ke dalam adat mereka diharuskan melakukan beberapa upacara adat terlebih dahulu yang menghabiskan biaya jutaan rupiah, bila ini tidak dilakukan mereka dianggap tidak beradat.

Bagi seorang pendatang yang menetap mau tidak mau perlu untuk melakukan, karena merupakan cara agar tidak dianggap melanggar adat oleh para tetua masyarakat setempat, meskipun sebenarnya masyarakat pada umumnya tidak memperlmasalahkannya. Setelah diterima secara adat, mau tidak mau disetiap upacara-upacara adat, sebagai minoritas ia harus terlibat dan ikut menyumbangkan bagian dalam upacara. Kebiasaan ini lama kelamaan kini menjadi kewajiban walaupun sebenarnya adat tidak menuntut demikian.

Ilustrasi lainnya adalah pada peristiwa kematian, menurut beberapa informan, ketika seseorang meninggal maka sesuai adat anaknya harus memotong seekor Kerbau, meskipun kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Bila si anak berasal dari marga kecil, maka mereka harus memberikan daging kerbau yang sudah dipotong untuk dibagikan pada marga-marga besar yang diterima oleh tetua marga besar tersebut. Belum lagi kebiasaan untuk mendirikan monumen di atas orang yang meninggal, terkadang monumen jauh lebih bagus dari rumahnya.

Hal ini juga berdampak pada agama. Mempertahankan keberadaan agama di sini menjadi tantangan besar bagi para pemuka agama setempat. Masyarakat cenderung lebih menganggap agama yang mengikuti adat bukan adat yang mengikuti agama. Keberadaan agama hanya untuk formalitas. Menghadiri kebaktian di gereja pada hari minggu pun tidak rutin dilakukan oleh masyarakat. Hanya kaum perempuan dan anak remaja yang rutin dan rajin mengikutinya.

Peran gereja sendiri sebenarnya sangat positif, namun karena tanggapan dari para tetua adat sering bertentangan, akhirnya membuat gereja menjadi sulit berbuat sesuatu

untuk masyarakat. Sudah beberapa kali gereja dianggap penghalang adat, dan beberapa kali para pemuka agama diminta untuk diganti hanya karena pemuka gereja tidak mau mengikuti dan bertentangan dengan kemauan para tetua adat. Pengaruh gereja sangat besar terutama hanya bagi perempuan dan anak remaja.

4.3.7. Dampak Modernisasi

Seiring dengan berkembangnya zaman, pengaruh modernisasi yang masuk ke kawasan Pangaloan sangat deras. Banyak hal yang menjadi penyebabnya, antara lain karena letak desa yang berada di jalur lintas barat Sumatera, hal ini memudahkan warga untuk pergi merantau ke selatan Sumatera dan ke pulau Jawa dan kembali lagi dengan mudah pula. Selain itu pengaruh teknologi terutama televisi juga membawa pengaruh modernisasi yang sangat besar bagi keluarga. Kemajuan zaman ini sayangnya tidak dapat dibendung pengaruhnya dan memunculkan *culture shock*.

Sebagaimana banyak daerah lainnya di Indonesia, *culture shock* telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai di masyarakat setempat dan menghilangnya kearifan lokal. Salah satu contoh adalah Tradisi meminum tuak. Adalah suatu tradisi bagi masyarakat Batak untuk memberi tuak bagi para tamu undangan di setiap upacara adat. Pada awalnya tuak hanya diminum pada saat perayaan-perayaan karena rasanya yang manis memberikan simbol pengharapan kehidupan yang manis dan indah. Selain itu tuak juga dianggap baik untuk kesehatan karena dianggap mampu mengembalikan energi.

Di era 1970an, kedai-kedai tuak belum menjamur sebagaimana saat ini. Kedai tuak biasanya khusus orang tua dan tidak melayani yang muda. Selain itu yang muda pun enggan untuk masuk karena rasa hormat yang sangat tinggi pada orang-orang tua (keberadaan orang tua sendiri sangat dihormati dan disegani). Seiring dengan perkembangan zaman, generasi yang lebih muda melihat hal ini secara berbeda. Tuak berubah menjadi alat mabuk-mabukan. Menurut pendapat seorang narasumber (pemilik kedai satu-satunya yang tidak menjual tuak), pengaruh urban begitu besar sehingga pemuda-pemuda sangat terpengaruh. Hal ini timbul terutama dikarenakan televisi dan beberapa pemuda lokal yang merantau kemudian kembali lagi karena berharap bekerja di PLTP, mereka membawa kebiasaan di Kota ke desa. Begitu pula menurut Pendeta dari

Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) daerah Pangaloan, sebagian dari warga yang kembali dari rantau (walaupun tidak semua) membawa tren dan mode dari kota dan desa dan ditiru oleh rekan sebayanya di desa. Dampak terparah dari ini semua adalah kebiasaan mabuk-mabukan. Hal ini membuat keberadaan kedai tuak mulai menjamur, meskipun di sisi lain hal ini juga menjadi berkah bagi para penyadap getah nira.

Dampak pengaruh modernisasi ini amat terasa, sebagaimana seorang petani berusia 78 tahun mengungkapkan kekecewaannya: "*anak muda sekarang sudah tidak bisa diajari, mereka sudah tidak hormat pada orang tua*", padahal dalam tradisi mereka orang tua selama ini sangat disegani. Sayangnya dalam keluarga muda, pendidikan anak kurang diperhatikan. Anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dasar untuk mendidik sikap mereka. Ayah mereka jarang berada dirumah karena pergi ke kebun dan bersantai di kedai tuak, sementara ibu mereka bekerja sepanjang hari di sawah, dan di malam hari sudah disibukkan dengan pekerjaan rumah tangganya. Setiap tindakan rewel anak selalu dihadapi dengan memberikannya uang untuk jajan atau dengan menyuruh mereka menonton TV hingga larut malam, pelajaran mereka di sekolah nyaris tidak diperhatikan. Kebiasaan ini membuat pola hidup sang anak berubah, mereka menjadi terbiasa dengan pola hidup konsumtif dan rasa hormat mereka pun berkurang. Sekali lagi modernisasi telah merubah kearifan lokal setempat dan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru di masyarakat yang tidak dibarengi dengan kesiapan masyarakat menghadapinya (*culture shock*).

4.4. Kelembagaan di Masyarakat

Yang dimaksudkan kelembagaan di masyarakat disini adalah seberapa besar kemampuan masyarakat membangun lembaga mereka sendiri sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Atas dasar hal tersebut, dalam penelitian ini diuraikan seberapa besar pengaruh institusi-institusi normatif yang ada di masyarakat dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat.



Gbr.4.1. Bagan Kelembagaan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dilakukan, diperoleh gambaran bahwa secara umum terdapat beberapa institusi yang berperan sebagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan terhadap kesejahteraan masyarakat di lokasi penelitian, antara lain: lembaga adat, kepala desa, perangkat desa lainnya, gereja, sekolah atau guru, puskesmas pembantu, pihak berwajib (polsek dan koramil), kecamatan, kedai minum, masyarakat di rantau dan Pengelola PLTP. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan berdasarkan peranannya secara gender juga menguraikan satu persatu peran masing-masing *stakeholders* di masyarakat secara keseluruhan dalam subbab berikutnya.

Bila dilihat secara gender, pola peran kelembagaan masyarakat setempat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dilihat dari sudut pandang laki-laki, peran lembaga yang ada dalam masyarakat adalah sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.



Gbr. 4.2. Bagan Peran Kelembagaan Masyarakat Berdasarkan Gender (laki-laki)

Hal yang menarik dalam peran kelembagaan di masyarakat bagi laki-laki, adalah adanya peran yang besar dari kedai minum. Kedai minum baik yang menjual tuak ataupun tidak, sudah menjadi tempat yang rutin dikunjungi oleh kaum laki-laki baik di siang maupun malam hari. Mereka biasa berkumpul disana hampir setiap hari. Selain berbincang, mereka juga sering memutuskan hal-hal penting di pertemuan kedai, termasuk didalamnya memutuskan hal-hal yang bersifat adat.

Selain itu, masih ada lembaga lain yang penulis anggap penting peranannya bagi masyarakat laki-laki, yakni PLTP. Meskipun saat ini belum ada aktivitas yang signifikan, namun harapan dari sebagian masyarakat laki-laki untuk dapat bekerjasudah terlanjur besar. Hal ini patut diperhatikan karena bila nanti PLTP ini berjalan, maka akan banyak masyarakat yang menuntut peran lebih dari PLTP baik untuk memperkerjakan mereka atau setidaknya membantu perekonomian warga setempat.

Bila dilihat dari sisi perempuan, peran lembaga yang ada dalam masyarakat adalah sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.



Gbr. 4.3. Bagan Peran Kelembagaan Masyarakat Berdasarkan Gender (Perempuan)

Hal yang menarik dalam peran kelembagaan di masyarakat bagi perempuan, adalah adanya peran yang besar dari Gereja. Hal ini tidak terjadi pada laki-laki dan ini memang diakui oleh para pendeta yang bertugas disana. Selama ini program-program gereja lebih banyak dan rutin diikuti oleh kaum perempuan, remaja dan anak kecil. Menurut mereka para perempuan lebih mudah untuk diberikan pengaruh nilai-nilai positif. Gereja sendiri telah melakukan banyak hal untuk membantu memperbaiki kesejahteraan keluarga, antara lain dengan memberi contoh perilaku hidup bersih, cara beternak yang baik hingga keterampilan. Namun hal-hal itu masih sebatas berpengaruh bagi kaum perempuan dan anak remaja.

Yang perlu pula mendapat perhatian adalah peran puskesmas pembantu. Meskipun hanya dipegang oleh seorang bidan dan beberapa orang kader yang membantu, namun kepercayaan kaum ibu setempat sudah muncul dan saat ini para ibu sudah mulai

memberanikan diri memeriksakan dirinya atau anaknya bila terserang penyakit dan membawa balitanya pada saat posyandu.

4.4.1. Peran Lembaga yang ada Dalam Masyarakat

4.4.1.1. Lembaga Adat

Pihak yang paling berpengaruh secara kelembagaan di masyarakat setempat adalah lembaga adat. Adat seakan menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Sebagaimana telah diuraikan dalam subbab 4.3.6. diatas, peran lembaga adat sangatlah berpengaruh melebihi perangkat desa dan gereja.

Lembaga adat dapat dikatakan menentukan segala hal dalam masyarakat, namun besarnya peran ini justru malah lebih banyak dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara adat yang bersifat formalitas. Kenyataannya lembaga adat sebagai satu-satunya institusi yang memiliki kapabilitas yang nyata untuk menggerakkan warga tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat, menurut beberapa informan justru malah tidak berjalan. Banyak kearifan lokal yang ditinggalkan warga terutama dalam hal pertanian dan lembaga adat sama sekali tidak bergeming sementara pihak lain yang berniat positif merubah hal ini tidak bisa masuk kedalam masyarakat.

4.4.1.2. Kepala Desa dan Perangkat Desa

Peran Kepala desa juga berpengaruh, namun dalam keseharian lebih dikarenakan mereka juga terkadang berperan sebagai tetua adat dan dalam beberapa hal justru seringkali kepala desa bertindak sendiri tanpa diikuti masyarakat. Hal itu tampak pada kegiatan gotong royong yang pernah dilakukan kepala desa Pandomuan Nainggolan beberapa tahun yang lalu, dimana masyarakat hanya melihat dan bekerja di sawah masing-masing tanpa memedulikan.

Kepala desa bisa mempengaruhi masyarakat secara lebih baik bila ia melibatkan lembaga adat untuk ikut memutuskan, sebagai contoh kesepakatan adat untuk tidak mencuri, dan yang melanggar dikenakan sanksi moral. Aksi ini pun dituruti masyarakat hingga saat ini. Menurut salah seorang kepala desa, kesepakatan ini mampu berjalan

karena sanksi adat berlaku dan melanggar adat merupakan aib yang sangat besar bagi keluarga. Sanksi yang diberikan adalah mengarak si pelaku berkeliling desa, dimana si pelaku harus mengakui perbuatannya secara berulang melalui pengeras suara.

Kepala desa sendiri pada akhirnya lebih banyak berfungsi dalam hal administratif desa, termasuk pembagian bantuan pemerintah sementara fungsi perangkat desa hampir tidak ada, karena seluruh rutinitas pekerjaan publik di desa sudah dapat dikendalikan oleh kepala desa, sehingga para pemegang jabatan desa lainnya menjadi kurang bertanggung jawab dengan jabatannya (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Polmas, dan Badan Perwakilan Desa).

4.4.1.3. Gereja

Peran gereja sebagaimana diungkap sebelumnya berpengaruh terutama di kalangan perempuan dan anak remaja, sementara bagi kaum tua dan laki-laki biasanya kurang berpengaruh. Bagi kaum tua dan laki-laki, berangkat ke gereja lebih merupakan kebanggaan untuk bisa berpakaian bagus, bahkan ada beberapa yang menganggap tidak ada gunanya pergi ke gereja. Padahal di kawasan Pangaloan terdapat banyak gereja. Gereja yang paling berpengaruh dan memiliki jemaat terbanyak adalah Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI).

Ketika peneliti mengajukan pertanyaan seberapa besar harapan gereja untuk dapat merubah tatanan desa setempat. Pendeta GKPI maupun pendeta HKBP menyatakan hal yang sama. Keduanya mengakui sulit untuk merubah kaum tua dan laki-laki setempat, namun keduanya mengungkapkan adanya harapan yang besar dari kaum perempuan dan anak remaja untuk berubah, kegiatan gereja saat ini lebih banyak diikuti oleh kaum perempuan dan remaja. Hal ini menunjukkan peran institusi gereja cukup berpengaruh bagi anak remaja dan kaum perempuan di daerah tersebut.

4.4.1.4. Sekolah Dasar dan Guru

Ada hal yang sangat bertolak belakang antara partisipasi pendidikan dasar dan respon orang tua setempat namun disinilah peran sekolah dasar dan guru menjadi sangat besar.

Seperti telah diketahui, partisipasi pendidikan di daerah Pangaloran ini sangatlah tinggi, rata-rata mereka adalah lulusan SMA, dan tidak ada remaja yang putus sekolah hingga tingkat SMA. Namun yang memprihatinkan ternyata orang tua tidaklah terlalu peduli dengan pendidikan dasar sang anak.

Menurut beberapa guru sekolah dasar dan juga beberapa informan lainnya, orang tua cenderung tidak peduli dengan keadaan pendidikan sang anak selama bersekolah. Bagi mereka, semenjak anak masuk SD, tanggung jawab mereka sudah dibagi dengan gurunya. Bagi mereka anak mereka adalah anak guru juga, sehingga tidak ada perhatian dari orang tua mengenai prestasi sang anak ataupun cara si anak belajar di rumah. Ketika ditanyakan kepada sang anak, apakah orang tua mereka menanyakan nilainya, sang anak menjawab bahwa orang tuanya tidak pernah bertanya.

Hal terkait lainnya yang juga memprihatinkan adalah kurang diperhatikannya kondisi sang anak oleh orang tua. Hal ini terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana kedua orang tua cenderung sibuk bekerja sehingga perilaku keseharian anak termasuk kualitas gizi dan kesehatannya otomatis kurang diperhatikan. Disinilah peran sekolah dasar dan guru menjadi sangat besar. Perilaku keseharian anak otomatis dikontrol oleh sekolah. Pihak sekolah mendidik mereka mandiri sejak dini, mulai dari cara mandi hingga menalikan sepatu. hal ini menunjukkan cukup besarnya peran Sekolah Dasar dalam merubah perilaku kesehatan keluarga.

4.4.1.5. Puskesmas Pembantu (Pustu)

Pustu sudah cukup berperan di masyarakat meskipun tidak besar. Sehari-harinya Pustu dikelola oleh seorang bidan dan dokter hadir setiap seminggu sekali. Pustu yang dilengkapi dengan pondok bersalin desa (Polindes) ini lebih berperan pada fungsi kuratif ketimbang promotif preventif. Fungsi promotif preventif seperti penyuluhan agak sulit berjalan, oleh karenanya penyuluhan lebih dilakukan secara informal dari mulut ke mulut. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat akan kesehatan keluarga dan lingkungan masih rendah.

Namun untuk kesehatan ibu dan anak, Pustu sudah cukup berpengaruh, kini masyarakat sudah percaya pada keberadaan bidan meskipun masih terdapat dukun beranak. Begitu pula pemberian imunisasi yang sudah banyak diikuti warga. Tetapi masih banyak masyarakat terutama kaum laki-laki yang enggan untuk berobat ke Pustu bila mengalami sakit, hal ini juga terjadi pada warga yang sudah berusia tua.

4.4.1.6. Masyarakat di Rantau

Peran masyarakat di rantau amat menarik. Setidaknya ada dua kelompok perantau, pertama adalah para perantau yang sukses, kedua adalah perantau tua yang kembali karena sudah ingin beristirahat dan ketiga adalah perantau muda yang kurang sukses dan kembali lagi. Namun ketiga kelompok ini memiliki pengaruh yang berbeda. Kedua kelompok pertama diharapkan dapat memberi dampak yang positif bagi penduduk dengan menunjukkan etos kerja yang lebih baik bagi masyarakat, demikian pendapat para guru, namun pada kenyataannya sesuai pengakuan para perantau kelompok pertama dan kedua juga beberapa informan lainnya, sudah banyak hal yang mereka lakukan untuk merubah masyarakat setempat secara langsung, namun tidak berpengaruh. Hal ini disebabkan masyarakat yang cenderung bebal, bagi mereka perantau itu tidak perlu ikut campur, karena mereka merasa sudah hidup dalam kondisi yang cukup baik dalam pandangan mereka.

Sebagai ilustrasi, seorang putra setempat yang berhasil menjadi ahli pertanian, pernah melakukan penyuluhan penanaman coklat secara besar-besaran bagi warga setempat, pada kenyataannya tidak ada warga yang mau mengikutinya sehingga hanya 10 keluarga yang mengikuti dan mau menanam secara teratur. Saat ini keluarga-keluarga tersebut menjadi petani coklat yang cukup sukses.

Satu-satunya cara yang tepat adalah dengan melakukan sendiri hal yang positif dan membiarkan masyarakat iri dan menirunya diam-diam. Hal inilah yang dilakukan oleh salah seorang Kepala Desa yang sebelumnya merupakan warga yang merantau dan kembali lagi karena sudah tua dan ingin beristirahat. Bapak Kades tersebut menunjukkan contoh kepada masyarakat dengan mempercantik halaman depan rumahnya, mencatnya dan menanam banyak tanaman berbunga. Hal ini secara perlahan diikuti beberapa warga

di sekitar rumahnya yang sebelumnya boleh dikatakan hampir tidak pernah merawat bagian depan rumahnya.

Salah seorang perantau yang telah kembali lagi, memberikan contoh dengan menanam coklat secara teratur di halaman rumahnya. Ketika ia sukses memperoleh hasil yang banyak dari menanam coklatnya, banyak warga yang melirik dan ikut menanam coklat secara teratur, dimana sebelumnya coklat tidak pernah diurus, hanya ditanam sembarangan dan diambil hasilnya hanya untuk sampingan. Ia juga bertani sawah secara teratur, memperhatikan pola tanam dan pemupukan secara teratur serta membuat perhitungan biaya untung rugi. Dengan hal ini ia membuat iri warga yang jarang mendapatkan untung dari menanam sawah.

Hal lainnya yang mereka masih belum berhasil merubah salah satunya adalah membuat MCK di rumah, padahal upaya ini terus dilakukan namun tidak juga membawa perubahan. Hal ini terjadi karena masyarakat masih menganggap keberadaan MCK di rumah masih belum terlalu penting dan biayanya terlalu mahal.

Sementara untuk kaum perantau yang terakhir, yakni perantau muda yang belum sukses kemudian kembali lagi ke Pangalooan membawa dampak yang berbeda. Mereka memperkenalkan banyak hal baru pada warga seusianya dan remaja-remaja setempat. Dampak yang dibawa antara lainnya adalah sikap mereka yang lebih urban karena pengaruh pergaulan di kota besar, hal ini berpengaruh pada kaum muda setempat yang mulai menjadikan mereka role model. Hal inilah yang dikhawatirkan akan membawa pengaruh budaya urban yang negatif dan menggerus kearifan lokal.

4.4.1.7. Kecamatan, Koramil dan Polsek

Peran kecamatan juga kurang terasa oleh masyarakat karena masyarakat merasa terlalu jauh hubungannya dengan kecamatan. Pada umumnya kepala desa yang lebih banyak berhubungan dengan kecamatan. Hal inilah yang juga menyebabkan masyarakat ingin melepaskan diri dan membentuk kecamatan baru di Pangalooan. Untuk berhubungan dengan kecamatan masyarakat harus menuju kota Sarulla di selatan yang berada di luar kawasan Pangalooan.

Peran Koramil dan Polsek yang berada di Sarulla juga dipandang banyak pihak kurang terasa perannya, hal ini mungkin lebih disebabkan keamanan desa-desa di Pangaloan yang cenderung sangat kondusif, aman dan terkendali sehingga tidak memerlukan peran Koramil dan Polsek secara besar.

4.4.1.8. Pengelola PLTP

Peran PLTP boleh dikatakan hampir tidak ada, selain karena tidak beroperasi juga karena belum menyangkut kehidupan masyarakat secara langsung. Tetapi ekspektasi masyarakat akan peran PLTP saat ini sangatlah besar, hal ini dikarenakan masyarakat ikut memiliki PLTP tersebut yang berada di atas tanah adat mereka. Dengan demikian apabila PLTP mulai beroperasi kembali dapat dipastikan perannya amat diharapkan oleh masyarakat setempat terutama dalam hal lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan.

4.4.1.9. Kedai Minum

Meskipun kedai minum (baik yang menjual tuak ataupun tidak) bukanlah suatu lembaga formal, namun peranannya sudah mulai melembaga di masyarakat setempat. Fungsinya tak sekedar tempat minum biasa, tetapi juga berperan sebagai tempat pertemuan rutin para kaum laki-laki, bahkan untuk bermusyawarah adat. Peran kedai minum sebagai tempat berkumpul sudah terjadi sejak lama dan dari waktu ke waktu menjadi rutinitas kaum laki-laki setempat untuk mengunjunginya hampir setiap hari.

4.4.2. Peran Lembaga Keluarga

Diatas telah diuraikan pengaruh beberapa institusi yang terdapat di desa setempat terhadap kesejahteraan keluarga. Atas dasar pembahasan tersebut dan dinamika masyarakat saat ini, maka perlu pula dilihat peran keluarga itu sendiri secara internal dalam mengelola manusia yang berada didalamnya.

Fungsi-fungsi normatif yang dijadikan indikator pemenuhan kesejahteraan keluarga berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan PP nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang mencakup fungsi-fungsi dasar keluarga yakni: fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi atau wirausaha dan fungsi pembinaan lingkungan. Atas dasar penelitian dilapangan, fungsi dan peran keluarga yang sangat vital diatas tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Bila dilihat dari fungsi keagamaan, tampak jelas bahwa peran keluarga tidaklah utuh, fungsi ini kurang berjalan sempurna karena agama tidak menjadi nilai kehidupan keluarga yang utama. Namun bukan berarti fungsi agama tidak berjalan. Fungsi agama tetap berjalan meskipun sifatnya masih sekadar formalitas. Kesadaran beragama dalam keluarga mulai tumbuh melalui kaum perempuan dan remaja. Di beberapa rumah warga biasa tampak telah terpasang simbol-simbol agama Kristen, hal ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa kesadaran beragama sebenarnya sudah ada.

Fungsi adat budaya sebagaimana pembahasan pada subbab sebelumnya, memang sangat kuat pengaruhnya. Begitu pula dalam lembaga keluarga, fungsi budaya mengakar dengan kuat. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan hampir dari seluruh informan yang menyatakan bahwa budaya adalah nomor satu. Keberadaan adat budaya sangat mempengaruhi lembaga keluarga terutama dalam pelaksanaan upacara-upacara formal yang benar-benar ditaati secara penuh. Hal ini sepenuhnya menyangkut prestise keluarga di mata masyarakat, ini sepenuhnya mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga.

Pada kenyataannya fungsi budaya yang sebenarnya sudah mulai tergerus dengan menghilangnya banyak kearifan lokal. Fungsi budaya yang berkembang saat ini dalam keluarga sebenarnya lebih berupa kebiasaan yang melembaga karena budaya yang spesifik tidak terlalu kentara terlihat dalam keseharian mereka. Contoh kebiasaan yang melembaga adalah kebiasaan meminum tuak dalam keluarga. Tuak dahulu masih dianggap sumber kesehatan yang baik untuk memulihkan tenaga. Saat ini nilai-nilai tuak telah berubah menjadi gaya hidup dalam keluarga dan lagi-lagi berpengaruh pada menurunnya kualitas keluarga.

Fungsi cinta kasih. Fungsi ini terkesan klise, namun secara nyata fungsi ini berperan besar dalam keluarga setempat. Nilai-nilai cinta kasih mulai tergerus dengan

berkurangnya perhatian orangtua terhadap anak. Sudah menjadi pemandangan yang biasa bila kita melihat anak-anak berkeliaran di siang hari tanpa dikontrol orang tua.

Beberapa informan guru SD menyatakan bahwa orang tua sepanjang hari memang tidak berada dirumah. Sang ibu biasanya berada di sawah hingga sore hari bahkan hingga pukul 6 sore. Sementara sang ayah setelah menyadap nira di pagi hari biasanya akan menunggu hasil sadapannya terkumpul pada sore hari di kedai tuak. Hal ini membuat anak tidak diperhatikan.

Pada malam hari ketika anak seharusnya diperhatikan untuk belajar, justru sang ibu sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya dan sang ayah lagi-lagi berada di kedai tuak menikmati hasil sadapannya. Bila sang anak rewel dan menangis sang ibu atau ayah biasanya memberi uang pada sang anak untuk jajan atau menyuruhnya menonton TV hingga larut malam. Hal ini pula yang membentuk pola hidup konsumtif pada sang anak. Hal ini terus berulang setiap harinya dan dikhawatirkan membentuk pola hidup baru yang melembaga dan berdampak tidak baik bagi kesejahteraan keluarga.

Fungsi perlindungan, dari sisi proteksi terhadap fisik anggota keluarga sangat berjalan dan memiliki peran yang sangat vital. Hal ini dikarenakan kehidupan keluarga yang sebenarnya sangat introvert dan memiliki *bonding* yang sangat kuat didalamnya. Ini juga terjadi pada keluarga besarnya. Hal ini membuat mereka sangat melindungi keberadaan anggota-anggota keluarganya meskipun itu adalah saudara jauh.

Menurut pernyataan salah seorang narasumber perantau sukses di Jakarta dan narasumber lainnya yang merupakan warga setempat, juga beberapa tokoh masyarakat lainnya, menyatakan bahwa alasan anggota keluarga merantau bukan karena jiwa merantaunya yang tinggi tetapi lebih karena desakan menyambung hidup karena tanah yang sudah mulai habis dibagi. Mereka pun ketika merantau selalu berusaha mencari keluarga terdekat untuk dijadikan tempat menetap. Hal ini dengan alasan agar mereka tetap terlindungi. Hal ini menunjukkan betapa fungsi perlindungan anggota keluarga menjadi hal yang sangat vital bagi masyarakat setempat.

Tapi dalam hal perlindungan kesehatan, hal ini masih perlu dipertanyakan, meskipun mereka sangat protektif terhadap anggota keluarganya yang sakit (biasanya mereka enggan keluarga yang sakit dijenguk dan berusaha mengobati anggota keluarga

yang sakit dengan segala cara), tampak bahwa kesadaran mereka tentang penanganan kesehatan secara preventif melalui pola hidup sehat masih sangat rendah. Meski demikian sudah ada peningkatan kesadaran keluarga terhadap pentingnya perlindungan kesehatan ibu dan anak.

Dilihat dari fungsi reproduksi, fungsi tersebut dalam keluarga setempat tidak berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan, budaya “Anakoki Hamaraon Diao” atau “anakku adalah kehidupan bagiku” sangat dipegang kuat. Hal inilah yang menghambat berjalannya program KB di kawasan tersebut. Rata-rata setiap keluarga memiliki lebih dari tiga anak. Dan tidak jarang ada keluarga yang memiliki lebih dari enam anak. Hal ini pulalah yang mendorong semakin habisnya lahan garapan dan membuat sebagian anak-anak mereka bermigrasi.

Dari sudut fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pendidikan dianggap berharga untuk meningkatkan status keluarga. Namun sayangnya pendidikan masih dianggap sebagai prestise dan belum menjadi kebutuhan mendasar untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan keluarga. Hal ini tampak dari tidak membaiknya kualitas keluarga meskipun seluruh keluarga berpendidikan minimal SMP dan seluruhnya mampu membaca dan menulis.

Fungsi ekonomi atau wirausaha juga belum berjalan sebagaimana mestinya. Bila dilihat dari fungsi ekonomi, keluarga belum mampu keluar dari subsistensi yang selama ini terjadi. Roda perputaran ekonomi hanya berputar di lingkup sawah dan kebun, itupun dengan proses yang masih sederhana tanpa ada upaya pemberian nilai tambah. Hal ini tampak pada hasil tani yang tidak menguntungkan dan hasil kebun kemenyan yang tidak tetap akibat tidak pernah diperbaharui lebih dari 3 generasi, selain itu mereka bertumpu juga pada hasil dari menyadap nira untuk tuak yang biasanya sudah habis begitu saja di kedai tuak oleh sang ayah.

Fungsi kewirausahaan tidak berjalan. Ekonomi keluarga setempat tampaknya belum sampai pada tahap tersebut. Hal ini tampak dari tidak adanya hasil produksi rumah tangga diluar hasil tani dan kebun. Juga dari tidak adanya koperasi yang memadai. Usaha-usaha kecil yang ada baru sebatas kedai-kedai tuak dan warung kelontong, belum ada bentuk wirausaha keluarga yang menjual produk setempat secara kreatif.

Terakhir adalah fungsi pembinaan lingkungan dalam keluarga. Hal ini pun perannya masih patut dipertanyakan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kondisi rumah setempat. Biasanya pekarangan rumah tidak berpagar dan tidak ada rumput terawat. Selokan biasanya sudah tidak ada atau sudah tertimbun tanah dan sampah hingga tidak terlihat. Kebersihan lingkungan pekarangan rumah benar-benar tidak terjaga. Begitu juga dengan kondisi rumahnya. Jarang ada rumah yang terawat, biasanya tembok atau kayu sudah terkelupas dan menghitam. banyak rumah kayu yang sudah tidak layak huni dikarenakan sudah miring dan kayunya sudah lapuk. Yang paling vital adalah tidak adanya sumber air bersih didalam rumah dan tidak adanya MCK padahal daerah ini amat kaya dengan air bersih. Penggunaan kali sebagai sarana MCK sangat memprihatinkan hingga kali tidak lagi digunakan sebagai sumber air bersih.

Atas dasar uraian diatas dapat dikatakan fungsi dasar keluarga di daerah Pangalooan ini belum terpenuhi sebagaimana mestinya, masih banyak fungsi yang belum berperan dengan baik, baru sebatas fungsi pendidikan dan perlindungan yang dapat dikatakan tidak mengkhawatirkan dan berperan baik dalam peningkatan kesejahteraan keluarga setempat. Sementara fungsi-fungsi lainnya belum bisa dipenuhi dan belum bisa berperan dengan baik dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

4.4.3. Modal Sosial Masyarakat Setempat

Tabel 4.4. Tipologi Modal Sosial Masyarakat Pangalooan

<i>Bonding</i>	<i>Bridging</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Keterikatan keluarga dan adat yang sangat ketat • cenderung membedakan antara orang luar adat dan dalam adat • resisten menerima perubahan • kurang akomodatif terhadap pihak luar bila pihak luar hendak melakukan perubahan. • Solidaritas kelompok tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Altruistik dan rasa kemanusiaan tinggi

Berdasarkan pada pengelompokan diatas, pemetaan yang penulis lakukan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Pangaloan memiliki keterikatan keluarga dan adat yang sangat ketat, mereka cenderung membedakan antara orang luar adat dan dalam adat. Orang luar yang masuk menetap mereka harapkan untuk diadatkan atau dimasukkan kedalam adat. Begitu pula bila mereka merantau, mereka akan berusaha mencari dan tinggal di keluarga terdekat atau setidaknya orang yang memiliki hubungan keluarga dengan si perantau.

Bila dilihat dari kemampuan menerima perubahan, masyarakat Pangaloan cenderung resisten. Seperti telah diuraikan sebelumnya, sulit bagi suatu keluarga untuk menerima intervensi dari luar meskipun itu masih ada hubungan relasi dengan mereka. Baginya keluarga mereka masih lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat memang sulit menerima arus perubahan dan kurang akomodatif terhadap pihak luar bila pihak luar hendak melakukan perubahan.

Mereka juga memiliki solidaritas yang tinggi sesama kelompok. Hal ini ditunjukkan setiap upacara adat, upacara kematian maupun perkawinan, seluruh masyarakat datang dan turut membantu melakukan upacara. Meskipun demikian masyarakat setempat tetap memiliki sikap altruistik dan kemanusiaan yang tinggi, ini ditunjukkan dengan sikap mereka yang mau membantu orang lain meskipun itu orang luar.

Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa fungsi *Bonding* sebagai modal sosial di daerah Pangaloan sangatlah kuat, sementara fungsi *bridging* tidak dominan. Menurut Hasbullah (2006) pada masyarakat *bonding* (*inward looking*) ini modal sosial terbatas pada satu dimensi saja yakni kohesifitas masyarakatnya yang baik. Kohesifitas ini terbentuk karena faktor kerekatan hubungan emosional yang kuat disebabkan pola nilai yang melekat. Kelompok ini sulit untuk keluar dari pola kehidupan yang telah turun temurun menjadi kebiasaan. Di negara-negara berkembang, pola ini memang terjadi di organisasi pedesaan yang tradisional. Sayangnya, menurut Rachbini (2007) masyarakat yang memiliki *bonding* yang kuat namun memiliki kemampuan *bridging* lemah cenderung sulit untuk bekerjasama, resisten pada pihak luar dan mudah untuk timbul

sikap tidak saling percaya karena bila ada pihak yang berinteraksi dengan pihak luar mengenai kepentingan tertentu dapat dianggap melawan kelompok dalam.

Dengan demikian modal sosial yang dimiliki masyarakat Pangaloan masih satu dimensi yakni terbatas pada kohesifitas masyarakatnya yang kuat. Sementara modal sosial lain masih lemah. Hal ini akan menyebabkan masyarakat sulit untuk maju berkembang bila tidak dibarengi dengan upaya perubahan dari dalam melalui peningkatan interaksi dengan kelompok luar dan peningkatan arus informasi masuk kedalam dengan demikian modal sosial akan tumbuh dengan kuat. Hal ini sudah terjadi pada kaum remaja di daerah Pangaloan melalui televisi dan diimbangi dengan peran gereja sebagai penyeimbang arus informasi yang masuk dan pembuka jalur sikap toleran dan akomodatif terhadap pihak luar.

4.5. Identifikasi Permasalahan Umum

Atas dasar uraian gambaran umum kondisi di tempat penelitian, dapat ditarik beberapa masalah terkait kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat dan menjadi perhatian dalam penelitian ini. Antara lain:

- Masalah Sanitasi. yakni ketidakberadaan MCK di sebagian besar rumah.
- Masalah reproduksi dimana KB kurang diminati. Jumlah anak dalam keluarga yang banyak ditambah kondisi rumah yang tidak terawat.
- Masalah pola hidup laki-laki. Usia harapan hidup laki-laki yang jauh lebih rendah dari perempuan, penyebab utama adalah kebiasaan meminum tuak yang semakin parah.
- Pendidikan dalam keluarga. kurangnya peranan orang tua dalam pembinaan anak didalam keluarga.
- Peran Perempuan yang sangat dominan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga namun tersubordinasi.
- Sebagian besar Kondisi fisik rumah dan pekarangan yang kurang terawat
- pola tanam sawah dan kebun yang tidak teratur.

- status tanah yang bersifat adat dan tabu untuk menjualnya.
- Tren Kedai Lapo Tuak yang meningkat pesat jumlahnya.
- Tingginya arus balik dari perantauan, terutama karena ada ekspektasi yang besar dari kehadiran kembali proyek PLTP.
- Perbedaan kepentingan antar desa terutama menyangkut kehadiran Proyek PLTP dan isu pemekaran wilayah Pangaloan menjadi kecamatan baru terpisah dari kecamatan Pahae Jae dan pemekaran menuju kabupaten baru terpisah dari Kabupaten Tapanuli Utara.
- Arus informasi, terutama melalui televisi menyebabkan *culture shock*.
- Pengaruh adat yang cukup besar di masyarakat namun kurang berperan dalam peningkatan kesejahteraan, sementara di sisi lain peran agama menjadi inferior setelah adat. Tetapi perannya sangat besar terhadap perempuan dan anak remaja.
- Kemauan masyarakat yang rendah untuk berubah dari kondisi saat ini. Sementara pihak lain sulit untuk masuk ke dalam keluarga, karena mereka cenderung resisten terhadap perubahan dan menganggap pihak lain tidak perlu ikut campur terhadap urusan keluarganya, meskipun itu masih saudara dekat
- Seluruh masalah diatas pada akhirnya berujung pada tingkat kesejahteraan keluarga yang rendah di kawasan Pangaloan.

Di sisi lain, pada pembahasan bab 4 mengenai dinamika dalam pemenuhan fungsi-fungsi keluarga, dapat diidentifikasi bahwa hanya fungsi sosialisasi pendidikan dan perlindungan terkait proteksi anggota keluarga yang dapat dikatakan terpenuhi.

Kemudian pada pembahasan mengenai kelembagaan dalam masyarakat, diketahui bahwa masyarakat setempat kurang memiliki kemampuan *bridging* untuk mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik tampak pula lembaga adat sebagai lembaga yang paling memiliki pengaruh belum berbuat apa-apa untuk mendorong perubahan. Dengan demikian terlihat bahwa akar masalah di kawasan ini berujung pada kemampuan warganya sendiri untuk mendorong perubahan.

BAB 5

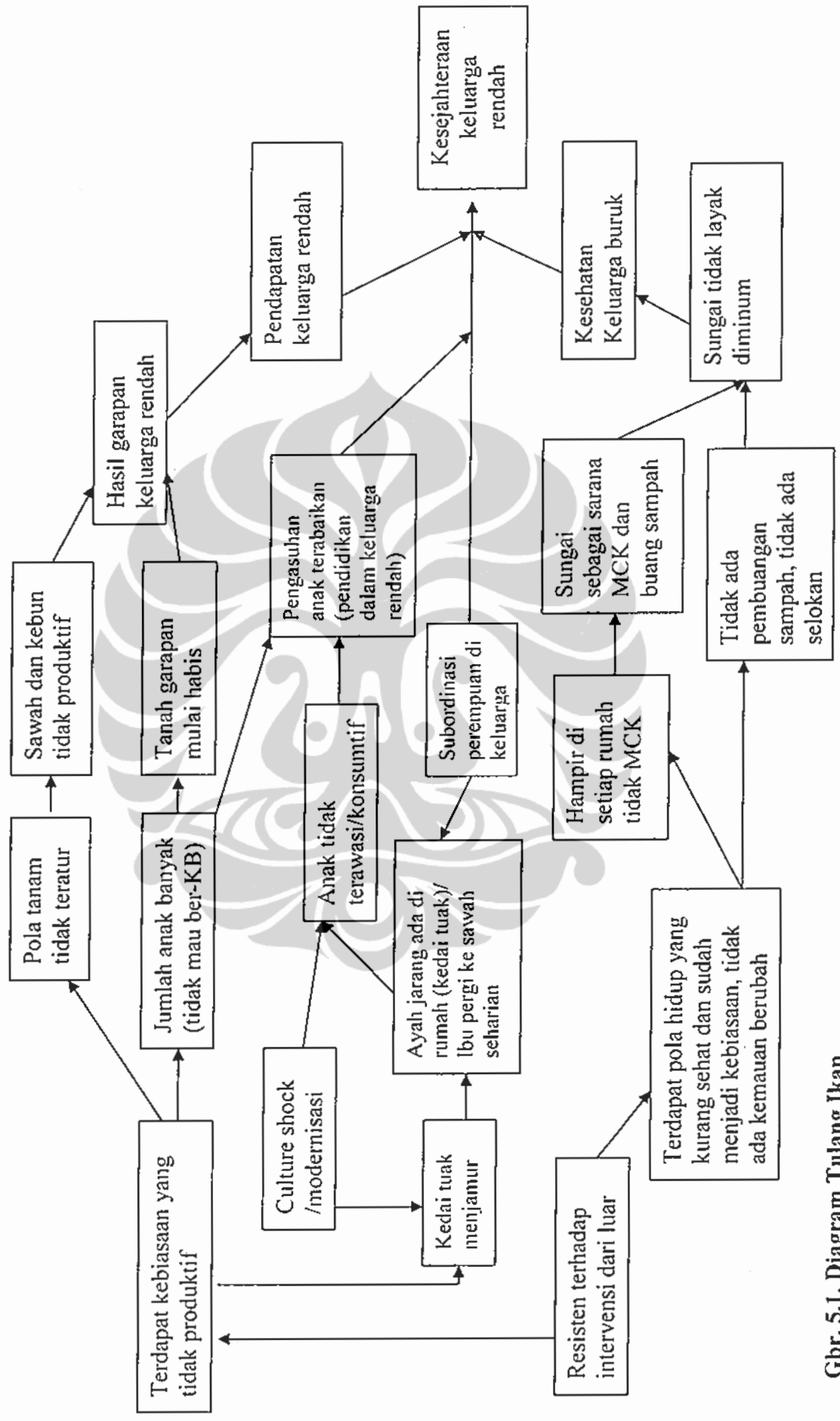
ANALISA SWOT

5.1. Akar Masalah

Atas dasar uraian gambaran umum kondisi di tempat penelitian, dapat ditarik beberapa dimensi masalah terkait kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat dan menjadi perhatian dalam penelitian. kemudian digunakan sebagai dasar dalam menganalisa potensi peningkatan kesejahteraan keluarga setempat.

Di sisi lain, pada pembahasan bab 4 mengenai dinamika dalam pemenuhan fungsi-fungsi keluarga, dapat diidentifikasi bahwa hanya fungsi sosialisasi pendidikan dan perlindungan terkait proteksi anggota keluarga yang dapat dikatakan terpenuhi. Kemudian selanjutnya pada identifikasi mengenai pola kelembagaan dalam masyarakat, diketahui bahwa masyarakat setempat kurang memiliki kemampuan *bridging* untuk mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik tampak pula lembaga adat sebagai lembaga yang paling memiliki pengaruh belum berbuat apa-apa untuk mendorong perubahan. Dengan demikian terlihat bahwa akar masalah di kawasan ini berujung pada kemampuan warganya sendiri untuk mendorong perubahan serta sikap resistensi terhadap upaya perubahan dari luar.

Untuk memperoleh gambaran mengenai akar masalah tersebut dapat dilihat secara skematis pada gambar diagram tulang ikan (gambar 5.1) di bawah ini. Diagram tersebut digunakan sebagai patokan dalam menganalisa SWOT untuk melihat potensi peningkatan kesejahteraan keluarga setempat kedepannya terutama terkait pada analisa terhadap masalah utama yang dapat dijadikan fokus penanganan yang akan dituangkan dalam skenario rencana aksi pada bab bab 6 .



Gbr. 5.1. Diagram Tulang Ikan

5.2. Analisa SWOT

Atas dasar identifikasi permasalahan diatas, untuk memperoleh gambaran potensi ke depan dan strategi yang bisa dikembangkan maka dilakukan analisa SWOT dengan matriks sebagaimana terlampir dalam lampiran 3. Secara ringkas sebagai berikut:

5.2.1. *Strenghts*

Berdasarkan klasifikasi SWOT yang dilakukan dilapangan (terlampir), dapat disimpulkan bahwa kekuatan yang utama sebenarnya adalah modal sumber daya manusia, alam dan infrastruktur yang sebenarnya sudah cukup lengkap dan baik. Beberapa poin kekuatan desa-desa di Pangaloan adalah:

- Tingkat Buta Huruf 0%
- Minat dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan anak tinggi; prioritas utama.
- Kerelaan orang tua untuk mencari uang demi pendidikan anak
- Akses pendidikan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya PAUD Gereja, terdapat SD Negeri, terdapat perpustakaan desa, terdapat TK/SMP/SMA Negeri dan Swasta milik Gereja tidak jauh dari desa
- Biaya pendidikan dasar gratis untuk anak sekolah dan terdapat guru PNS/ bantu/honor di desa
- Dukungan yang kuat dari kepala desa dan gereja
- Kandungan tanah yang sangat subur
- Sumber pengairan yang sangat melimpah
- Lokasi yang strategis, di tepi lintas barat Sumatera yang sangat baik untuk distribusi
- Terdapat struktur pemerintahan desa meskipun sederhana, kemauan
- Kelembagaan adat yang sangat kuat pengaruhnya
- Jumlah gereja yang cukup banyak dengan fasilitas memadai
- Peran gereja yang berpengaruh kaum perempuan dan remaja

- Perantau sukses memiliki kemauan kuat baik secara moral maupun materiil untuk merubah kebiasaan di desanya, dan perantau yang sudah berumur kembali ke desa dan memberi contoh etos kerja yang tinggi

Berkaca kepada kekuatan-kekuatan yang dimiliki daerah Pangaloan, tampak bahwa masyarakat setempat sebenarnya sudah memiliki Infrastruktur berupa sumber daya fisik, sumber daya alam dan sumber daya institusi yang sangat memadai untuk digunakan sebagai modal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

5.2.2. Weakness

Terkait dengan kelemahan, terdapat beberapa kelemahan mendasar yang terdapat di kawasan tersebut, antara lain:

- Pemanfaatan sumber daya air tidak dilakukan dengan bijak
- Sungai-sungai kecil dijadikan tempat MCK sehingga kualitas rendah
- Warga mengandalkan air minum dari 5 kran Air Minum umum yang bersumber dari mata air, karena sungai yang tidak layak minum dan Ph sumur-sumur warga rendah sehingga tidak bisa diminum.
- Pemanfaatan bangunan pemandian umum rendah karena jarak;
- Kebiasaan masyarakat membuang kotoran di sungai dan pekarangan;
- Pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga masih lemah; dibakar atau dibuang ke sungai kecil atau aliran air di belakang rumah
- Kotoran ternak tidak terpisah
- Bak sampah hampir tidak ada
- kondisi fisik sebagian besar rumah warga tidak terawat, baik fisik dalam rumah maupun luar rumah.
- Penggunaan kayu sebagai dinding tidak terawat karena harga minyak untuk melapisinya semakin tinggi.
- Kurang terjaganya kebersihan rumah dan pekarangannya.

- Pemeliharaan ternak belum dipisah dengan pengelolaan rumah tangga
- Puskesmas Pembantu dan Polindes belum ada pada semua desa;
- Tidak setiap desa/dusun memiliki petugas kesehatan, walaupun ada kapasitasnya hanya sebagai bidan desa sehingga petugas kesehatan merangkap tugas di beberapa desa/dusun
- Pembinaan anak dalam keluarga rendah, orang tua kurang membina anaknya dirumah karena sibuk (ibu dan bapak sudah berangkat dr rumah di pagi hari ke ladang dan kebun dan kembali di sore hari)
- Belum adanya aktivitas PAUD yang berjalan secara rutin dan resmi sebagai alternatif pembinaan anak dalam keluarga.
- Minat belajar dan minat baca sebagian siswa rendah (faktor televisi); Perpustakaan desa tidak berjalan
- Minimnya fasilitas belajar di rumah, khususnya masalah penerangan.
- Kesejahteraan dan perhatian terhadap guru umumnya sangat kurang;
- Kebiasaan bertani tanpa perhitungan ekonomis
- Ketidakarifan dalam pengelolaan tanaman perkebunan
- Subordinasi yang tinggi terhadap perempuan
- Peran Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Polmas, dan Badan Perwakilan Desa nyaris tidak berfungsi. Beban yang dipegang seorang kepala desa terlalu besar
- Masih kalahnya pengaruh pemerintah desa dibandingkan lembaga adat
- Lembaga adat mengarah pada nilai-nilai komersil dan kurang responsif terhadap masalah kesejahteraan keluarga
- rendahnya respon warga terhadap upaya perubahan dari gereja dan perantau yang berusaha memperbaiki perilaku
- Perantau muda yang belum sukses kembali lagi membawa pengaruh urban dan malah menjadi rolemodel yang dengan mudah menularkan kebiasaan baru ke masyarakat lokal dan menggerus kearifan lokal

Tampak bahwa hampir seluruh kelemahan berkaitan dengan perilaku dan pola hidup warga sehari-hari terutama terkait masalah kesehatan. Namun hal ini juga terkait dengan kelemahan mendasar daerah ini adalah pemahaman nilai yang masih rendah.

5.2.3. *Opportunities*

- Sumber Air yang melimpah sangat potensial untuk dimanfaatkan secara maksimal
- Kemauan perangkat desa (kepala desa) untuk merintis fasilitas lingkungan
- Keberadaan gereja sebagai sumber penyuluhan bagi ibu, anak-anak dan remaja juga pintu yang baik untuk merubah pola hidup desa termasuk pola perilaku hidup sehat
- Kebutuhan MCK Umum oleh warga masyarakat sangat tinggi, terutama untuk mandi dan cuci
- Masih adanya tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan pada Pustu di dusun/desa, masih aktifnya bidan desa untuk terus mempromosikan kesehatan meskipun secara informal serta perannya meningkatkan kapasitas pengetahuan dukun kampung
- Mulai tumbuhnya kesadaran ibu untuk mulai menjaga kesehatan anak.
- Sikap dan kebiasaan yang mengutamakan tingkat pendidikan anak sebagai prestise merupakan peluang besar untuk menciptakan perubahan dalam cara hidup
- Peran guru sekolah dasar yang besar, dapat menjadi peluang besar dalam mengubah pola perilaku hidup generasi selanjutnya di desa tersebut, masih tingginya kemauan guru untuk melakukan perubahan perilaku warga dan masih adanya harapan tinggi para guru bahwa murid-muridnya dapat lebih maju
- Fasilitas sekolah yang ada masih dapat dikembangkan dan dimanfaatkan, serta keberadaan perpustakaan desa dapat dijadikan peluang peningkatan kapasitas pendidikan warga
- Kemauan kuat kepala desa untuk memperbaiki administrasi desa dan kondisi desa meskipun hanya dibantu segelintir warga

- Adanya upaya penguatan jejaring hubungan gereja dengan perangkat desa maupun beberapa warga masyarakat terutama para perantau yang kembali dan beretos kerja tinggi untuk merubah kebiasaan warga secara komprehensif

Melihat peluang yang ada diatas, hampir seluruh peluang berkaitan dengan komitmen infrastruktur institusi yang tinggi seperti kepala desa, Bidan Desa, warga yang merantau sukses dan beretos kerja tinggi, guru-guru dan gereja. sementara sedikit sekali peluang yang timbul dari dalam masyarakat sendiri.

5.2.4. Threats

- Menyalurkan air bersih ke rumah-rumah warga terhambat ketidakmampuan dan kurangnya kemauan warga.
- Sikap warga yang acuh dan sulit menerima pendapat lain.
- Penanganan sampah belum menjadi prioritas masalah bagi masyarakat pada umumnya dan belum ada kebijakan yang dikeluarkan Pemda Kecamatan/Desa untuk pengelolaan sampah. Belum ada sistem pengelolaan sampah.
- Anggapan orang tua bahwa pendidikan dasar adalah tanggung jawab sekolah
- Anggaran untuk pengembangan fasilitas sekolah untuk tiap dusun amat terbatas;
- Tidak ada peningkatan kapasitas guru oleh pemerintah, sehingga menghambat guru dalam memperbaiki kualitas materi pengajaran
- Pembangunan Polindes dan penambahan petugas kesehatan merupakan tanggung-jawab dan kewenangan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten;
- Pemberlakuan penempatan tenaga kesehatan seperti bidan desa/polindes hanya satu pada tiap desa, sementara wilayah desa luas/akses terbatas/dusun tersebar;
- Sikap keluarga yang introvert, kurang akomodatif dan terkadang masih tertutup sehingga sulit untuk melakukan tindakan promotif, preventif maupun kuratif. Sikap keluarga yang bebal dan *introvert*.

- Tidak adanya kemampuan wirausaha keluarga untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian keluarga
- Sikap masyarakat yang menganggap bantuan dari pemerintah atau dari pihak luar adalah untuk dihabiskan bukan untuk dimanfaatkan secara berlanjut. Selain itu bantuan masih sangat terbatas.
- Pembinaan yang diberikan tidak secara intensif dan tidak dilengkapi dengan kegiatan pendampingan.
- Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tidak sebesar kepercayaan terhadap lembaga adat
- Kurangnya dukungan tokoh masyarakat adat terhadap tindakan positif gereja dan partisipasi perantau sukses terhadap pembangunan desa

Dapat dikatakan hambatan yang paling fundamental adalah kemauan warganya sendiri untuk berubah. Bila dikaitkan dengan analisis modal sosial pada subbab sebelumnya, jelas sekali bahwa kohesivitas masyarakat yang sangat kuat ternyata malah menjadi hambatan yang nyata bagi proses peningkatan kesejahteraan keluarga di kawasan Pangaloan.

5.2.5. Kondisi Eksisting dan Potensi Masalah Kedepan

Sebagaimana telah diurai pada subbab 4.3., bila dilihat dari dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini, upaya pemenuhan kesejahteraan keluarga di kawasan Pangaloan masih belum tampak terjadi. Masih banyak yang berpotensi menjadi masalah kedepannya. Masalah terbesar terkait faktor kesehatan lingkungan, baik sarana MCK, air bersih maupun kebersihan lingkungan. Selanjutnya adalah masalah pola asuh anak dan pola hidup konsumtif pada anak. Lalu masalah peran perempuan yang dominan namun tersubordinasi, masalah rendahnya kemauan kepala keluarga, masalah pemanfaatan perkebunan dan keberlanjutannya, peran adat yang superior dan gereja yang inferior, ekspektasi warga atas keberadaan PLTP, adat yang komersial, hingga masalah *culture shock*. Namun bila disimpulkan berdasarkan pada faktor-faktor SWOT, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Dilihat dari hasil identifikasi SWOT, dari sisi kekuatan dan peluang yang ada, sepenuhnya kawasan ini bergantung kepada faktor modal sumber daya alam, infrastruktur dan institusi desa yang memang sudah cukup baik. Dilihat dari modal SDA, tanah yang subur dan tanaman-tanaman yang potensial secara ekonomis sudah dimiliki. Secara fisik, desa memiliki infrastruktur dasar yang sebenarnya sudah lengkap, baik dari fasilitas kesehatan, pendidikan, distribusi dan sebagainya. Hanya sanitasi dan air bersih yang benar-benar menjadi masalah, itupun lebih bergantung pada kemauan warga sendiri. Dari sisi institusi desa, hampir seluruh tatanan institusi *stakeholders* yang ada di desa memiliki kemauan kuat untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan warganya, sayangnya ini kurang didukung oleh lembaga adat yang tidak responsif terhadap masalah kesejahteraan keluarga padahal lembaga adat merupakan stakeholder yang paling berpengaruh di masyarakat.

Terakhir, bila dilihat dari sisi kelemahan dan hambatan, justru kelemahan dan hambatan terbesar datang dari warganya sendiri, yakni tidak adanya kemauan untuk berubah, hal ini terkait dengan lemahnya modal sosial yang mereka memiliki terutama tidak adanya rasa mutual trust. Hal ini menunjukkan potensi perubahan kedepan amat bergantung kepada kemauan warga untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan keluarga mereka.

Sebagai catatan, Bila dilihat dari peran kelembagaan yang ada di dalam masyarakat, lembaga adat tampak memegang pengaruh yang sangat besar sebagai motor di masyarakat. sementara perangkat desa tidak sebesar lembaga adat pengaruhnya. Begitu pula gereja, pengaruh gereja hanya pada kaum ibu dan remaja. Sementara sekolah, guru berpengaruh pada keluarga terutama pada pola asuh anak, dan sarana kesehatan pengaruhnya sebatas pada kesehatan ibu dan anak. Yang menarik adalah peran PLTP yang saat ini sebenarnya tidak ada sama sekali, tetapi terdapat ekspektasi yang sangat besar pada masyarakat bahwa PLTP akan berperan sangat besar terutama dalam memberikan mata pencaharian alternatif bagi warga. Sementara di sisi lain warga yang sukses merantau berusaha untuk berperan besar dalam masyarakat, kenyataannya tidak disambut positif oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat dan gereja seharusnya dapat menjadi sarana untuk menggerakkan modal sosial masyarakat.

5.3. Penentuan Prioritas Masalah dan Alternatif Solusi atas Masalah

Atas dasar pembahasan SWOT tersebut dapat ditentukan beberapa prioritas masalah yang harus segera ditangani berdasarkan pertimbangan masalah tersebut, potensi masalah untuk menjadi lebih besar, frekuensi masalah itu terjadi dan dampaknya terhadap banyak orang. Bila dilihat dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, prioritas masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Kekuatan

Berkaca kepada kekuatan-kekuatan yang dimiliki daerah Pangaloan, tampak bahwa masyarakat setempat sebenarnya sudah memiliki Infrastruktur berupa **faktor modal sumber daya alam yang sangat baik, infrastruktur yang cukup memadai dan beberapa perangkat institusi desa memiliki kemauan baik.**

sumber daya fisik, sumber daya alam dan sumber daya institusi yang sangat memadai ini sangat potensial untuk digunakan sebagai modal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Kelemahan

Tampak bahwa hampir seluruh kelemahan berkaitan dengan perilaku dan pola hidup warga sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan mendasar daerah ini adalah pada berbagai faktor yang terkait pada upaya **pemenuhan kualitas kesehatan keluarga dan lingkungan yang rendah. Pola pembinaan anak dalam keluarga yang rendah, subordinasi perempuan yang sebetulnya berperan sangat dominan, serta pemahaman nilai yang masih rendah.**

Peluang

Melihat peluang yang ada diatas, **hampir seluruh peluang berkaitan dengan komitmen pengelola institusi yang tinggi** seperti kepala desa, Bidan Desa, warga yang merantau sukses dan beretos kerja tinggi. guru-guru dan gereja. sementara sedikit sekali peluang yang timbul dari dalam masyarakat sendiri.

Tantangan

Dapat dikatakan tantangan yang paling fundamental adalah kemauan warganya sendiri untuk berubah. Bila dikaitkan dengan analisis modal sosial pada subbab sebelumnya, jelas sekali bahwa kohesivitas masyarakat yang sangat kuat ternyata malah menjadi hambatan yang nyata bagi proses peningkatan kesejahteraan keluarga di kawasan Pangaloan. Hal tersebut menyebabkan rasa mutual trust yang rendah terhadap pihak luar.

Atas dasar tersebut dapat ditentukan bahwa terdapat beberapa prioritas masalah yang harus segera diatasi, yakni:

- masalah kesehatan keluarga dan lingkungan,
- masalah pendidikan anak dalam keluarga,
- subordinasi terhadap perempuan dalam keluarga
- masalah modal sosial yang rendah dikarenakan berupa kohesivitas yang terlalu kuat, rasa mutual trust yang rendah, rendahnya kemauan warga untuk berubah dan pemahaman nilai yang berbeda.

Masalah-masalah yang terkait pemenuhan kesejahteraan secara ekonomi, seperti mata pencaharian, pendapatan yang rendah, pola tanam kebun maupun pengelolaan ekonomi keluarga juga merupakan hal yang penting namun tidak menjadi prioritas untuk ditangani terlebih dahulu dikarenakan sektor pemenuhan ekonomi keluarga menjadi domain laki-laki untuk pengambilan keputusannya sehingga cenderung akan menimbulkan resistensi.

Setelah penentuan prioritas permasalahan tersebut, dilakukan analisa secara lebih mendalam untuk diperoleh alternatif solusi yang dapat mengatasi permasalahan untuk kemudian dituangkan dalam skenario rencana aksi. Analisa tersebut diuraikan sebagai berikut.

5.3.1. Masalah Kesehatan Keluarga dan Lingkungan

Saat ini yang menjadi kendala dan harus diperhatikan di kawasan ini adalah kesehatan keluarga terutama terkait lingkungan, dalam hal ini masalah air dan sanitasi. Rata-rata rumah sama sekali tidak memiliki fasilitas MCK. Rumah yang memiliki fasilitas MCK biasanya hanya terdapat di rumah-rumah keluarga yang sudah pernah merantau lama dan berkeluarga di luar Tapanuli, dan mereka sudah sadar akan pentingnya sanitasi. Masyarakat pada umumnya masih mengandalkan aliran sungai, kali, selokan dan irigasi yang ada untuk seluruh keperluan MCKnya. Hal ini dikarenakan air yang memang melimpah. Bahkan rumah yang agak jauh dari aliran air lebih memilih untuk menggunakan halaman kebun sebagai sarana kakus. Diperlukan solusi terkait fasilitas sanitasi, warga tidak menggunakan sumber air yang sama dengan MCK. Mereka sadar akan hal tersebut. Selain itu sumber air dari sumur juga kurang layak untuk diminum karena kadar Ph yang dibawah standar air minum. Pada umumnya warga mengandalkan berbagai mata air yang bersumber dari bukit sekitar namun lokasinya cukup jauh untuk ditempuh. Mata air tersebut dahulu masih alami dan tradisional, tetapi beberapa tahun yang lalu terdapat bantuan dari dunia usaha berupa penampungan air dan pipa yang menghubungkan mata air dari penampungan ke setidaknya 5 titik keran air yang tersebar di tepi jalan umum di beberapa desa.

Selain itu masalah besar lainnya adalah kebersihan lingkungan, baik itu pekarangan rumah, kebersihan ternak maupun pengelolaan sampah. Pekarangan maupun fisik sebagian besar rumah cenderung tidak terawat. Begitu pula dengan ternak warga juga tidak terawat dengan baik, Ketidakberadaan sistem maupun fasilitas pengelolaan sampah bersama yang sederhana menjadi kendala. Selain itu juga kebanyakan selokan sudah tidak berfungsi bahkan tidak ada karena sudah tertutupi oleh tanah dan sampah.

Sanitasi sendiri amat penting untuk diatasi karena amat terkait dengan kesehatan dan kemiskinan. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak merupakan salah satu target MDGs yang harus diselesaikan di tahun 2015. WHO (sebagaimana dikutip dari www.targetmdgs.org) menguraikan bahwa anak-anak secara khusus berisiko terhadap penyakit bersumber air seperti diare, dan penyakit akibat parasit. Kurangnya sanitasi juga meningkatkan risiko Kejadian Luar Biasa kolera, tifoid, dan disentri.. Situasi ini akan

menjadi parah bila dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga memberikan tekanan bagi kesehatan masyarakat dan berdampak pada kemiskinan.

Solusi yang dapat ditawarkan adalah pengadaan fasilitas sanitasi yang layak, terletak dekat dengan rumah warga dan dapat digunakan secara bersamaan, hal ini sebagai alternatif bagi warga ketimbang menggunakan kali atau sungai untuk sarana MCK. Mengenai pilihan jenis fasilitas sanitasi sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik suatu kawasan, geografi dan topografi, ketersediaan lahan, dan jalan akses. Faktor-faktor tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menawarkan teknologi kepada masyarakat. Setelah pilihan-pilihan teknologi itu tersaring dengan faktor-faktor tersebut, biarkan masyarakat menentukan secara partisipatif. Selain itu Untuk menunjang sarana air minum dan masak, perlu ditambahkan titik keran air sehingga jaraknya tidak terlalu jauh dan disesuaikan dengan kebutuhan warga saat ini.

Namun untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat, menurut Bloom sebagaimana dikutip dari Rahardjo (1997) untuk meningkatkan derajat kesehatan ada 4 faktor yang sangat berpengaruh, yaitu faktor gizi, faktor lingkungan, faktor perilaku dan faktor genetik serta faktor lain yaitu intervensi secara kuratif. Oleh karenanya selain upaya intervensi melalui penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih tetap diperlukan upaya promotif preventif melalui penyuluhan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terutama kepada kaum ibu sebagai pengelola keluarga. Upaya ini sendiri dapat ditambahkan kedalam materi pelaksanaan posyandu yang selama ini telah dilakukan secara rutin, dengan demikian terjadi peningkatan dalam materi kegiatan posyandu dengan ditambahkan materi penyuluhan PHBS bagi para ibu peserta Posyandu.

5.3.2. Masalah Pendidikan dalam Keluarga

Dengan berkurangnya perhatian orangtua terhadap anak, nilai-nilai yang dipahami anak akan berkurang. Di lokasi penelitian anak-anak sering berada diluar rumah tanpa kontrol orang tua. Orang tua sepanjang hari memang tidak berada dirumah. Sang ibu biasanya berada di sawah hingga sore hari bahkan hingga pukul 6 sore. Sementara sang ayah setelah menyadap nira di pagi hari biasanya akan menunggu hasil sadapannya terkumpul pada sore hari di kedai tuak. Hal ini membuat kualitas anak tidak diperhatikan.

Pada malam hari ketika anak seharusnya diperhatikan untuk belajar, justru sang ibu sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya dan sang ayah lagi-lagi berada di kedai tuak menikmati hasil sadapannya. Bila sang anak rewel dan menangis sang ibu atau ayah biasanya memberi uang pada sang anak untuk jajan atau menyuruhnya menonton TV hingga larut malam. Hal ini pula yang membentuk pola hidup konsumtif pada sang anak. Hal ini terus berulang setiap harinya dan dikhawatirkan membentuk pola hidup baru yang melembaga dan berdampak tidak baik bagi kesejahteraan keluarga.

Hal ini sangat bertolak belakang antara partisipasi pendidikan dasar dan respon orang tua dimana partisipasi pendidikan di daerah Pangaloran ini sangat tinggi, tetapi perhatian orang tua terhadap kualitas anak rendah. Menurut beberapa guru sekolah dasar dan juga beberapa informan lainnya, orang tua cenderung tidak peduli dengan keadaan pendidikan sang anak selama bersekolah. Hal ini terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana kedua orang tua cenderung sibuk bekerja sehingga perilaku keseharian anak kurang diperhatikan. Hal inipun akhirnya akan berdampak pada kualitas kesehatan sang anak.

Permasalahan yang dihadapi bukan pendidikan formal tetapi pendidikan informal didalam keluarga. Anak-anak menjadi terbiasa hidup sendiri tanpa perhatian dan bersikap konsumtif karena tidak ada yang mengontrol di rumah. Televisi menjadi makanan sehari-hari anak dan mereka juga bebas bermain tanpa ada yang mengendalikan. Terkadang masalah gizi pun ada yang terabaikan. Hal ini memang tidak terjadi di semua keluarga, namun sudah mulai menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Yang dikhawatirkan adalah bila hal ini terus menerus berlangsung akan berdampak pada pola hidup sang anak di kemudian hari. Hal inilah yang harus diantisipasi dan menjadi prioritas penanganan masalah.

Menurut Sayidiman Suryohadiprojo (2007), pada dasarnya pendidikan dilakukan di lingkungan keluarga, dalam masyarakat dan melalui sistem sekolah. Karena setiap manusia bermula kehidupannya dengan dilahirkan ibunya dalam lingkungan keluarganya, maka dapat dikatakan bahwa Pendidikan di Lingkungan Keluarga menjadi landasan segenap usaha pendidikan sepanjang hidup manusia.

Menurutnya, Pendidikan dalam Keluarga adalah tanggungjawab orang tua, dengan peran Ibu lebih banyak. Karena Ayah biasanya pergi bekerja dan kurang ada di rumah, maka hubungan Ibu dan anak lebih menonjol. Meskipun begitu peran Ayah juga amat penting, terutama sebagai tauladan dan pemberi pedoman, Oleh karena hubungan Ayah dan anak relatif terbatas waktunya, terutama di hari kerja, maka Ayah harus mengusahakan agar pada hari libur memberikan waktu lebih banyak untuk berhubungan dengan anak. Makin banyaknya jumlah Ibu-bekerja (*working mother*) menimbulkan persoalan tidak sedikit bagi pendidikan anak. Oleh sebab itu gejala yang makin meluas tentang Ibu-bekerja tidak harus ditolak, tetapi dicari jalan agar tidak terjadi kekurangan yang fatal untuk pendidikan.

Salah satu alternatif solusi untuk mempersiapkan pendidikan non formal untuk menyiapkan perilaku anak dalam keluarga adalah melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurut Susilawati (2007), PAUD adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan PAUD adalah membantu mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan fisik, intelektual, emosional, moral dan agama secara optimal dalam lingkungan pendidikan yang kondusif, demokratis dan kompetitif.

Dengan konsep PAUD tersebut penanganan masalah pendidikan anak didalam keluarga dapat terbantu terutama untuk menyiapkan kondisi sang anak sebelum bersekolah. Kebijakan penyediaan program ini di kawasan Pangaloan sebaiknya berasal dari pemerintah daerah terutama terkait upaya fasilitasi sumber daya manusia melalui pelatihan kader. Kegiatan PAUD ini pada awalnya diharapkan dapat dikenalkan pada saat pelaksanaan Posyandu sehingga masuk menjadi salah satu materi tambahan bagi anak di posyandu dan dapat dilakukan setelah anak selesai diperiksa. Kegiatan ini selanjutnya dapat diformalkan melalui pengembangan fungsi gereja sebagai sarana PAUD tersebut.

Namun selain itu tetap diperlukan penyuluhan pada orang tua. Melalui penyuluhan ini diharapkan orang tua, terutama ibu dapat memahami pentingnya pendidikan dalam keluarga. Materi penyuluhan ini juga dapat disampaikan sebagai

tmabahan materi penyuluhan terhadap para ibu pada saat posyandu dilakukan, ataupun secara berkala disampaikan pada saat khotbah gereja dilakukan.

5.3.3. Subordinasi terhadap Perempuan dalam Keluarga

Perempuan di Kawasan ini memang menjadi ujung tombak dalam rumah tangga dikarenakan mereka bekerja secara penuh dari pagi hingga sore bekerja di sawah. Hal ini sudah menjadi rutinitas. Pada umumnya mereka telah berangkat ke sawah di pagi hari dan beristirahat sebentar untuk makan (makan dibawa sendiri dari rumah) di siang hari dan kemudian langsung kembali bekerja. Sore hari mereka kembali ke rumah untuk mengolah coklat yang sudah dikeringkan dan mengurus rumah.

Perempuan setempat mengalami *multiple burden*, disebabkan sangat besarnya peran perempuan dalam rumah tangga. Disatu sisi ibu harus mengurus rumah tangga namun ibu juga harus bekerja di sawah kemudian di setiap pekan harus membawa hasil kebun (coklat) ke pasar pekan sehingga pendidikan anak di rumah cenderung terabaikan. Sementara dari sisi ayah, selain sibuk juga di kebun, pada waktu luang sebagian dari mereka lebih sering berada di kedai tuak untuk berkumpul dengan rekan-rekan sebayanya. Anak-anak pada akhirnya menjadi tanpa perhatian dan bersikap konsumtif karena tidak ada yang kontrol di rumah. Beban mengurus anak ini terkadang juga malah bergeser menjadi tanggungan anak perempuan di keluarga. Belum lagi adanya perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki juga berpengaruh pada sikap anak.

Di satu sisi perempuan mengalami *multiple burden*, karena beban rumah tangga yang sangat besar, tetapi di sisi lain hak mereka mengalami subordinasi, dimana terdapat keyakinan bahwa jenis kelamin yang satu dianggap lebih utama dari yang lain. Sudah sejak pandangan umum memosisikan perempuan setempat dalam kedudukan yang lebih rendah dari laki-laki.

Dampak yang muncul akibat subordinasi dan *multiple burden* ini adalah anak-anak sebagaimana diungkapkan oleh Karen Oppenheim Mason (2001) menyatakan bahwa salah satu persepsi paling banyak dalam literatur demografi adalah pembatasan kebebasan perempuan untuk bergerak, membuat keputusan sendiri, akses informasi dan

kontrol sumber daya materi. Yang dimaksudkan untuk menjaga keefektifan mereka dalam mengurus anak-anaknya dan memastikan keberlangsungan hidup anaknya, tetapi dalam hal ini juga dapat diartikan bahwa kemampuan perempuan diremehkan untuk mengurus anak-anaknya dan memastikan keberlangsungan hidup anaknya secara efektif dan juga ini berarti mengabaikan kesehatan dan harapan hidup mereka sendiri, yang juga sangat penting bagi keberlangsungan hidup anak mereka.

Atas dasar tersebut perlu diberikan pendekatan yang sesuai untuk memberikan peluang bagi perempuan untuk tetap dapat menjaga keberlangsungan hidup sang anak ditengah posisi mereka sebagai multiple burden, serta perlu diberikan pandangan baru mengenai pentingnya peningkatan peran perempuan dalam menjaga kualitas hidup keluarganya. Selain itu perempuan perlu untuk menyadari posisi mereka dalam pengambilan keputusan keluarga yang cenderung inferior dan menjadi subordinat.

Dibutuhkan suatu bentuk penyuluhan dan pembentukan forum yang mampu memberdayakan kaum perempuan setempat untuk mempersiapkan perempuan agar tetap mampu menjaga kualitas hidup keluarganya dan memberikan ruang lingkup berpikir yang lebih luas dan lebih bebas bagi perempuan terutama untuk menyuarakan isi hatinya. Selain itu juga forum ini diharapkan mampu meningkatkan *skill* perempuan sehingga mereka bisa lebih produktif. Pertemuan ini dapat disisipkan kedalam Program Posyandu dengan memasukkan materi penyuluhan bagi para ibu dan perempuan. Kedepannya dapat dilakukan pelatihan dan pembinaan untuk peningkatan *skill* perempuan. Selain itu nantinya penyuluhan ini dapat dilakukan berjalan secara berkala.

5.3.4. Masalah Modal Sosial

Ditinjau dari sisi peranan modal sosial di dalam masyarakat, ditemukan satu masalah penting bahwa modal sosial yang dimiliki masyarakat Pangaloan masih satu dimensi yakni fungsi *Bonding* yang baik namun terbatas pada kohesifitas masyarakatnya yang kuat. Sementara fungsi *bridging* masih lemah, rasa mutual trust sangat rendah sehingga cenderung resisten terhadap pihak yang dianggap orang luar. Selain itu juga rendahnya kemauan warga untuk berubah dan pemahaman nilai yang berbeda.

Hal ini akan menyebabkan masyarakat sulit untuk maju berkembang bila tidak dibarengi dengan upaya perubahan dari dalam melalui peningkatan interaksi dengan kelompok luar dan peningkatan arus informasi positif masuk kedalam dengan demikian modal sosial akan tumbuh dengan kuat.

Menurut Rachbini (2008), kombinasi kedua pengelompokan modal sosial tersebut bila berjalan optimal mendorong modal sosial masyarakat berkembang dengan baik. Untuk menjaga modal sosial dan meningkatkannya agar memiliki kombinasi fungsi *bonding* dan *bridging* yang kuat dan baik diperlukan hal-hal yang mampu memperkuat. Untuk memperkuat *bonding*, perlu dilakukan upaya-upaya kolektif untuk membangun tatanan didalam masyarakat yang lebih besar dan formal. Dapat dilakukan dengan melanggengkan tradisi melalui peristiwa kelembagaan seperti perayaan adat dan bentuk kebersamaan yang fungsional lainnya untuk memperkuat elemen *bonding* dalam masyarakat.

Untuk memperkuat fungsi *bridging*, dapat dilakukan peningkatan interaksi antar kelompok terutama dengan kelompok yang berada di luar juga dengan meningkatkan arus informasi masuk kedalam, juga dengan memperbaiki inisiatif komunitas, tanggung jawab dan kemampuan menyerapnya.

Dalam konteks kawasan Pangaloran ini, solusi terhadap rendahnya modal sosial ini adalah dengan memperkuat fungsi *bridging*. Hal yang tepat dilakukan dengan kondisi masyarakat yang resisten adalah dengan melakukan perubahan dari dalam. Berarti diperlukan rasa inisiatif yang tinggi dari dalam komunitas, peningkatan tanggung jawab dan peningkatan pemahaman atas nilai-nilai yang berbeda. Hal ini dapat diselesaikan melalui suatu pendekatan partisipatif dalam berbagai hal terkait upaya perubahan dalam masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat ditekankan untuk lebih berperan aktif, pihak luar hanya hadir sebagai fasilitator. Dengan demikian seluruh aspirasi masyarakat akan tetap terakomodir dalam setiap perubahan yang akan dilakukan.

BAB 6

SKENARIO *ACTION PLAN*

Berdasarkan uraian pada bab 5 dapat diidentifikasi bahwa prioritas masalah yang utama adalah Atas dasar tersebut dapat ditentukan bahwa terdapat beberapa prioritas masalah yang harus segera diatasi, yakni:

- masalah kesehatan keluarga dan lingkungan,
- masalah pendidikan anak dalam keluarga,
- subordinasi terhadap perempuan dalam keluarga
- masalah modal sosial yang rendah dikarenakan berupa kohesivitas yang terlalu kuat, rasa mutual trust yang rendah, rendahnya kemauan warga untuk berubah dan pemahaman nilai yang berbeda.

Hal ini menjadi prioritas masalah yang harus segera ditangani. Atas dasar masalah yang ada, maka dikhawatirkan dalam jangka waktu kedepan penurunan kualitas keluarga terus terjadi. Dengan memperhatikan analisa terhadap bab 5 sebelumnya mengenai prioritas masalah dan alternatif solusi, maka disusun suatu skenario *Action Plan* yang dapat mengatasi masalah tersebut secara komprehensif. Untuk mengembangkan skenario *Action Plan* tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan. yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- masyarakat setempat cenderung resisten terhadap perubahan dari luar keluarga. Maka pelaksanaan program harus bersifat partisipatif dengan membuat suatu forum pelaksana yang terdiri elemen masyarakat mewakili seluruh pihak terutama pihak adat dan gereja, sehingga perubahan akan tampak dari dalam masyarakat sendiri.
- faktor modal sumber daya alam dan infrastruktur yang sudah cukup baik serta komitmen yang tinggi dari para *stakeholders* seperti kepala desa, Bidan Desa, warga yang merantau sukses dan beretos kerja tinggi, guru-guru dan gereja merupakan modal dasar yang sangat baik untuk pelaksanaan skenario *action plan*.

- Strategi dasar yang harus dilakukan sejak dini adalah strategi komprehensif yang bertujuan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga di pedesaan melalui penyediaan akses dasar yang belum ada dan pemberdayaan setiap keluarga. Peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga agar tidak masuk ke batas garis kemiskinan. dan kemandirian dimaksudkan agar setelah proses intervensi yang dilakukan, kedepannya keluarga dapat secara mandiri dan berkelanjutan mempertahankan kualitas kesejahteraan keluarganya.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka untuk melaksanakan skenario *action plan* yang sudah ada, setelahnya perlu dilakukan hal sebagai berikut:

- koordinasi secara sinergis terhadap seluruh *stakeholders* dan sosialisasi skenario *action plan* kepada perangkat-perangkat desa dan *stakeholders* lainnya yang berpengaruh di masyarakat terutama tokoh adat dan gereja.
- Pembentukan forum pemberdayaan masyarakat sebagai institusi pelaksana yang berasal dari seluruh *stakeholders* yang akan terlibat di lapangan serta unsur-unsur yang dapat mewakili seluruh lapisan masyarakat.
- Pemantapan skenario *action plan* yang sudah ada menjadi *action plan* melalui curah pendapat dalam forum pemberdayaan masyarakat.
- Penyiapan para *stakeholders* sebagai kader pelaksana program di lapangan.

6.1. Bentuk Kegiatan Skenario *Action Plan*

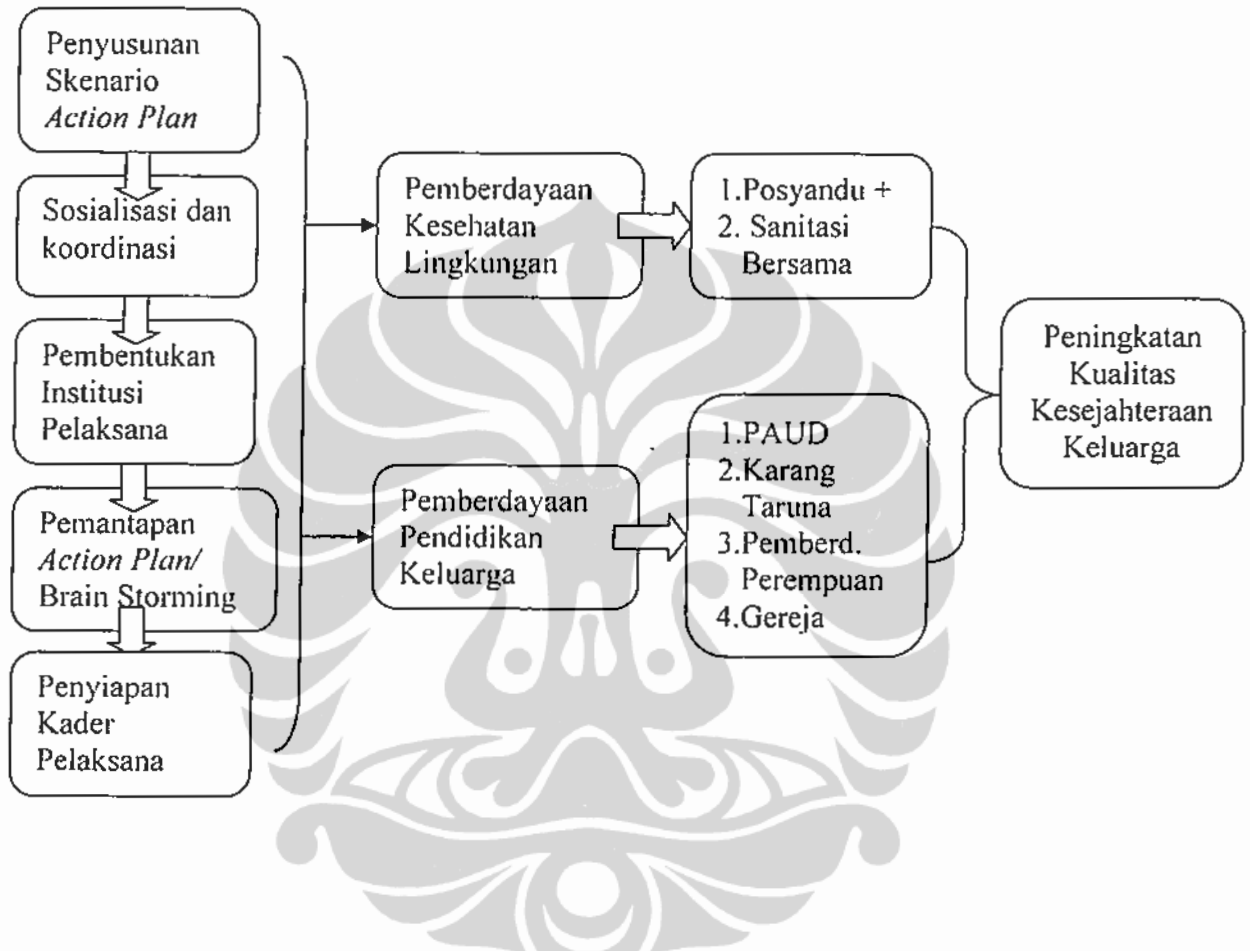
Secara garis besar, untuk mendaratkan strategi secara komprehensif maka diperlukan intervensi yang dimunculkan melalui forum pemberdayaan masyarakat melalui penyusunan suatu skenario program terpadu yang mengintervensi setidaknya dua hal pokok : kesehatan lingkungan dan pendidikan keluarga.

Kedua variabel tersebut tercakup dalam satu **program pemberdayaan keluarga yang terpadu**. Program ini mencakup dua subprogram, antara lain :

-Program Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan

-Program Pemberdayaan Pendidikan Keluarga

Setiap sub program memiliki kegiatan yang bersifat intervensi langsung dari forum masyarakat dan dapat berlanjut secara swadaya dari dalam komunitas keluarga.



Gbr. 6.1. Skema Pemberdayaan Keluarga Sejahtera secara Terpadu

6.1.1. Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan

Program pemberdayaan kesehatan lingkungan memiliki bentuk kegiatan sebagai berikut:

- **Posyandu Plus**

kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat promotif preventif sebagai pengembangan dari kegiatan posyandu yang pada umumnya sudah berjalan baik di masyarakat. Kegiatan promotif preventif pada kenyataannya jauh lebih

efektif meningkatkan kesehatan masyarakat dibandingkan kegiatan kuratif. Kegiatan posyandu merupakan alat promosi dan prevensi kesehatan yang sangat efektif namun penggunaannya selama ini masih sebatas pada Keluarga Berencana dan kesehatan ibu, bayi dan anak. pada kegiatan baru ini, fungsi posyandu dan kemampuan setiap kadernya diperluas.

Materi posyandu akan ditambah dengan materi kesehatan keluarga secara lengkap bagi seluruh anggota keluarga terutama masalah kesehatan lingkungan. Sehingga didalamnya terdapat proses promosi dan prevensi kesehatan secara lengkap dan terjadi proses monitoring kesehatan keluarga secara berkala. Program ini nantinya didorong agar dilaksanakan secara swadaya sehingga ada fungsi kontrol dari dalam komunitas sendiri terhadap kesehatan komunitasnya.

Stakeholders yang dapat berperan: Pemerintah daerah melalui dinas kesehatan setempat, puskesmas setempat, pemerintah desa, warga sebagai kader, pihak gereja sebagai penyedia tempat, pihak PLTP ataupun pihak luar lain sebagai sponsor.

- **Pembangunan Sarana Sanitasi Bersama dan Pembuangan Sampah Bersama secara Swadaya**

Saat ini sarana MCK menjadi sesuatu yang sulit ditemui di dalam keluarga. Alasan yang dikemukakan antara lain karena mahalnya biaya membangun MCK. Selain MCK, fasilitas air bersih juga masih sangat terbatas dan pengelolaan sampah belum dilakukan secara terpadu. Dengan memperhatikan pola pemukiman masyarakat setempat yang cenderung mengelompok dalam satu dusun keluarga, maka perlu dibangun sarana sanitasi bersama dan fasilitas pengelolaan sampah di setiap dusun yang dibangun secara swadaya (hal ini penting untuk menumbuhkan rasa memiliki) dan kemudian dikelola pula secara swadaya untuk tetap menjaga fungsi kontrol terhadap sanitasi tersebut.

Melalui program ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan lingkungannya dan yang paling penting adalah terjadinya proses saling

mengontrol dan mengevaluasi dari dalam sehingga proses peningkatan kualitas kesehatan timbul dari kesadaran dan kemandirian komunitas itu sendiri.

Stakeholders yang dapat berperan: Pemerintah desa, seluruh warga, pihak PLTP ataupun pihak luar lain sebagai sponsor.

6.1.2. Pemberdayaan Pendidikan Keluarga

Program Pemberdayaan Pendidikan Keluarga dimaksudkan sebagai pengembangan kegiatan bagi setiap anggota keluarga sehingga proses pendidikan non formal tetap dapat dibentuk sejak dini. Untuk program ini secara lengkap terdapat 5 urutan prioritas, area intervensi pendidikan yang dibagi berdasarkan usia antara lain, Balita, Anak, Remaja dan kaum ibu. terdapat satu area lagi yang berfungsi melengkapi yakni area Agama. Program yang akan dilakukan antara lain:

- **Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Program ini untuk usia balita ini merupakan prioritas utama karena program ini belum dikembangkan dan mampu untuk memperbaiki kualitas pendidikan dalam keluarga sejak dini. Ini penting, mengingat kurangnya peranan orang tua dalam pembinaan anak sejak dini didalam keluarga.

forum harus mampu menyediakan suatu kegiatan pendidikan non formal sederhana yang berbasis pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD sendiri sudah berjalan di banyak tempat di tanah air dan terbukti efektif dan efisien untuk mendidik anak balita. Kegiatan ini sendiri saat ini sedang digalakkan pemerintah melalui direktorat PAUD di Depdiknas.

Stakeholders yang dapat berperan: Pemerintah Daerah melalui dinas pendidikan, Pemerintah desa, Gereja, guru SD, pengelola posyandu, pihak PLTP ataupun pihak luar lain sebagai sponsor.

- **Pengembangan Karang Taruna Swadaya**

Program ini merupakan program yang disediakan untuk mencegah anak dan remaja dari pola hidup konsumtif dan tidak terawasi melalui penyaluran hobi yang materinya jelas berbeda dengan materi formal sekolah. disini perlu dikembangkan suatu hobby group yang nantinya pun dapat mempersiapkan anak-anak untuk lebih mandiri. Pengembangan dapat dilakukan melalui melalui dukungan teknis dan program pelatihan terhadap karang taruna setempat.

Usia remaja merupakan usia pembentukan identitas diri, mereka memiliki pandangan yang lebih kritis dan luas terhadap lingkungan namun cenderung labil. Pada usia ini, pengaruh teman sebaya lebih besar daripada pengaruh keluarga dan sekolah. Maka untuk menghadapi perubahan perilaku yang terjadi pada remaja perlu dikemas pula materi kegiatan yang positif yang berfungsi sebagai penyeimbang dan katalisator.

Materi yang diberikan terutama menyangkut kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dalam pemberian materi ini diharapkan remaja itu sendiri yang berperan sebagai pendamping sebaya (*peer group*) melalui kelompok komunitas remaja seperti karang taruna serta menjadi kader bagi pengembangan program posyandu plus. Selain itu pula diberikan materi mengenai kewirausahaan dan kesempatan magang untuk mempersiapkan mereka di masa depan.

Stakeholders yang dapat berperan: Pemerintah Daerah melalui instansi kepemudaan, Pemerintah desa, Gereja, Karang Taruna, pihak PLTP ataupun pihak luar lain sebagai sponsor.

- **Forum Pemberdayaan Perempuan**

Untuk perempuan, terutama para ibu, selain kegiatan yang didapat pada posyandu plus, juga diperlukan pendidikan khusus mengenai masalah-masalah sosial keluarga, antara lain keuangan rumah tangga, kekerasan dalam rumah

tangga, hak-hak anak dan perempuan, dan isu-isu seputar masalah sosial keluarga lainnya.

Bentuk kegiatan bagi ibu ini berupa forum diskusi masalah keluarga yang rutin mengundang pihak yang berkompeten dan dapat dilakukan melalui pemanfaatan pertemuan rutin di gereja ataupun acara arisan komunitas ibu setempat. Dalam hal ini materi yang diberikan terutama masalah pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan.

Stakeholders yang dapat berperan: pemerintah daerah melalui instansi yang menangani pemberdayaan perempuan, pemerintah desa, gereja, pihak PLTP ataupun pihak luar lain sebagai sponsor.

- **Pemberdayaan Fungsi Gereja**

Untuk area **agama**, seharusnya area ini dapat menjadi katalisator ataupun sebagai penyeimbang bagi seluruh anggota keluarga, sehingga gereja dapat membawa perubahan cara berpikir dalam keluarga. Tetapi kenyataannya peran gereja masih sebatas pada kaum ibu dan remaja, oleh karenanya diperlukan suatu bentuk dukungan yang positif bagi peningkatan peran gereja.

Salah satu bentuk yang paling baik adalah melibatkan gereja sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan diatas, antara lain untuk lokasi Posyandu plus, PAUD, pemberdayaan Karang Taruna dan pemberdayaan Perempuan. kegiatan ini juga berfungsi untuk menyiapkan pendidikan agama bagi anak dalam keluarga. dan yang terpenting, kegiatan ini dapat menjadi forum pertemuan masyarakat komunitas sebagai media bertukar informasi dan berkomunikasi mengenai pemberdayaan keluarga mereka.

Stakeholders yang dapat berperan: Gereja, pemerintah desa, pihak PLTP ataupun pihak luar lain sebagai sponsor

6.2. Tahapan Pelaksanaan Program

Tahap Persiapan (1 Bulan)

Tahapan persiapan program meliputi upaya sosialisasi dan koordinasi Program, dan pembentukan Institusi Pelaksana. Setelah terbentuk institusi pelaksana dari dalam masyarakat, dilakukan terlebih dahulu Pemantapan Action Plan / Brainstorming untuk menyesuaikan Action Plan dengan kebutuhan masyarakat. Setelah teridentifikasi dan dilakukan redesain awal, kemudian dilakukan penyiapan Kader Pelaksana dan infrastruktur.

Tahap Jangka Pendek (Bulan ke 1 dan ke 2)

Program awal yang segera perlu dilakukan dalam jangka pendek adalah:

- Program Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan melalui Posyandu Plus dan
- Program Pemberdayaan Pendidikan Keluarga melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kedua program ini dilakukan terlebih dahulu untuk menarik respon kaum ibu. Tahapan yang dilakukan adalah :

- Pelaksanaan Posyandu biasa secara lebih komprehensif dan menyeluruh
- Memastikan Ketersediaan Kader PAUD dan penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) sebagai alat peraga PAUD di lokasi Posyandu Plus saat itu.
- Pelaksanaan kelas PAUD bagi anak usia 3-5 tahun yang telah ditimbang, bersamaan dengan pelaksanaan Posyandu Plus di tempat yang sama.
- Penyuluhan singkat pada saat Posyandu dilakukan mengenai Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).

Tahap Jangka Menengah (Bulan ke 2)

Tahap jangka menengah mencakup pelaksanaan:

- Program Pemberdayaan Kesehatan Keluarga Lingkungan melalui penyediaan Fasilitas Sanitasi Bersama dan Fasilitas Pengelolaan Sampah Bersama
- Program Pemberdayaan Pendidikan Keluarga melalui Karang Taruna.

Tahapan yang dilakukan antara lain:

- Penyediaan Fasilitas Sanitasi Bersama mencakup sumber air bersih baru dan MCK.
- Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah bersama (bak sampah, gerobak sampah, TPS desa)
- Fasilitasi masyarakat untuk pengelolaan fasilitas sanitasi bersama dan pengelolaan sampah
- Pelatihan dan pemberdayaan Kader Karang Taruna sebagai rekan sebaya (*Peer Group Educator*)
- Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan di Gereja.

Tahap Jangka Panjang (Bulan ke 3 dan seterusnya)

Tahap jangka panjang mencakup pengembangan program pemberdayaan kesehatan lingkungan dan program pemberdayaan keluarga kearah yang lebih berkelanjutan.

Tahapan yang dilakukan antara lain:

- Kemitraan berupa dukungan sumber daya Posyandu lanjutan (berupa PMT (formula 70, 100), alat KB, obat-obatan yang diperlukan dan lain-lainnya) serta sumber daya PAUD melalui sponsor tertentu. CSR, APBD dan sebagainya
- Pengembangan aktivitas Gereja untuk:
 - Penyediaan sarana dan pengembangan lanjutan kegiatan Posyandu Plus
 - Penyediaan Sarana dan Pengembangan lanjutan kegiatan PAUD dalam Posyandu Plus menjadi PAUD yang mandiri dan berkelanjutan.

- Penyediaan Sarana dan Fasilitas untuk kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan kegiatan karang taruna mengenai pendidikan Remaja melalui rekan sebaya.

6.3. Pengelolaan Program

Mengingat sifat masyarakat yang cenderung introvert dan resisten terhadap pihak luar, pengelolaan program diharapkan sejak awal benar-benar dilakukan melalui suatu forum yang dibentuk dari dalam masyarakat setempat (bukan oleh pemerintah desa). *stakeholders* lainnya diluar masyarakat setempat hanya berperan sebagai pendukung teknis dan fasilitator program. hal ini dimaksudkan untuk menjaga sifat partisipatif dari program ini.

Bila evaluasi menunjukkan perkembangan yang positif, maka peran fasilitasi program dapat ditransisikan kepada masyarakat secara penuh sehingga program akan berjalan secara *sustainable* dan pada akhirnya akan dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat dan masyarakat dapat melakukan redesain sendiri terhadap program yang ada disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

6.4. Tindak Lanjut Program

Secara bersamaan maupun pasca program-program diatas tersebut berjalan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang tidak hanya melibatkan pengelola program tetapi juga masyarakat selaku pelaksana yang sebenarnya. Mengingat sifat program yang dalam implementasinya sangat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan keinginan lokal, metode evaluasi yang digunakan untuk mengkaji implementasi harus bersifat terbuka (*open ended*), berorientasi pada penemuan dan mampu menggambarkan proses perkembangan dan perubahan program. Metode evaluasi kualitatif secara ideal cocok untuk tugas seperti itu (Patton, 1991).

Melalui metode kualitatif ini pula diharapkan masyarakat dapat terlibat secara aktif didalam redesain program melalui upaya-upaya diskusi terfokus, curah pendapat dan metode-metode kualitatif partisipatif lainnya. Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan

diperoleh kedalaman informasi dari masyarakat mengenai implementasi program. Dengan demikian pengelola program dan masyarakat terdorong untuk benar-benar ikut terlibat dalam perancangan program yang lebih baik. Meskipun demikian proses evaluasi tetap mempertimbangkan data-data kuantitatif sebagai indikator pencapaian. Diharapkan setelah satu periode program berjalan dapat langsung dilakukan redesain program secara lebih sempurna. Selain itu diharapkan pula program dapat diterpadukan dengan program-program pemerintah yang sudah berjalan hingga saat ini.



DAFTAR REFERENSI

- Adimihardja, Kusnaka, Harry Hikmat (2004), *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press.
- Adisasmita, Rahardjo (2006). *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anderson, Walfred A., Parker, Frederick B. (1964). *Society: Its Organization and Operation*, New Jersey: D. Van Nostrand Company, Inc.
- Bloom, David E. dan David Canning (2000). The Health and Wealth of Nations. *Science*, February 2000.
- Bloom, David E. dan David Canning (2001), *The Health and Poverty of Nations: From Theory to Practice*. School of Public Health, Harvard University, Boston and Dept. of Economics, Queens University, Belfast.
- Boserup, Ester (1990). "Population, the Status of Women, and Rural Development" in McNicoll, G. and Mead Cain (1990), *Rural Development and Population: Institutions and Policy*, New York: Oxford University Press.
- Burhan, Bungin (2007) *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Cotgrove, Stephen. (1978) *The Science of Society. An Introduction to Sociology*, London: George Allen & Unwin.
- Daulay, Harmona (2001). *Pergeseran Pola Relasi Gender di Keluarga Migran: Studi Kasus TKIW di Kecamatan Ravamarta Kab. Karawang Jawa Barat*, Yogyakarta: Galang Press dan Ford Foundation.
- Djojohadikusumo, Soemitro (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, dasar teori ekonomi dan ekonomi pembangunan*, Jakarta : LP3ES.
- Ember, Carol R., Melvin Ember. (1980). "Perkenalan dengan Antropologi", "Konsep Kebudayaan" dalam Ihromi. TO. (2006). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Goode, William J. (1991), *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Green, Paul G. and Anna Haines (2002), *Asset Building and Community Development*, California: Sage Publication.
- Hasbullah, Jousairi (2006). *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*, Jakarta: MR-United Press.
- Hoed, Benny H. (2008). *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*, Jakarta: FIB-UI.
- Kuncoro, Mudrajad (2003), *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: AMP YKPN.
- Koentjaraningrat, (2007). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Marzali, Amri (2003), *Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

- McDonald, Peter (2000), "Gender Equity in Theories of Fertility Transition" in *Population and Development Review* 26 (3) : 427-439 (September 2000).
- Moeljarto, Vidhyandika (1997). "Gender dan Kemiskinan : menelaah posisi perempuan dalam pembangunan pertanian", dalam *Analisa CSIS XXVI (4)* : 372-385.
- Nurske, Ragnar (1957), *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, Oxford : Basil Blackwell.
- Patton, Michael Q (1991), *Metode Evaluasi Kualitatif (terj.)*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Rachbini, Didik J. (2008), *Ekonomi Politik (Ekonomi Kelembagaan Baru)*, Jakarta:.....
- Raharjo, Yulfita; Roosmalawati R dan Herry Yogaswara (Ed.), 1997, *Masalah Pengukuran, Pencapaian Intervensi terfokus Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Tumbuh Kembang Anak Dalam Konteks Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia*, Jakarta, Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan-LIPI
- Rahman, Lupin. Rao, V. (2004), "The Determinants of Gender Equity in India: Examining Dyson and Moore's Thesis with New Data" in *Population and Development Review* 30 (2) : 239-268 (June 2004).
- Rintuh, Cornelis dan Miar (2005), *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: BP-FE UGM.
- Scott, Richard W.. (2001), *Institutions and Organizations*, London: Sage Publications.
- Sen, Amartya (1990). "Cooperation, Inequality, and the Family" in McNicoll, G. and Mead Cain (1990), *Rural Development and Population: Institutions and Policy*, New York: Oxford University Press.
- Sharp, A.M., Register, C.A., Grimes , P.W. (2000), *Economics of Social Issues 14th edition*, New York: Irwin/McGraw-Hill.
- Spicker, Paul, (2002), *Poverty and the Welfare State : Dispelling the Myths*, A Catalyst Working Paper, London: Catalyst.
- Suparlan, Parsudi (1994). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika – Universitas Indonesia.
- Suryohadiprojo, Sayidiman (2007). "Pendidikan dalam Keluarga" dalam www.sayidiman.suryohadiprojo.com.
- Susanto, Hari (2006). *Dinamika Penanggulangan Kemiskinan: Tinjauan Historis Era Orde Baru*. Jakarta: Khanata. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Susilawati, Nani (2007), *Memahami Pendidikan Anak usia Dini*, disampaikan pada Training Volunteer CERIC FISIP USU tahun 2007.
- Sustainable Agriculture Programme (....), *RRA Notes*. London: International Institute for Environment and Development.

- Todaro, Michael P. dan Jerry Stilkind (1983), "Dilema Urbanisasi", dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (ed.), (1983), *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Todaro, Michael P.(1987), *Ilmu Ekonomi Bagi Negara Sedang Berkembang Buku I dan II*. Jakarta. Penerbit Akademika Pressindo CV.
- United Nations Development Programme. (2003), *Human Development Report 2003, Millenium Developments Goals: A compact among nations to end human poverty*. Oxford University Press. New York.
- Yulaswati, Vivi (2007), *Bahan Ajar Tambahan Kuliah Kemiskinan*.



Lampiran 2. Pedoman Wawancara Umum

(dikembangkan berdasarkan Outline Pemetaan Sosial – mata kuliah Perencanaan Berbasis Masyarakat)

1. Administrasi Wilayah
2. Struktur Pemerintahan
3. Sejarah Perkembangan Desa
4. Kondisi Geografis wilayah
 - a. potensi SDA,
 - b. Kondisi Sarana dan Prasarana (jalan, pendidikan, kesehatan, pasar, pelabuhan, permukiman, kantor Pemerintah dll.)
 - c. Tipikal permukiman masyarakat
 - d. Aksesibilitas masyarakat ke pasar
 - e. Aksesibilitas masyarakat ke kota
 - f. Hambatan geografis yang dihadapi masyarakat
6. Kondisi Demografis
 - a. Masyarakat (kesukuan, nilai-nilai budaya, tradisi yang dominan)
 - b. Hubungan antar suku-suku bangsa yang ada
 - c. Migran yang ada
 - d. Hubungan suku bangsa setempat dengan kaum pendatang
 - e. Pendidikan secara kuantitas maupun kualitas (jumlah murid yang bersekolah, rata-rata pendidikan masyarakat, kualitas para guru, kualitas pengajaran di sekolah, persepsi masyarakat mengenai pendidikan, dll)
 - f. Kesehatan (persepsi masyarakat mengenai kesehatan, pengobatan tradisonal/modern, penyakit yang sering diderita oleh masyarakat, jenis-jenis pelayanan)
 - g. Peran wanita dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi serta dalam suku dan keluarga, pola penggunaan waktu, dll.
7. Hambatan/masalah yang berkembang dalam hal kondisi demografis (ditanyakan bersamaan dengan pertanyaan terkait kondisi demografis (poin 6)
8. Kondisi Sarana dan Prasarana. Penjelasan mengenai sarana dan prasarana yang ada, sudah memadai atau belum, bila sudah apakah penggunaannya sudah optimal. Pada saat pembuatan sarana dan prasarana, seberapa jauh keterlibatan masyarakat, sesuai atau tidak dengan kebutuhan masyarakat. Seberapa besar sense of belonging yang dimiliki masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana yang ada (ikut memelihara, ikut menjaga kebersihan, dll)
9. Hambatan/masalah yang berkembang dalam hal kondisi sarana prasarana (ditanyakan bersamaan dengan pertanyaan terkait kondisi demografis (poin 6)
10. Mata pencaharian Masyarakat
11. Kendala dalam memperoleh mata pencaharian. Migrasi terjadi atau tidak. Alasan dan Tujuan migrasi.
12. Peran Kelembagaan di Masyarakat. Lembaga manakah yang paling berpengaruh? Pengaruh dalam hal apa?
13. Keberadaan PLTP, kendala dan harapan.
14. Harapan masyarakat ke depan. Bila buruk, masih bisakah berubah?

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Khusus sesuai Peran *Stakeholders*.

- Dinamika yang berkembang di masyarakat terkait peran *stakeholders*
- Seberapa besar peran *stakeholders*?
- Sejauh mana Peran *Stakeholders* sesuai dengan kepentingannya.
- Seberapa besar sense of belonging yang dimiliki *stakeholders* terhadap Sarana dan Prasarana yang ada
- Dampak modernisasi terhadap peran *stakeholders*, lingkungan masyarakat di sekelilingnya
- Relasi antara *stakeholders* dan masyarakat
- migrasi di mata narasumber.
- Peran Kelembagaan di Masyarakat. Lembaga manakah yang paling berpengaruh? Pengaruh dalam hal apa?
- Peran kelembagaan *stakeholders* seberapa berpengaruh dimasyarakat?
- Kemauan *stakeholders* untuk berubah/ mengubah masyarakat?
- Kondisi Kesejahteraan Penduduk saat ini di mata *stakeholders* terkait
 - Pendidikan secara kuantitas maupun kualitas
 - Kesehatan.
 - Ekonomi, mata pencaharian.
 - Perempuan
 - Kultur
- Hambatan/masalah yang berkembang dalam pemenuhan kesejahteraan penduduk.
- Keberadaan PLTP, kendala dan harapan.
- Harapan *stakeholders* ke depan. Bila buruk, masih bisakah berubah?

Lampiran 4

**MATRIKS IDENTIFIKASI
KEKUATAN-KELEMAHAN-PELUANG-HAMBATAN (SWOT)**

NO.	SEKTOR	MASALAH INTERNAL		MASALAH EKSTERNAL	
		KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	HAMBATAN
1.	Kesehatan	<p><u>Kesehatan Keluarga</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebutuhan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak mulai meningkat; ▪ Partisipasi masyarakat terhadap penyediaan lahan untuk pustu dan polindes ▪ Dukungan yang kuat dari kepala desa dan gereja 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puskesmas Pembantu dan Polindes belum ada pada semua desa; ▪ Tidak setiap desa/dusun memiliki petugas kesehatan, walaupun ada kapasitasnya hanya sebagai bidan desa; ▪ Petugas kesehatan merangkap tugas di beberapa desa/dusun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih adanya tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan pada Pustu di dusun/desa; ▪ Masih aktifnya bidan desa untuk terus mempromosikan kesehatan meskipun secara informal ▪ kemampuan Bidan desa meningkatkan kapasitas pengetahuan dukun kampung ▪ Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat terutama kaum ibu untuk menjaga kesehatan anak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Polindes dan penambahan petugas kesehatan merupakan tanggung jawab dan kewenangan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten; ▪ Pemberlakuan penempatan tenaga kesehatan seperti bidan desa/polindes hanya satu pada tiap desa, sementara wilayah desa luas/akses terbatas/dusun tersebar; ▪ Sikap keluarga yang terkadang masih tertutup sehingga sulit untuk melakukan

	<p>Kesehatan Lingkungan Sumber Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dua sumber mata air di kawasan perbukitan dialirkan melalui 5 kran sumber air minum yang diletakkan di sepanjang jalan protokol ▪ 6 aliran sungai kecil mengalir pada satu sungai besar (Sungai Batang Toru) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kran Air Minum belum menjangkau daerah yang tidak dilalui jalan protokol ▪ Ph sumur-sumur warga rendah sehingga tidak dapat diminum dan membuat mereka tergantung pd mata air ▪ Sungai-sungai kecil dijadikan tempat MCK sehingga kualitas rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber Air baik Mata Air maupun Sungai sangat melimpah sehingga masih bisa dimanfaatkan lebih maksimal ▪ Kemauan perangkat desa (kepala desa) untuk merintis ▪ Keberadaan gereja sebagai sumber penyuluhan 	<p>tindakan promotif, preventif maupun kuratif.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyalurkan air bersih ke rumah-rumah warga terhambat ketidakmampuan dan kurangnya kemauan warga. ▪ Sikap warga yang acuh dan sulit menerima pendapat lain.
<p>MCK Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beberapa warga yang pernah merantau dan kembali lagi, serta warga pendatang memiliki MCK dan sudah ada pemandian umum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan bangunan pemandian umum rendah karena jarak; ▪ Kebiasaan masyarakat membuang kotoran di sungai dan pekarangan; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas dan kuantitas sanitasi yang rendah membuat Kebutuhan MCK Umum oleh warga masyarakat sangat tinggi, terutama untuk mandi dan cuci; ▪ Kemauan perangkat desa (kepala desa) untuk merintis pendirian MCK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya kemauan warga 	

	<p>Bak Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> Hampir tidak ada bak sampah, biasanya sampah hanya ditaruh disudut-sudut rumah dan kemudian dibakar. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga masih lemah; dibakar atau dibuang ke sungai kecil atau aliran air di belakang rumah Kotoran ternak tidak terpisah Bak sampah hampir tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan gereja sebagai sumber penyuluhan Kemauan perangkat desa (kepala desa) untuk merintis Keberadaan gereja sebagai sumber penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> Sampah belum menjadi prioritas masalah bagi masyarakat pada umumnya; Belum ada kebijakan yang dikeluarkan Pemda Kecamatan/Desa untuk pengelolaan sampah. belum ada sistem pengelolaan.
<p>Kondisi Fisik Rumah</p> <ul style="list-style-type: none"> Berlantai dan memiliki televisi Berdinding kayu (kayu damar laut) yang lebih aman terhadap ancaman gempa (daerah Pahae Jae berada di jalur seismik dan rutin terkena gempa) 	<ul style="list-style-type: none"> kondisi fisik sebagian besar rumah warga tidak terawat, baik fisik dalam rumah maupun luar rumah serta kebersihan pekarangannya. Penggunaan kayu sebagai dinding tidak terawat karena harga minyak untuk melapisinya semakin tinggi. Pemeliharaan ternak belum dipisah dengan pengelolaan rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan keberadaan rumah berinding kayu yang tahan lama dan berdaya jual. Rehabilitasi bangunan rumah dengan memanfaatkan aktivitas gotong-royong masyarakat sekitar; 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kemauan warga 	

NO.	SEKTOR	MASALAH INTERNAL		MASALAH EKSTERNAL	
		KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	HAMBATAN
2.	Fungsi Pendidikan	<p>Kualitas Output</p> <ul style="list-style-type: none"> Hampir semua warga usia 50 tahun kebawah lulusan minimal SMA Tingkat Buta Huruf 0% <p>Peran Keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> Minat dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan anak tinggi; prioritas utama. Kerelaan orang tua untuk mencari uang demi pendidikan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Benar-benar masih dipandang sebatas prestise, belum menjadi kebutuhan untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga orang tua kurang membina anaknya dirumah karena sibuk (ibu dan bapak sudah berangkat dr rumah di pagi hari ke ladang dan kebun dan kembali di sore hari) sehingga dalam pembinaan anak terutama tingkat dasar, guru lebih berperan Minat belajar sebagian siswa rendah (faktor televisi); Minat Baca Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Bisa menjadi sarana yang kuat untuk memperbaiki kesejahteraan di bidang yang lain Sikap dan kebiasaan yang mengutamakan tingkat pendidikan anak sebagai prestise yang tinggi merupakan peluang besar untuk menciptakan perubahan dalam cara hidup Peran guru sekolah dasar yang besar, dapat menjadi peluang besar dalam mengubah pola perilaku hidup generasi selanjutnya di desa tersebut Peran gereja yang besar 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada peningkatan fasilitas SMP dan SMA negeri di dalam kawasan Pangalaoan Biaya sekolah menengah belum dibebaskan Anggapan orang tua bahwa pendidikan dasar adalah tanggung jawab sekolah

			<p>bagi anak-anak dan remaja juga pintu yang baik untuk merubah pola hidup desa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas sekolah yang ada masih dapat dikembangkan ▪ Keberadaan perpustakaan desa dapat dijadikan peluang peningkatan kapasitas pendidikan warga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggaran untuk pengembangan fasilitas sekolah untuk tiap dusun amat terbatas;
<p>Ketersediaan Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat PAUD Gereja ▪ Terdapat SD Negeri ▪ Terdapat perpustakaan desa ▪ Terdapat TK/SMP/SMA Negeri dan Swasta milik Gereja tidak jauh dari desa ▪ biaya pendidikan dasar gratis untuk anak sekolah; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada PAUD resmi milik pemerintah ▪ Belum semua desa/dusun memiliki sarana pendidikan yang lengkap, Minimnya fasilitas belajar di rumah, khususnya masalah penerangan. ▪ Perpustakaan desa tidak berjalan 		<p>bagi anak-anak dan remaja juga pintu yang baik untuk merubah pola hidup desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada peningkatan kapasitas guru oleh pemerintah, sehingga menghambat guru dalam memperbaiki kualitas materi pengajaran
<p>Tenaga Guru</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ terdapat guru PNS/ bantu/honor di desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah guru bantu/honor lebih banyak dari pada jumlah guru PNS; ▪ Kesejahteraan dan perhatian terhadap guru umumnya sangat kurang; 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih tingginya kemauan guru untuk melakukan perubahan ▪ Masih adanya harapan para guru bahwa murid-muridnya dapat lebih maju 	

NO.	SEKTOR	MASALAH INTERNAL		MASALAH EKSTERNAL	
		KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	HAMBATAN
4.	Fungsi Ekonomi	<p>Potensi Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kandungan tanah yang sangat subur ▪ Sudah ada Tanaman Coklat. Karet dan Kemenyan ▪ Sumber pengairan yang sangat melimpah ▪ Lokasi yang strategis. di tepi lintas barat Sumatera yang sangat baik untuk distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyak keluarga benar-benar tidak paham pengelolaan ekonomi keluarga secara sederhana ▪ Kebiasaan bertani tanpa perhitungan ekonomis ▪ Ketidakarifan dalam pengelolaan tanaman perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada upaya sebagian warga yang pernah merantau lama atau sudah sering berinteraksi dengan masyarakat luar untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan (cara tanam dll) perkebunan dan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak adanya kelembagaan keuangan mikro atau koperasi yang memiliki kekuatan untuk mendeterminasi keluarga secara aktif (seperti grameen bank) ▪ Tidak adanya kemampuan wirausaha keluarga untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian keluarga ▪ Sikap masyarakat yang mengangap bantuan dari pemerintah atau dari pihak luar adalah untuk dihabiskan bukan untuk dimanfaatkan secara

		<p>Peran Perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peran perempuan di bidang ekonomi cukup potensial dan sebagian besar memiliki keterampilan pengolahahan pertanian; ▪ Tipikal perempuan pekerja keras 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kaum laki-laki tidak aktif turun ke lahan pertanian ▪ Subordinasi yang tinggi terhadap perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada kemauan dari kaum perempuan yang didukung oleh pihak gereja 	<p>berlanjut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sikap keluarga yang bebal dan introvert, kurang akomodatif untuk menerima bimbingan penyuluhan. ▪ Pembinaan yang diberikan tidak secara intensif dan tidak dilengkapi dengan kegiatan pendampingan;
--	--	---	---	---	--

<p>4. Kelembagaan Masyarakat</p>	<p>Pemerintahan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada Struktur Pemerintahan Desa sederhana yang dikelola seorang Kepala Desa dengan beberapa Kepala Urusan (Kaur); Badan Perwakilan Desa dan Polmas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ▪ Peran Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Polmas, dan Badan Perwakilan Desa nyaris tidak berfungsi. ▪ Masih kalahnya pengaruh pemerintah desa dibandingkan lembaga adat ▪ Kurang berjalannya pencatatan dan pendataan secara simultan karena semua dipegang kepala desa ▪ Lebih banyak mengurus masalah-masalah formalitas adat yang cenderung dikomersilkan ▪ Tidak responsif terhadap masalah kesejahteraan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemauan kuat kepala desa untuk memperbaiki administrasi desa dan kondisi desa meskipun hanya dibantu segelintir warga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tidak sebesar kepercayaan terhadap lembaga adat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya kepedulian warga terhadap masalah yang dihadapi pemerintah desa ▪ Kurangnya Kemauan para tetua untuk melakukan perubahan dan menerima intervensi dari luar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak adanya pembinaan dari pemerintah untuk lembaga adat
	<p>Masyarakat Adat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sangat kuat dan dipercaya 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya upaya penguatan jejaring hubungan gereja dengan perangkat desa maupun beberapa 	
	<p>Gereja</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlahnya yang cukup banyak (setidaknya ada 6 			

	<p>kelompok gereja)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sangat berpengaruh pada pembinaan kaum perempuan dan remaja ▪ Kemampuan dan pendanaan dan fasilitas pembinaan keluarga sangat memadai <p>Masyarakat di Rantau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perantau sukses memiliki kemauan kuat baik secara moral maupun materiil untuk merubah kebiasaan di desanya ▪ Perantau yang sudah berumur dan pensiun kembali ke desa memberi contoh etos kerja yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rendahnya respon warga terhadap aktivitas gereja ▪ minimnya tenaga sukarelawan lokal dari masyarakat, dimana setiap gereja hanya diurus dan dipegang seorang pendeta yang bukan penduduk asli ▪ Perantau muda yang belum sukses kembali lagi membawa pengaruh urban dan malah menjadi rolemodel yang dengan mudah menularkan kebiasaan baru ke masyarakat lokal dan menggerus kearifan lokal 	<p>warga masyarakat untuk memperbaiki keadaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan secara simultan pada kaum perempuan dan remaja dalam berbagai upaya peningkatan kesejahteraan warga ▪ Masih adanya keinginan kuat para perantau yang beretos kerja tinggi untuk merubah kebiasaan warga secara komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya dukungan tokoh masyarakat adat terhadap tindakan positif gereja ▪ Kurangnya dukungan tokoh adat terhadap partisipasi perantau sukses terhadap pembangunan desa ▪ Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para perantau sukses
--	---	--	--	---

Lampiran 5. Dokumentasi Foto

